PEMERINTAH
KABUPATEN SIGI

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SIGI

TAHUN 2027

BUKU 1



SALINAN



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
7. Bupati adalah Bupati Sigi.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025 – 2029.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
    a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Derah Tahun 2027;
    b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Daerah; dan

c. pedoman penyusunan Rancangan kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sitematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. gmbaran umum kondisi Daerah;
   c. kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
   d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
   g. penutup.

(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijadikan sebagai:

a. pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2027 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
b. pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2027 serta bahan arahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 demi mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran Tahun 2027.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan darurat seperti bencana alam dapat memerlukan perubahan RKPD untuk alokasi anggaran dan program yang lebih mendesak.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 6 NOMOR 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

RUSDIN, SH
Pembina Tkt.I
NIP. 197212052002121007

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum ..... I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan ..... I - 7
1.4 Sistematika Dokumen RKPD ..... I - 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
2.1 Kondisi Umum Daerah ..... II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 22
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 32
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 57
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... II - 69
2.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Daerah IKU dan IKD Tahun 2025 ..... II - 69
2.2.2 Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 ..... II – 72
2.2.3 Evaluasi Capaian Indikator Daerah Tahun 2025 ..... II – 80
2.2.4 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II – 83
2.2.5 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 ..... II – 89
2.2.6 Telaah Hasil Inovasi Tahun 2025 ..... II - 90
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II – 92
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II - 92
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III - 1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional dan Regional ..... III - 1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Sigi ..... III - 5
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III - 11
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III - 12
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III - 16
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III – 22
3.2.4 Alternatif Kebijakan Pendanaan Non-APBD ..... III - 26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV - 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV - 2
4.1.1 Kedudukan Tujuan dan Sasaran RKPD dalam RPJMD ..... IV - 3
4.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target ..... IV - 3

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV - 18
4.2.1 Metode dan Alur Perumusan Fokus Pembangunan ..... IV - 18
4.2.2 Sinkronisasi Tema Nasional, Provinsi, dan Kabupaten ..... IV - 22
4.2.3 Sinkronisasi Prioritas Nasional, 9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah,dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi ..... IV – 24
4.2.4 Fokus Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 ..... IV - 34
4.2.5 Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... IV - 36
4.2.6 Keterkaitan Prioritas dengan Permasalahan, Isu Strategis, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas ..... IV - 40
4.2.7 Penajaman Program Prioritas Berdasarkan Kewenangan, Kesiapan, dan Kemampuan Fiskal ..... IV - 49
4.2.8 Program Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun ..... IV - 51
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V - 1
5.1. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah ..... V - 1
5.2. Target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... V - 3
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VI - 1
6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VI - 1
6.2. Indikator kinerja Daerah (IKD) ..... VI - 2
BAB VII PENUTUP ..... VII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Jarak ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2025 ..... II - 2
Tabel 2.2 Topografi Wilayah Kabupaten Sigi ..... II - 4
Tabel 2.3 Kondisi Formasi Geologi Kabupaten Sigi ..... II - 7
Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sigi ..... II - 17
Tabel 2.5 Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara PaluTahun 2025 ..... II - 9
Tabel 2.6 Data Statistik Perkebunan ..... II - 21
Tabel 2.7 Industri Prioritas Kabupaten Sigi 2020-2040 ..... II - 16
Tabel 2.8 Banyaknya Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam, 2025 ..... II - 22
Tabel 2.9 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2025 ..... II - 25
Tabel 2.10 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024 ..... II - 26
Tabel 2.11 Kemiskinan Periode 2023–2025 Kabupaten Sigi ..... II - 29
Tabel 2.12 Tingkat pengangguran Kabupaten Sigi Tahun 2023-2025 ..... II - 30
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sigi Tahun 2022-2025 ..... II - 37
Tabel 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sigi Tahun 2023-2025 ..... II - 39
Tabel 2.15 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Sigi ..... II - 40
Tabel 2.16 Data Sekolah Dasar di Kabupaten Sigi TA. 2025/2026 ..... II - 38
Tabel 2.17 Data Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sigi TA. 2025/2026 ..... II - 41
Tabel 2.18 Prevalensi Stunting di Kabupaten Sigi Tahun 2020-2025 ..... II - 41
Tabel 2.19 Prevalensi Stunting di Kabupaten Sigi Tahun 2025 ..... II - 42
Tabel 2.20 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Sigi ..... II - 44
Tabel 2.21 Tenaga Kesehatan Kabupaten Sigi ..... II - 43
Tabel 2.22 Indikator Kinerja Kesehatan Kab.Sigi ..... II - 44
Tabel 2.23 Realisasi indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II - 45
Tabel 2.24 Realisasi indikator Urusan Sosial ..... II - 46
Tabel 2.25 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi Tahun 2025 ..... II - 47
Tabel 2.26 Indikator DPPPA Kabupaten Sigi Tahun 2025 ..... II - 49
Tabel 2.27 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Sigi Tahun 2025 ..... II - 63
Tabel 2.28 Realisasi indikator urusan lingkungan hidup ..... II - 51
Tabel 2.29 Realisasi indikator urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil ..... II – 52
Tabel 2.30 Realisasi indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah II - 55
Tabel 2.31 Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Sigi 2025 .. II - 61

Tabel 2.32 Populasi Ternak di Kabupaten Sigi Tahun 2025 ..... II - 62
Tabel 2.33 Pengeluaran per Kapita Tahun 2022 s.d 2024 ..... II - 65
Tabel 2.34 Golongan Pengeluaran Non Pangan Tahun 2025 ..... II - 66
Tabel 2.35 Matriks Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA pada RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2025 ..... II - 69
Tabel 2.36 Matriks Capaian Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2025 ..... II – 73
Tabel 2.37 Capaian Indikator Evaluasi RKPD Tahun 2025 ..... II – 82
Tabel 2.38 SPM Urusan Pendidikan ..... II – 83
Tabel 2.39 SPM Urusan Pekerjaan Umum..... II – 84
Tabel 2.40 SPM Urusan Perumahan Rakyat..... II – 84
Tabel 2.41 SPM Urusan Sosial ..... II – 85
Tabel 2.42 SPM Urusan Kesehatan ..... II – 85
Tabel 2.43 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023-2025.... II – 87
Tabel 2.44 Rumusan Masalah dan Isu Strategis Kabupaten Sigi Tahun 2027 II – 93
Tabel 3.1 Capaian Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Sigi Tahun 2025, Perkiraan Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027..... III -10
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Sigi Tahun 2024 s.d Tahun 2027 ..... III - 14
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 s.d Tahun 2027 ..... III – 21
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 s.d Tahun 2027..... III – 24
Tabel 3.5 Mitra Pembangunan Daerah ..... III - 27
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 ..... IV - 4
Tabel 4.2 Metode dan Alur Perumusan Fokus Pembangunan ..... IV - 38
Tabel 4.3 Sinkronisasi Tema Nasional, Provinsi, dan Kabupaten..... IV - 41
Tabel 4.4 Kedudukan Agenda Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027..... IV - 25
Tabel 4.5 Matriks Sinkronisasi Prioritas Nasional, 9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi Tahun 2027 ..... IV - 28
Tabel 4.6 Fokus Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 ..... IV - 34
Tabel 4.7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 IV - 37
Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2027 dengan Sasaran RPJMD, Isu Strategis, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas..... IV – 41
Tabel 4.9 Kriteria Penajaman Program Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 ..... IV – 49
Tabel 4.10 Program Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027..... IV - 52
Tabel 5.1 Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2027 ..... V - 2

Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sigi Tahun 2027 ..... V - 4
Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2027 ..... IV - 2
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) / Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2027... IV - 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pusat ..... I - 7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sigi ..... II - 3
Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Sigi ... II - 18
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 – 2025 ..... II - 23
Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2024 – 2025..... II - 23
Gambar 2.5 Persentase Kemiskinan Tahun 2023 – 2025 ..... II - 24
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk, Tahun 2023 – 2025 ..... II - 26
Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sigi .. II - 27
Gambar 2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025 Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah ..... II - 28
Gambar 2.9 Harapan Lama SekolahTahun 2020-2025 Kabupaten Sigi ..... II - 29
Gambar 2.10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi ..... II - 30
Gambar 2.11 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sigi ..... II - 31
Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... III - 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kabupaten Sigi disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;

4. Pelaksanaan musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun kegiatan yang diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sigi yang menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai. selanjutnya untuk mengetahui kondisi secara umum program dan kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun yang lalu yang memuat kemajuan yang sudah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi untuk masing-masing bidang pembangunan yang dilaksanakan. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran dan prioritas pembangunan yang hendak dicapai, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD dan memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan/subkegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA PPAS dan untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sigi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Sigi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2027 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2027 merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sigi Tahun 2027. Selanjutnya RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya RKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sigi, dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/ agenda/ program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2029 yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Tujuan khusus dari penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sigi; dan
2. Terwujudnya prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- ✓ Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- ✓ Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- ✓ Mengintegrasikan rencana tata ruang daengan rencana pembangunan daerah; dan
- ✓ Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati, digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen KUA PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sigi. RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi, untuk memastikan APBD Kabupaten Sigi telah disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2027.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027, dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penyajian dokumen RKPD.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Sub bab ini menguraikan proses penyusunan RKPD, kedudukannya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, keterkaitannya dengan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKP

Nasional, serta keterkaitannya dengan penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2027.

1.2 Dasar Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027, baik yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud, tujuan, dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan susunan dan isi pokok setiap bab dalam dokumen RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan kondisi umum daerah, capaian pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, serta berbagai permasalahan pembangunan yang menjadi dasar dalam perumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta perkembangan pembangunan daerah secara umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menyajikan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah, meliputi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, realisasi program pembangunan daerah, capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta perkembangan inovasi daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengidentifikasi dan menguraikan berbagai permasalahan pembangunan yang masih dihadapi daerah, baik yang berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan kondisi perekonomian daerah, proyeksi ekonomi tahun perencanaan, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, serta sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan kondisi dan prospek perekonomian nasional, regional, dan Kabupaten Sigi, serta arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, pengendalian inflasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang akan ditempuh dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, permasalahan daerah,

isu strategis, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 beserta target indikator kinerja yang akan dicapai.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan tema pembangunan daerah Tahun 2027, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, fokus pembangunan, serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, serta indikasi pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2027.

5.1 Rencana Pendanaan

Menguraikan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

5.2 Target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menguraikan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2027.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menyajikan capaian dan evaluasi Indikator Kinerja Utama daerah serta target yang akan dicapai pada Tahun 2027.

6.2 Indikator kinerja daerah (IKD)

Menyajikan capaian dan evaluasi Indikator Kinerja Daerah berdasarkan urusan pemerintahan serta target kinerja yang direncanakan pada Tahun 2027.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027, pedoman pelaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, serta penegasan mengenai pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun perencanaan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah menggambarkan Kondisi Umum Daerah serta Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan serta Realisasi RPJMD dan Berbagai Permasalahan Pembangunan Daerah sebagai landasan dalam upaya Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi"

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Sigi terletak antara 0°51'24.02" (nol derajat lima puluh satu menit dua puluh empat koma nol dua detik.) sampai 2°3'20.24" (dua derajat tiga menit dua puluh koma dua puluh empat detik.) Lintang Selatan dan 119°38'46.7" (seratus sembilan belas derajat tiga puluh delapan menit empat puluh enam koma tujuh detik.) sampai 120°22'12.07" (seratus dua puluh derajat dua puluh dua menit dua belas koma tujuh detik.) Bujur Timur dan memiliki wilayah seluas 5.255,435 Km² (lima ribu dua ratus lima puluh lima koma empat ratus tiga puluh lima kilo meter persegi) atau sekitar 8,50 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Barat : Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.

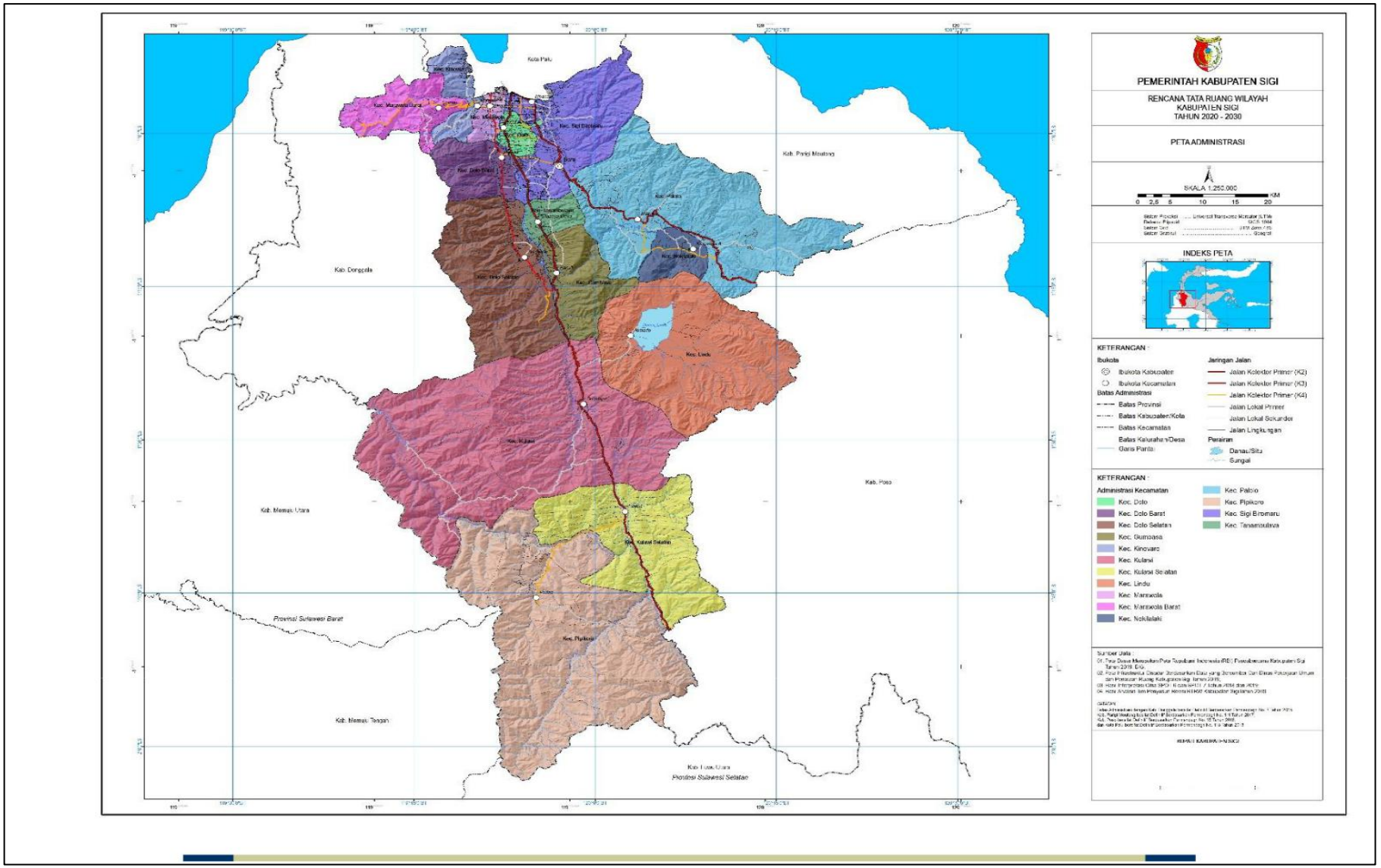
Kabupaten Sigi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan, 176 desa dan 1 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Jarak ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2025

No.	kecamatan	Luas (Ha)	%	Ibukota kecamatan	Jml Desa	Jarak dari ibukota Kab. (Km)
1	Pipikoro	956,13	18,41	Peana	19	123
2	Kulawi Selatan	418,12	8,05	Lawua	12	96
3	Kulawi	1.053,56	20,28	Bolapapu	16	62
4	Lindu	552,03	10,62	Tomado	5	89
5	Nokilalaki	75,19	1,45	Kamarora A	5	35
6	Palolo	581,48	11,19	Makmur	21	25
7	Gumbasa	176,49	3,40	Pakuli	7	32
8	Dolo Selatan	584,71	11,25	Baluase	12	13
9	Dolo Barat	112,18	2,16	Kaleke	12	7
10	Tanambulava	56,33	1,08	Sibalaya utara	5	17
11	Dolo	21,79	0,42	Kotapulu	9	7
12	Sigi Biromaru	175,29	3,37	Mpanau	10	14
13	Sigi Kota	38,65	0,74	Bora	11[1]	0
14	Marawola	150,51	2,90	Binangga	11	18
15	Marawola Barat	70,38	1,35	Dombu	12	33
16	Kinovaro	173,10	3,33	Porame	10	20
		5.225,44	100		177	-

Catatan : [1] Desa termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)
Sumber : Sigi dalam Angka Tahun 2025, diolah Kembali.

Untuk lebih jelasnya mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten Sigi dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sigi

1. Topografi

Secara karakteristik fisik wilayah, Kabupaten Sigi berada di wilayah pegunungan dan Lembah yang memiliki tantangan spasial yang kompleks dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan topografi wilayah kecamatan, dari total 16 kecamatan, Sebagian besar wilayah berada di lereng atau puncak bukit (121 desa), dibandingkan dengan dataran rendah (56 desa). Kecamatan seperti Kulawi, Pipikoro, Marawola Barat, dan Kulawi Selatan memiliki dominasi wilayah lereng/puncak, sedangkan Dolo, Sigi Biromaru, dan Marawola memiliki proporsi dataran yang lebih besar.

Kelas ketinggian, sebaran wilayah berdasarkan ketinggian menunjukkan bahwa hanya 19,06% wilayah berada di bawah 500 meter dpl, sedangkan lebih dari 80% wilayah berada di ketinggian 600–2000 meter dpl. Wilayah ketinggian tertinggi (>2000 m) mencakup 103,05 km² atau 1,97% dari total wilayah, yang umumnya berada di pegunungan seperti pegunungan Nokilalaki dan Kulawi-Pipikoro.

Tabel 2.2 Topografi Wilayah Kabupaten Sigi

Kecamatan	Desa/Kelurahan Lembah	Desa/Kelurahan Lereng/Puncak	Desa/Kelurahan Dataran
Pipikoro	–	19	–
Kulawi Selatan	1	10	1
Kulawi	1	15	–
Lindu	–	1	4
Nokilalaki	–	5	–
Palolo	–	10	11
Gumbasa	–	6	1
Dolo Selatan	–	9	3
Dolo Barat	–	8	4
Tanambulava	–	4	1
Dolo	–	–	9
Sigi Biromaru	–	3	7
Sigi Kota	–	5	6
Marawola	–	3	8
Marawola Barat	–	12	–
Kinovaro	–	10	–
Sigi	2	120	55

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2026 (data diolah kembali)

Berdasarkan topografi wilayah maka secara aspek ekonomi, wilayah datar dan rendah yang terbatas menyebabkan konsentrasi kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa terpusat di daerah seperti Dolo, Sigi Biromaru, dan Sigi Kota. Sebaliknya, wilayah lereng dan tinggi seperti Kulawi dan Pipikoro, memiliki keterbatasan akses pasar, infrastruktur jalan, dan keterjangkauan teknologi, menyebabkan rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat, meskipun memiliki potensi besar di bidang pertanian lahan kering dan kehutanan.

Secara aspek sosial, kondisi geografi menyebabkan kesenjangan layanan dasar antarwilayah. Desa-desa di lereng tinggi mengalami kesulitan akses pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Hal ini juga berdampak pada tingkat partisipasi sekolah, mobilitas sosial, dan kualitas hidup yang relatif lebih rendah.

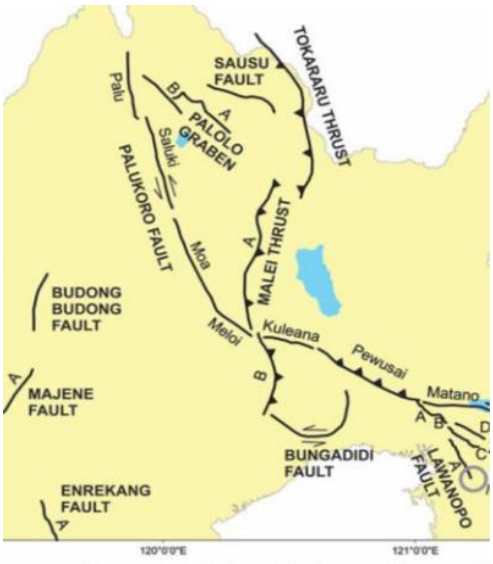
Secara aspek lingkungan, tingginya persentase wilayah dengan lereng curam dan elevasi tinggi membuat Kabupaten Sigi sangat rentan terhadap bencana alam seperti longsor, banjir bandang, dan degradasi tanah. Penggunaan lahan di lereng tanpa teknik konservasi dapat mempercepat kerusakan lingkungan dan sedimentasi sungai.

Secara aspek kelembagaan, keterbatasan kelembagaan dalam pengawasan penggunaan lahan dan konservasi kawasan rawan menyebabkan degradasi wilayah hulu masih terjadi. Pendekatan pembangunan masih berpusat pada wilayah dataran, sehingga wilayah berbasis pegunungan perlu mendapat perhatian proporsional dalam perencanaan Pembangunan.

2. Geologi

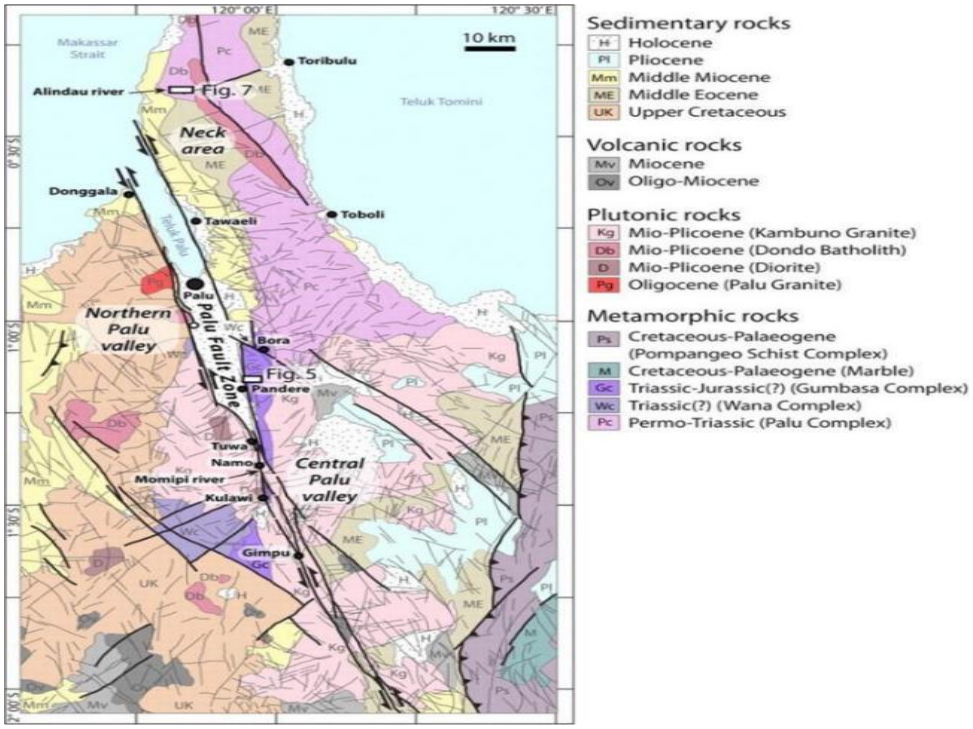
Salah satu sesar yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah sesar Palu-Koro. Karena dimensinya yang besar, maka paling tepat disebut sistem atau zone sesar Palu-Koro. Tetapi seringkali disebut sesar Palu-Koro saja. Lajur sesar ini berarah hampir utara-selatan, memanjang mulai dari sekitar batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone. Panjangnya sekitar 500 km. Di darat, sesar ini mempunyai panjang sekitar 250 km, mulai dari Teluk Palu sampai pantai utara Teluk Bone, mungkin di sekitar Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 2.2
Patahan Aktif di Central Sulawesi



Semula sesar ini dinamakan sesar Fossa Sarassina kemudian dinamakan sesar Palu-Koro. Perubahan nama ini mungkin karena lajur sesar ini memotong Kota Palu (Lembah Palu) dan Sungai Lariang pada segmen Sungai Koro (Lembah Koro). Semua ahli geologi dan geofisika yang mengenal sesar Palu-Koro sepakat bahwa sesar tersebut adalah sesar aktif, berciri sinistral (pergeseran mengiri) dengan kecepatan sekitar 14 – 17 mm/Tahun. Pada segmen Palu - Kulawi, sesar ini berciri sesar normal dan membentuk graben yang menyebabkan Kota Palu sampai Kulawi diapit oleh 2 sesar normal. Sering pula segmen ini disebut "sistem sesar Palu-Koro". Ciri-ciri keberadaan sistem sesar ini adalah banyaknya dijumpai mata air panas di kedua sisi dataran antara Palu - Kulawi.

Gambar 2.3
Peta Sesar Palu-Koro



Tabel 2.3
Kondisi Formasi Geologi Kabupaten Sigi

No.	Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
1	Alluvium	14,621.88	2,80
2	Batuan Gunung Api Talaya	14,528.76	2,78
3	Batuan Terobosan	253,447.30	48,57
4	Danau	3,455.78	0,66
5	Endapan Danau	24,876.12	4,77
6	Formasi Lariang	5,035.53	0,96
7	Formasi Latu Mojong	124,856.72	23,93
8	Formasi Molasa Celebes Sarasin	26,904.88	5,16
9	Kompleks Batuan Metamorfosis	12,797.13	2,45
10	Kompleks Gumbasa	16,053.51	3,08
11	Kompleks Wana	25,240.96	4,84
	Kabupaten Sigi	521.818,57	

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041.

3. Hidrologi

Keberadaan sungai yang ada di Kabupaten Sigi sebagian besar adalah anak-anak sungai dari DAS Palu dan DAS Lariang. Berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Palu-Lariang, Das Palu merupakan DAS prioritas pengembangan daerah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pusat perekonomian, sedangkan DAS Lariang sebagai prioritas Pengendalian daya rusak air dan potensi PLTA. Untuk lebih jelasnya mengenai luas dan sebaran DAS di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sigi

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS (Ha)
1	DAS Palu	307.555,44
2	DAS Lariang	214.263,12

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041.

4. Klimatologi

Suhu udara di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya wilayah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Dengan kondisi wilayah yang berada tepat di garis khatulistiwa, menjadikan wilayah Kabupaten Sigi memiliki suhu udara yang cukup panas. Berdasarkan hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu, sepanjang Tahun 2025, suhu udara rata-rata mencapai 27,76°C. Sedangkan rata-rata kelembaban udara mencapai 75.83 persen, intensitas curah hujan beragam setiap bulannya. Curah hujan rata-rata dalam satu Tahun mencapai 168,25 mm, penyinaran matahari berkisar 196,87 %, Sementara itu, arah angin terbanyak dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar 1,79 knots.

Tabel 2.5 Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara PaluTahun 2025

No	Parameter Iklim	Satuan	Rata-rata Per Tahun
			2025
1	Suhu Udara *Temperature*	°C	27,76
2	Tekanan Udara *Air Pressure*	mb	1.034,48
3	Kelembaban Udara *Humidity*	%	75,83
4	Penyinaran Matahari *Duration ofv Sunshine*	Jam	196,87
5	Jumlah Curah hujan *Number of Precipitation*	mm/ Tahun	168,25
6	Kecepatan Angin *Wind Velocity*	Knots	1,79
6	Jumlah Hari Hujan *Number of Rainy Days*	hari	11,75

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2026 (data diolah kembali)

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

potensi pengembangan wilayah Kabupaten Sigi sangat luas dan mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, Perkebunan, industry, pariwisata dan Infrastruktur. Kabupaten ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil hutan yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan, menjadi salah satu andalan dalam menopang perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata juga cukup menjanjikan dengan adanya keindahan alam, sungai, dan budaya lokal yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan kawasan industri. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Sigi memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang maju di Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Sigi seluas kurang lebih 115.018,66 Ha (seratus Lima belas ribu delapan belas komaenam puluh hektar), meliputi :

- Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan tata ruang wilayah. Di dalam kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 27.537 hektar yang di dalamnya terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 17.393 hektar yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Marawola Barat. Selain itu juga, di dalam kawasan tanaman pangan terdapat juga kawasan hutan adat di Kecamatan Kulawi dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

- **Kawasan Hortikultura**

Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Berdasarkan dominasi komoditasnya, tipe kawasan agribisnis hortikultura dapat dibedakan atas:

1. Kawasan dengan dominasi komoditas hortikultura dengan sedikit atau tanpa tambahan/sisipan komoditas lainnya.
2. Kawasan budidaya hortikultura yang seimbang atau hampir seimbang antara komoditas hortikultura dan komoditas lainnya.
3. Kawasan dengan dominasi komoditas nonhortikultura dengan sedikit atau banyak tambahan/ sisipan komoditas hortikultura di dalamnya.

Kriteria yang menjadi dasar penetapan kawasan budidaya hortikultura adalah:

1. Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen.
2. Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
3. Mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Komoditi Hortikultura yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Sigi adalah Bawang Merah untuk tanaman sayuran. Dalam pengembangan tanaman hortikultura membutuhkan input dan sarana yang digunakan dalam berusaha tani antara lain benih/bibit, pupuk, tenaga kerja dan pestisida.

Rencana kawasan hortikultura yang ditetapkan di Kabupaten Sigi pada dasarnya tersebar dan bercampur dengan kawasan pertanian lahan kering dan perkebunan, namun demikian ditetapkan juga kawasan hortikultura seluas kurang lebih 930 hektar.

- **Kawasan Perkebunan**

Kakao adalah tanaman perkebunan dengan produksi terbanyak di Kabupaten Sigi. Berdasarkan data statistik BPS Pada Tahun 2025 produksi Kakao mencapai 17.523,78 ton dengan wilayah penghasil terbesar berada di Kecamatan Palolo mencapai 8.874,42 ton. Selain kakao, Kabupaten Sigi juga merupakan tanaman penghasil kopi yang jumlahnya cukup banyak yaitu 7.093,99 ton.

Penetapan rencana kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk kawasan perkebunan rakyat dengan beragam jenis-jenis komoditas perkebunan yang terdapat di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 87.879 hektar. Namun demikian, didalam peruntukan kawasan perkebunan terdapat juga kawasan hutan adat seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar di Kecamatan Kulawi.

Tabel 2.6
Data Statistik Perkebunan

NO	KOMODITI	Luas Areal PR/PBS/PBN(Ha)			Jumlah	Produksi (kg)	Produktifitas (kg/Ha)	KK
		TBM	TM	TR/TTM				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4+5*	*7*	*8=7/4*	*9*
1	KELAPA	1.143	4.437	741	**6.321**	3.070.10	692	2.867
2	CENGKEH	269	59	76	**404**	23.875	405	561
3	KAKAO	5.831	20.205	2.443	**28.479**	17.523.78	867	12.470
4	KEMIRI	353	598	138	**1.089**	249.774	418	680
5	KOPI ROBUSTA	1.649	960	930	**3.539**	500.606	521	2.285
6	VANILI	25	30	100	**155**	7.605	254	195
7	PALA	844	8	82	**934**	3.000	375	853
8	JAMBU METE	-	-	5	**5**	-	-	7
9	KOPI ARABIKA	323	183	1	**507**	7.433	41	620
10	AREN	19	15	-	**34**	300	20	45
11	KELAPA SAWIT	100	50	-	**150**	22.500	450	21

Sumber:: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi

2. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu sebagai komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perekebunan, hortikultura atau perikanan) dan memiliki potensi untuk pengembangan peternakan secara terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam).

Ada 7 (tujuh) Kecamatan yg mempunyai potensi lahan produktif yang cukup besar tetapi pemanfaatannya belum maksimal, yaitu:

1. Kecamatan Dolo;
2. Kecamatan Dolo selatan;
3. Kecamatan Dolo barat;
4. Kecamatan Sigi biromaru;
5. Kecamatan Marawola;
6. Kecamatan Tanambulava; dan
7. Kecamatan Gumbasa.

Ketujuh kecamatan di atas ini dapat dikembangkan menjadi kawasan peternakan di Kabupaten Sigi. Secara spesifik, untuk Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru dapat dijadikan kawasan peternakan yang menerapkan sistem budidaya intensif dan integrasi sapi potong, dan untuk Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Tanambulava dapat dijadikan kawasan peternakan yang menerapkan sistem pembibitan sapi potong (PO) dan sapi donggala sistem insentif dan pengembalaan, Sedangkan untuk Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Pipikoro dan Kecamatan Palolo dapat dijadikan kawasan peternakan yang menerapkan sistem pembibitan sapi bali,

Selanjutnya untuk Kecamatan Kinovaro dan sebagian Kecamatan Marawola memiliki potensi untuk pengembangan peternakan kambing potong, dan untuk Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan-Kecamatan di Kulawi Raya berpotensi untuk

dikembangkan sebagai kawasan pembibitan babi, dan untuk sebagian di Kecamatan Palolo (Lembantongoa) berpotensi untuk pengembangan kambing peranakan etawah (PE).

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

- Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
- Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Rencana pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Sigi adalah kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 3.474 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar terdapat di seluruh perairan danau lindu.

Selain perikanan tangkap, terdapat juga perikanan budidaya yang yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

4. Kawasan Industri

Program pembangunan industri di Kabupaten Sigi disusun mengacu pada kondisi existing dan dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain mengacu pada rencana pembangunan tersebut, program pembangunan industri Kabupaten Sigi juga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Untuk mencapai visi pembangunan industri dan mengimplementasikan berbagai misi untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan industri tersebut, maka perlu ditetapkan berbagai strategi yang tepat. Strategi ini disusun untuk mencapai sasaran kualitatif dan kuantitatif yang ditentukan dalam pembangunan industri Kabupaten Sigi. Strategi ini juga yang dilaksanakan melalui berbagai program meliputi program pembangunan sumber daya industri;

Program pembangunan sarana dan prasarana industri; program kerjasama dengan pihak swasta dan antar pemerintah daerah Kabupaten Sigi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat khsususnya Kementerian Perindustrian dalam pengembangan industri; program pengembangan perwilayahan industri; program pemberdayaan IKM; serta program infrastruktur daerah yang menunjang percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten Sigi. Program-program bidang industri tersebut dilakukan melalui Strategi sebagai berikut:

1) Penguatan pasokan bahan baku industri *(supplay chain)* yang berkualitas dan *sustainable* sehingga industri berjalan dengan *continue*;
2) Peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri lokal, khususnya industri prioritas daerah;
3) Penciptaan wirausaha IKM baru memalui program santripreneur;
4) Pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM maupun diluar sentra IKM;
5) Peningkatan infrastruktur strategis daerah yang mendukung majunya industri termasuk aksesibilitas pada sumber bahan baku (raw material) dan logistik;
6) Pengembangan industri andalan pada sentra-sentra IKM berbasis potensi sumber daya alam prioritas masing-masing kecamatan;
7) Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok melalui platform digital dan marketplace (e-smart IKM);
8) Pembangunan industri hijau dengan mengadopsi dan berkolaborasi dengan konsep Sigi Hijau, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs); dan
9) Pemberdayaan, pembiayaan kelembagaan IKM dan penguatan konektivitas struktur industri kecil dan menengah.

Sejalan dengan Pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah, maka pembangunan industri Kabupaten Sigi juga dilakukan secara

holistic, integrative thematic, dan *spatial* sehingga ada konektivitas dan sinergitas dalam perwilayahan yang berlangsung dari hulu ke hilir.

Tabel 2.7 Industri Prioritas Kabupaten Sigi 2020-2040

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2024	2024 - 2029	2029-2034	
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan			
		A Pengolahan Makanan, Minuman berbahan baku Buah-Buahan, UmbiUmbian dan Sayur-Sayuran Khas Sigi.			
		- Pengolahan Makanan dan cemilan/ keripik berbahan baku Buah-Buahan (Buah Naga, pisang, Mangga, Nangka dan Popaya California dll)	- Suplemen dan pangan fungsional berbasis berbahan baku BuahBuahan (Buah Naga, pisang, Mangga, Nangka dan Pepaya California dll)	- Buah-buahan dalam kaleng	Seluruh Kecamatan,
		- Pengolahan Ubi Ungu (Tortila)		- Sayuran organik dalam kemasan dan produk turunan lainnya	(Kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Nokilalaki, Dolo, Dolo Barat, Dolo Selatan, Marawola, Marawola barat, Kinavaro, Gumbasa, Tanambulava, Lindu, Kulawi Kulawi Pipikoro) Selatan,
		- Pengolahan Minum berbahan Baku Buah-Buahan			
		- Pengolahan Rebung bambu			
		- IKM aneka olahan biji kopi khas Sigi			Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi selatan
		B Industri Pengolahan Biji Kopi			
		- Produk bawang goreng dengan berbagai bentuk kemasan	- Diversifikasi Produk bawang goreng	- Produk bawang goreng dengan kemasan dan kualitas tinggi	Kecamatan Sigi Biromaru, kecamatan Dolo
				- Produk bawang goreng organik	
		C Industri Pengolahan Gula			
		- Gula Merah	- Minuman Sirup berbahan baku Gula aren	·	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi
		- Gula semut			
		D Industri berbahan baku Ikan Air Tawar			
		- Industri berbahan baku Ikan air tawar	- Pengolahan ikan air tawar menjadi tepung ikan, nugget ikan, bakso ikan, abon ikan, krupuk ikan dan masih banyak produk yang lainnya.	- Ikan kaleng	Kecamatan Dolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Sigi Biromaru,
		- Olahan Abon Ikan Mujair	- Pangan fungsional berbasis limbah industri hasil ikan air tawar	- berbagai Industri bahan baku Ikan dan produk hasil perikanan darat turunan lainnya	
		- Olahan Ikan Filet.	- Industri pengolahan minyak ikan air tawar dan suplemen ikan		
		- Pengolahan ikan air tawar menjadi tepung ikan, nugget ikan, bakso ikan, abon ikan, krupuk ikan dan masih banyak produk yang lainnya.			
		E Industri Pengolahan Berbahan baku Daging Ternak			
		- Pengolahan daging ternak (ayam potong, sapi, Domba ekor gemuk	- Pengolahan limbah ternak menjadi biogas.	· Pengolahan daging kaleng	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Gumbasa
		- Pengolahan/pen yakan kulit ternak	- Pengolahan Daging hasil peternakan sapi dan domba ekor gemuk		

2	Industri Hulu Agro					
		A	**Industri Pengolahan Kelapa Terpadu**			
			- Air kelapa dalam kemasan	- Santan bubuk dan cair	· Carbon aktif	Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Marawola, Kecamatan Gumbasa
			- Briket arang	- Tepung kelapa		
			- Nata de coco	- Asap cair		
		B	**Industri Pengolahan Minyak Atsiri (Cengkeh)**			
			- Industri penyulingan minyak atsiri	- · Diversifikasi minyak dari daun Cengkeh	· Produk turunan minyak atsiri dari olahan berbahan baku alternative lainnya.	Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi
			- minyak atsiri			
		C	**Industri olahan coklat**			
			- Coklat Pasta	- Bubuk coklat	Coklat untuk konsumsi rumah sakit	Kecamatan Palolo
			- Makanan dan minuman dari coklat	- Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao		
			- Lemak coklat		Produk coklat dengan kualitas tinggi	
			- Diverifikasi produk cokelat			
		D	**Industri Pakan**			
			- Pakan ternak	- Pakan Ternak dalam kemasan	Pakan ternak dalam kemasan	Kecamatan Sigi Boromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Gumbasa
No.	**Industri Prioritas**	**Jenis Industri**				**Wilayah Potensial**
		2019-2024		**2024 - 2029**	**2029-2034**	
3						
		A.	**Industri Furniture dan pengolahan Kayu**			
			- Furniture kayu	- Furniture kayu.	Furniture kayu dan kerajinan lainnya	Kecmatan Kulawi, Kecamatan Palolo, Kecamatan Nokilalaki
			- Industri penggergajian kayu	- Industri penggergajian kayu		
		B	**Industri Kerajinan Rotan dan Bambu**			
			- Kerajinan furniture bebahan baku	- Kerajinan dan Meubel Rotan atau bambu	Kerajinan berbahan baku limbah industri pengolahan Rotan dan bambu	Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki
			- Rotan dan	- Kerajinan anyaman Rotan dan bambu yang memiliki nilai tinggi	Kerajinan Rotan dan bambu yang memiliki nilai tinggi	
			- Bambu			
		C	**Industri Pengolahan Batako**			
			- Industri Pembuatan Batako	- Industri Batako berkulitas tinggi	Industri Batako berkulitas tinggi	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo
			- Industri pembuatan pot dan kerajinan lainnya	- Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat (Gerabah)	Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat	

Sumber : RTRW Kabupaten Sigi

Berdasarkan penjabaran diatas, maka ditetapkan kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Sigi berupa kawasan sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 253 Ha. (dua ratus lima puluh tiga hektar) terdapat di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Sigi Kota, Dan Kecamatan Tanambulava.

5. Kawasan Pariwisata

Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan Pariwisata mengikuti Konsep pengembangan 3A (*Access*, *Accommodation*, *Attraction*). Konsep 3A mengungkapkan pentingnya mengembangkan Objek Wisata dengan mendukung faktor-faktor wisatawan yang datang ke Objek Wisata seperti Aksesibilitas ke Objek wisata, Akomodasi untuk para wisatawan, dan penjagaan nilai-nilai Atraksi dari sebuah Objek Wisata.

Kriteria Penetapan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

- kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat:
    1. meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
    2. mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
    3. tidak mengganggu fungsi lindung;
    4. tidak mengganggu upaya kelestarian sumberdaya alam;
    5. meningkatkan pendapatan masyarakat;
    6. meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
    7. meningkatkan kesempatan kerja;
    8. melestarikan budaya lokal;
    9. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep 3A di atas, dan berdasarkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sigi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka rencana pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi dilakukan melalui:

1. Pengembangan paket wisata alam yang memanfaatkan keindahan dan keunikan alam pada kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Taman Wisata Alam Wera, dan Taman Hutan Raya Ngatabaru.
2. Perintisan dan pengembangan Desa Wisata menjadi Desa Wisata yang maju dan mandiri berbasis keunikan alam, keunikan budaya, dan keunikan aktifitas ekonomi kreatif yaitu: Desa Sibedi, Desa Balane, Desa Toro, Desa Mataue, Desa Lawua, Desa Kalukutinggu, Desa Karunia, Desa Kaleke, Desa Tomado, Desa Wayu, Desa Bora dan beberapa Desa Lainnya.
3. Pengembangan keunikan wisata budaya di Kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan dan Lindu (Atraksi).
4. Pengembangan Kawasan-kawasan Wisata alam lainnya sesuai potensi yang ada sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
5. Pengembangan infrastruktur jalan ke destinasi wisata yang saat ini sebagian besar masih dalam kondisi yang kurang bagus dan pembangunan infrastruktur pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lainnya.

Selain itu juga direncanakan *Botanical Garden Agroecoedutourism* sebagai kawasan pariwisata seluas 78 Ha. (tujuh puluh delapan hektar) di Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 660-174 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kebun Raya Kabupaten Sigi.

6. Kawasan Permukiman

a. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana pengembangan sistem perkotaan bertujuan untuk mengetahui dan

menggambarkan fungsi serta peran yang dimiliki setip masing-masing kawasan dan pengembangan sistem perkotaan dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan, adapun permukiman perkotaan Kabupaten Sigi terdiri dari wilayah yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan.

b. Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Adapun kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Sigi yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lokal yaitu pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang ditetapkan di Kabupaten Sigi terbagi menjadi kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi dan kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa penampalan diatas pola ruang meliputi rawan bencana likuifaksi tinggi, gerakan tanah, rawan bencana banjir, dan sempadan patahan aktif (*active fault*).

1. **Kawasan Rawan Bencana Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Lindung**

   Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sigi berupa kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi atau yang ditetapkan dalam ZRB 4 dengan kriteria zona likuifaksi masif pasca gempa (4L).

   Bencana likuifaksi ini merupakan pertama kalinya terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7.4 Skala Richter yang mengguncang Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong pada 28 September 2018.

Penetapan kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi ditetapkan seluas kurang lebih 250 hektar mencakup wilayah terdampak likuifaksi di Kabupaten Sigi yaitu Desa Sidondo I, Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru, dan Desa Sibalaya Kecamatan Tanambulava.

2. **Kawasan Rawan Bencana Yang Tidak Ditetapkan Sebagai Kawasan Lindung berupa Penampalan**

   a. Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan dalam peta pola ruang diatas peruntukkan dasar. Peta hasil penampalan *(overlay)* sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

   b. Rawan bencana likuifaksi tinggi di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Marawola, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Sigi Kota dan Kecamatan Tanambulava;

   c. Rawan gerakan tanah tinggi di Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Sigi Kota dan Kecamatan Tanambulava;

   d. Rawan bencana banjir tinggi di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, dan Kecamatan Tanambulava; dan

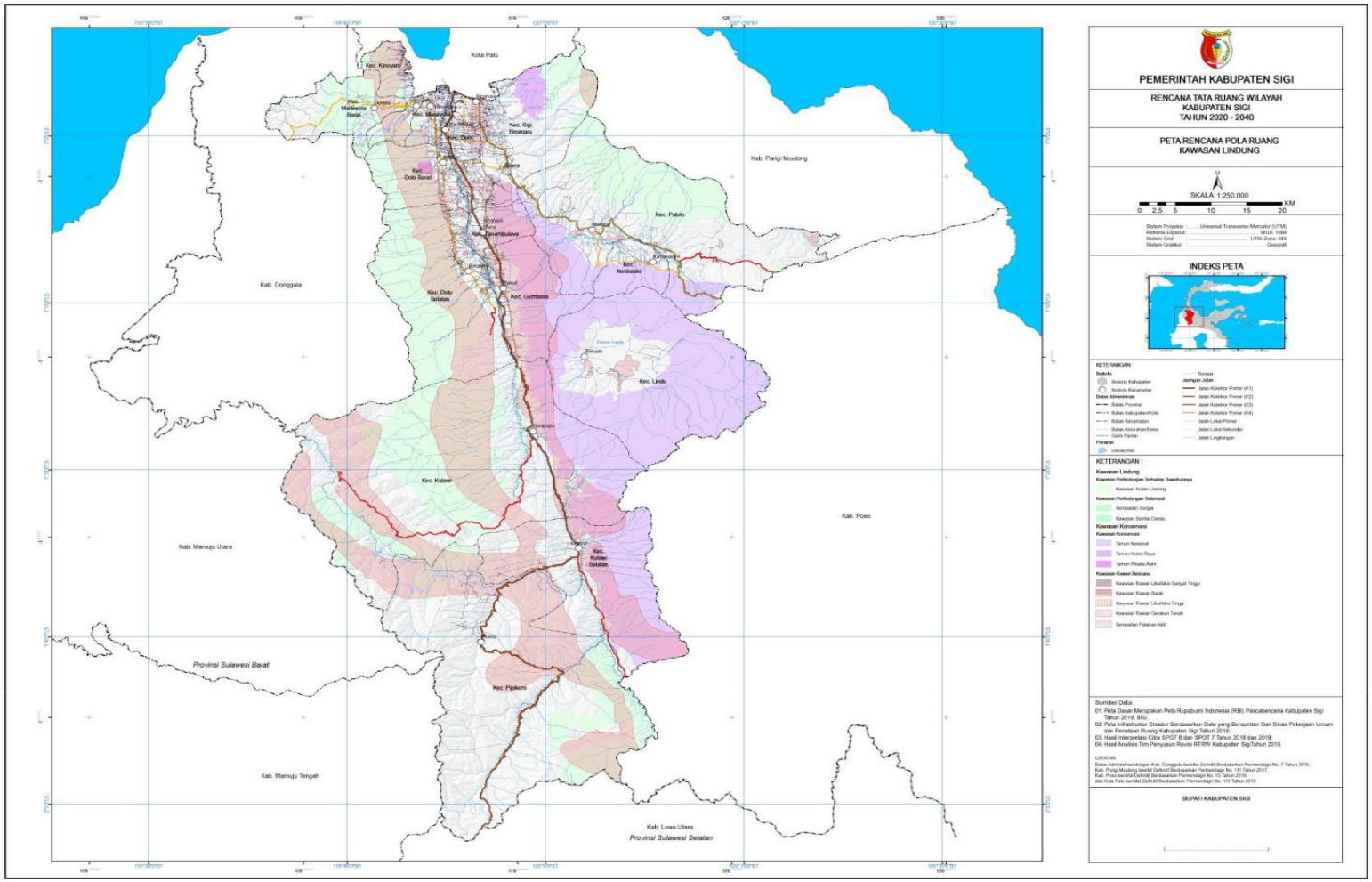
   e. Kawasan sempadan sesar aktif di Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Gumbasa.

Untuk Upaya antisipasi / mitigasi bencana alam ada beberapa system peringatan dini yang terpasang di berada kecamatan yang ada di kabupaten Sigi, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Banyaknya Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam, 2025

Kecamatan *District*	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam *Natural Disaster Early Warning System*	Sistem Peringatan Dini Tsunami *Tsunami Early Warning System*	Perlengkapan Keselamatan *Safety Equipment*	Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi *Signs and Evacuation Route*	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll *Construction, Maintenance, or Normalization: Rivers, Canals, Embankment, etc*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 PIPIKORO	-	-	-	1	3
020 KULAWI SELATAN	3	-	3	5	5
030 KULAWI	7	-	6	14	8
040 LINDU	4	-	5	5	3
050 NOKILALAKI	1	-	-	-	2
060 PALOLO	-	-	-	1	6
070 GUMBASA	4	-	4	7	6
080 DOLO SELATAN	11	-	8	12	10
090 DOLO BARAT	11	-	8	12	11
100 TANAMBULAVA	2	-	2	5	-
110 DOLO	1	-	1	4	6
120 SIGI BIROMARU	5	-	2	8	4
121 SIGI KOTA	2	-	2	3	7
130 MARAWOLA	-	-	-	3	8
140 MARAWOLA BARAT	-	-	-	1	2
150 KINOVARO	-	-	-	1	3
Total	**51**	**-**	**41**	**82**	**84**

Sumber : *BPS Kabupaten Sigi*



Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Sigi

2.1.4 Aspek Demografi

Beberapa aspek penting dalam permasalahan kependudukan meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, misalnya menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dalam jumlah yang memadai. Selain itu, penduduk laki-laki dan Perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda, demikian pula dengan penduduk usia muda dan usia lanjut. Perbedaan kebutuhan ini menuntut adanya perencanaan yang mempertimbangkan keragaman karakteristik penduduk, agar pembangunan dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Dengan memoerhatikan dan mengelola faktor-faktor ini, kebijakan pembangunan yang dirumuskan dapat lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Data selengkapnya mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Sigi disajikan pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2025

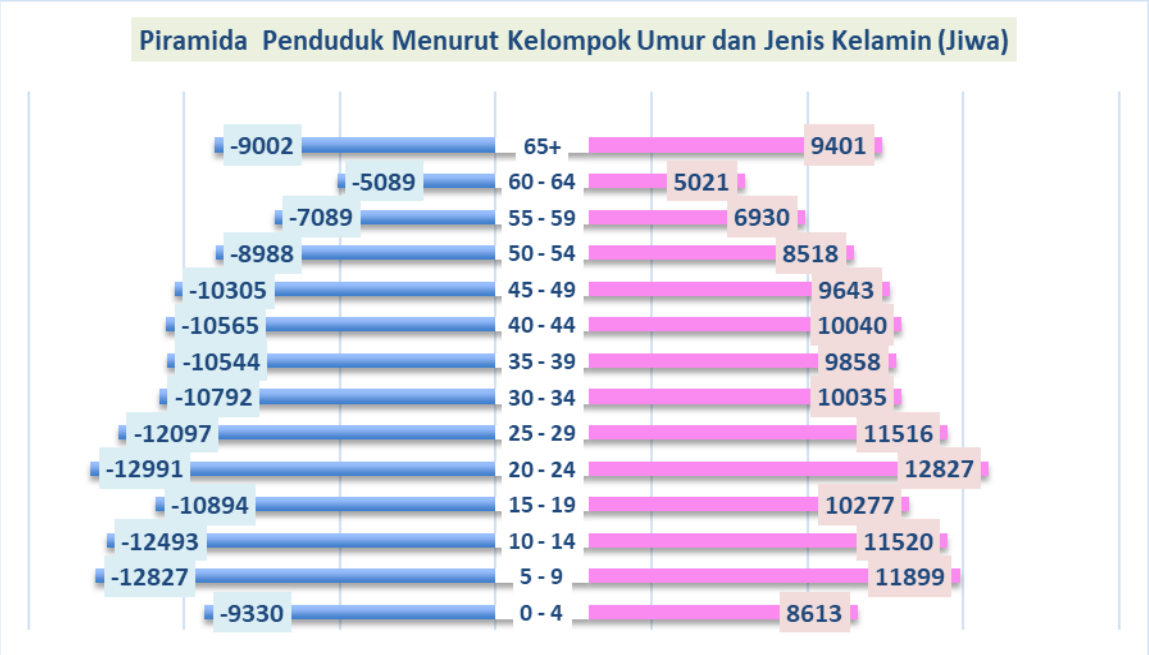
No.	Kecamatan	Luas Wilayah 2025	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	**Pipikoro**	956,13	9,60	2,19	3,45	10	110
2	**Kulawi Selatan**	418,12	10,20	1,15	3,66	24	110
3	**Kulawi**	1.053,56	16,70	1,59	5,97	16	107
4	**Lindu**	552,03	6,50	3,92	2,32	12	105
5	**Nokilalaki**	75,19	6,20	1,25	2,24	83	105
6	**Palolo**	581,48	30,80	1,58	11,03	53	109
7	**Gumbasa**	176,49	13,40	0,74	4,8	76	105
8	**Dolo Selatan**	584,71	18,40	1,31	6,61	32	108
9	**Dolo Barat**	112,18	15,90	1,22	5,69	142	102
10	**Tanambulava**	56,33	10,20	1,86	3,64	180	103
11	**Dolo**	21,79	24,80	1,66	8,9	1	104
12	**Sigi Biromaru**	175,29	48,80	3,2	17,48	278	102
13	**Sigi Kota**	38,65	18,50	1,89	6,62	478	105
14	**Marawola**	150,51	31,60	3,25	11,31	210	101
15	**Marawola Barat**	70,38	5,70	1,66	2,04	81	116
16	**Kinovaro**	173,10	11,90	1,73	4,25	69	106
Kabupaten Sigi		**5.225,44**	279,10	2,06	100	54	105

Sumber : *Sigi dalam Angka Tahun 2026, data Penduduk Semester II tahun 2025*

Tabel 2.10 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2022-2024

Kelompok Umur	2023			2024			2025		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
0 – 4	11,91	11,36	23,27	8.544	7.931	16.475	9.330	8.613	17.943
5 – 9	11,78	11,22	23,00	12.387	11.502	23.889	12.827	11.899	24.726
10 – 14	11,95	11,16	23,11	12.541	11.354	23.895	12.493	11.520	24.013
15 – 19	11,71	10,92	22,63	10.117	9.766	19.883	10.894	10.277	21.171
20 – 24	10,97	10,47	21,44	12.613	12.681	25.294	12.991	12.827	25.818
25 – 29	10,73	10,43	21,16	11.481	10.800	22.281	12.097	11.516	23.613
30 – 34	10,73	10,29	21,02	10.594	9.956	20.550	10.792	10.035	20.827
35 – 39	10,48	9,87	20,35	10.345	9.716	20.061	10.544	9.858	20.402
40 – 44	9,99	9,35	19,34	10.845	10.198	21.043	10.565	10.040	20.605
45 – 49	9,22	8,69	17,91	9.978	9.443	19.421	10.305	9.643	19.948
50 – 54	7,97	7,48	15,45	8.774	8.248	17.022	8.988	8.518	17.506
55 – 59	6,34	6,18	12,52	6.816	6.680	13.496	7.089	6.930	14.019
60 – 64	4,93	4,75	9,68	4.920	4.866	9.786	5.089	5.021	10.110
65 - 69	3,54	3,49	7,03	3.493	3.506	6.999	9.002	9.401	18.403
70 - 74	2,26	2,31	4,57	2.343	2.314	4.657			0
75 +	2,02	2,18	4,20	2.614	2.823	5.437			0
Kabupaten Sigi	136,510	130,140	266,66	138.405	131.784	270.189	143.006	136.098	279.104

Sumber : Sigi dalam Angka Tahun 2025, diolah kembali



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus strategis yang mencakup berbagai sektor esensial, antara lain pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial. Melalui perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang tepat, terarah, dan berkesinambungan, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat terus ditingkatkan secara optimal, guna mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

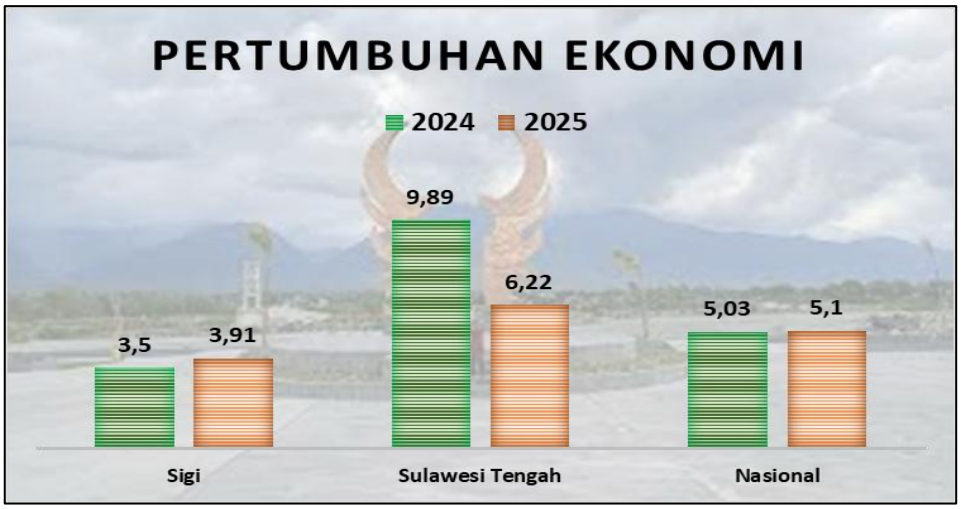
Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, TPT, TPAK, angka kemiskinan dan rasio penduduk miskin

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi Kabupaten Sigi menunjukan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,50% atau mengalami kenaikan sebesar 0,13% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,37%. Pertumbuhan Ekonomi masih lebih rendah jika dibandingakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9,89%. dan masih berada dibawah Pertumbuhan Ekonomi secara nasional sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022- 2024 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

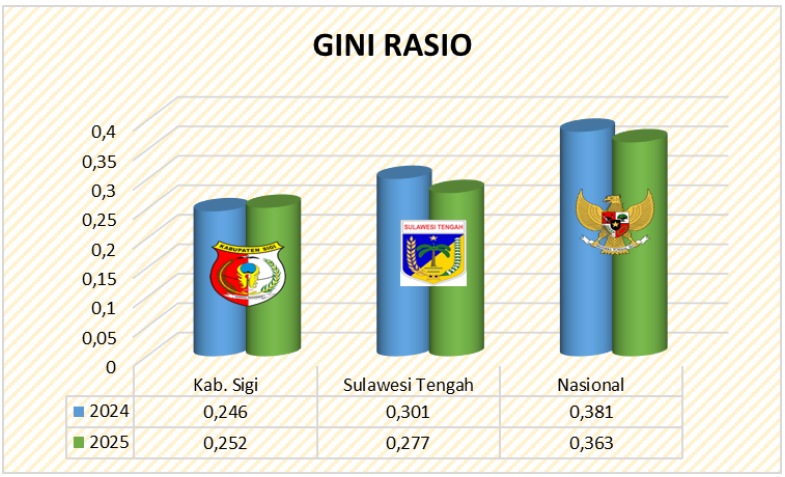


Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 - 2025

b. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Indeks Gini (Gini Ratio) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi.

Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Sigi setiap tahunnya cenderung fluktuatif, yaitu pada tahun 2024 sebesar 0,281 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,246. Ini berarti bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan Kabupaten Sigi tergolong sedang. Data ketimpangan pendapatan disajikan pada Grafik 2.4.



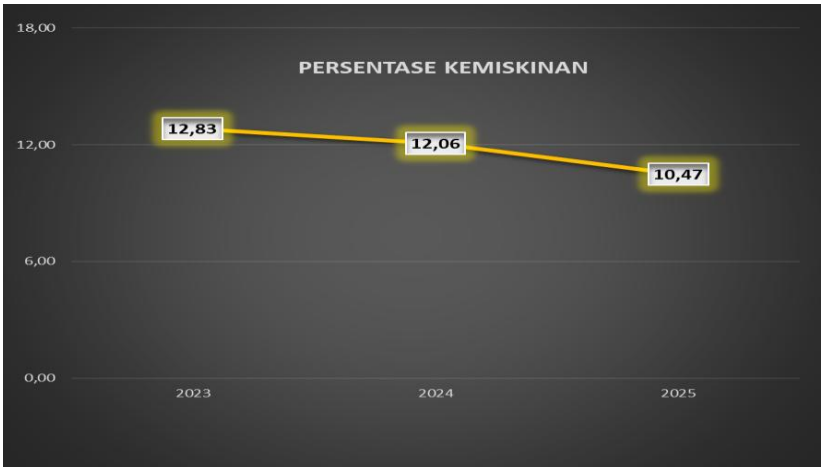
Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2024 - 2025

c. Kemiskinan

Capaian angka kemiskinan Kabupaten Sigi pada tahun 2024 sebesar 12,06% menurun 0,77 dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu 12,83%. Capaian penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sigi masih berada di atas Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 11,77%. Jika dibandingankan dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi memiliki persentase penduduk miskin nomor 5 (lima) terendah setelah Kabupaten Morowali Utara yaitu dengan persentase penduduk miskin 11,95%. selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11 Kemiskinan Periode 2023–2025 Kabupaten Sigi

PENDUDUK MISKIN (000 JIWA)		
2023	2024	2025
31,47	29,80	26,03
PERSENTASE MISKIN (%)		
2023	2024	2025
12,83	12,06	10,47
GARIS KEMISKINAN (RP/Kapita/bulan)		
2023	2024	2025
445,106	463.011	474,669
INDEKS KEDALAMAN (P1)		
2023	2024	2025
2,40	2,52	1,77
INDEKS KEPARAHAN (P2)		
2023	2024	2025
0,62	0,70	0,44



Gambar 2.5 Persentase Kemiskinan Tahun 2023 - 2025

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja adalah jumlah atau persentase penduduk usia kerja yang menjadi bagian angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang memiliki prioritas utama dalam kegiatan sehari-harinya adalah bekerja atau mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk angkatan kerja terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau sering disebut dengan pengangguran terbuka. Pemerintah Kabupaten Sigi selalu berupaya dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, berbagai macam cara seperti menyediakan lapangan pekerjaan maupun melatih keahlian agar setiap penduduknya dapat berusaha sendiri terus dilakukan. Pengangguran dapat merupakan ancaman bagi suatu daerah, semakin besar angka pengangguran membuat angka pendapatan perkapita suatu daerah semakin kecil.

Capaian TPAK Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebesar 76,03% mengalami peningkatanan 0,11% dari tahun 2025 sebesar 75,92%. Capaian Kabupaten Sigi pada tahun 2025 berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 73,74% tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Tingkat pengangguran Kabupaten Sigi
Tahun 2023-2025

NO	URAIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk	266.660	270.189	279,104
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,94	75,92	76,03
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,60	2,55	2,30
4	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	97,40	97,45	97,45

Sumber : BPS Tahun 2026

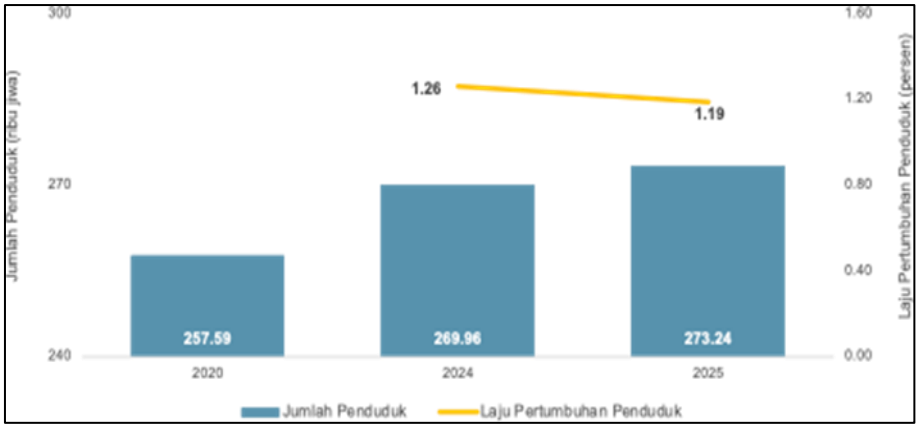
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2023 hingga 2025, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sigi meningkat sebesar 0,52 poin. Pada tahun 2023, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sigi tercatat sebesar 71,11 tahun, dan di tahun 2025 mencapai 71,63 tahun.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu kelahiran, mortalitas, dan migrasi. Dari ketiga komponen tersebut, satu-satunya komponen yang seharusnya dapat ditekan adalah jumlah kelahiran karena kelahiran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menurunkan angka kelahiran, diantaranya program Keluarga Berencana (KB).

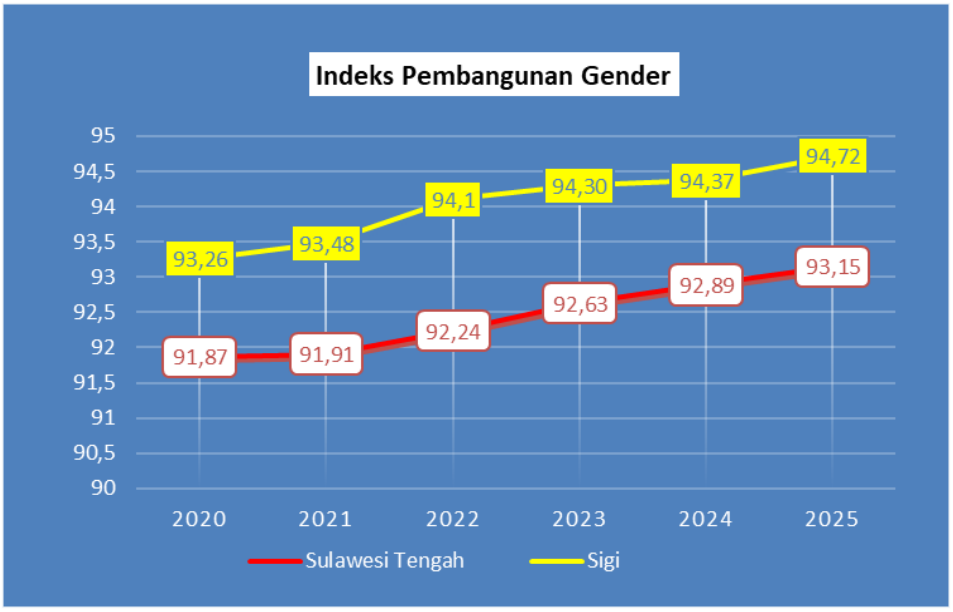


Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk, Tahun 2023 - 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sigi saat ini masih belum ideal, mengingat angka pertumbuhannya masih berada di atas 1%. Menurut BBC, laju pertumbuhan penduduk diharapkan tidak terlalu tinggi karena laju pertumbuhan yang tinggi berdampak pada keperluan yang semakin banyak juga. Namun, tetap harus bernilai positif agar dapat menjaga keberlangsungan kkehidupan di daerah tersebut.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG dapat mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah melalui berbagai indikator penunjang di dalamnya, seperti angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, serta perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sigi

Berdasarkan data BPS, selama lima tahun terakhir capaian IPG Kabupaten Sigi menunjukkan fluktuasi dan berada di atas angka IPG Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2025, IPG Kabupaten Sigi tercatat sebesar 94,72 berada 1,57 poin diatas IPG Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 93,15. Meskipun demikian, Kabupaten Sigi mencatat tren peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam mempersempit kesenjangan gender, khususnya aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

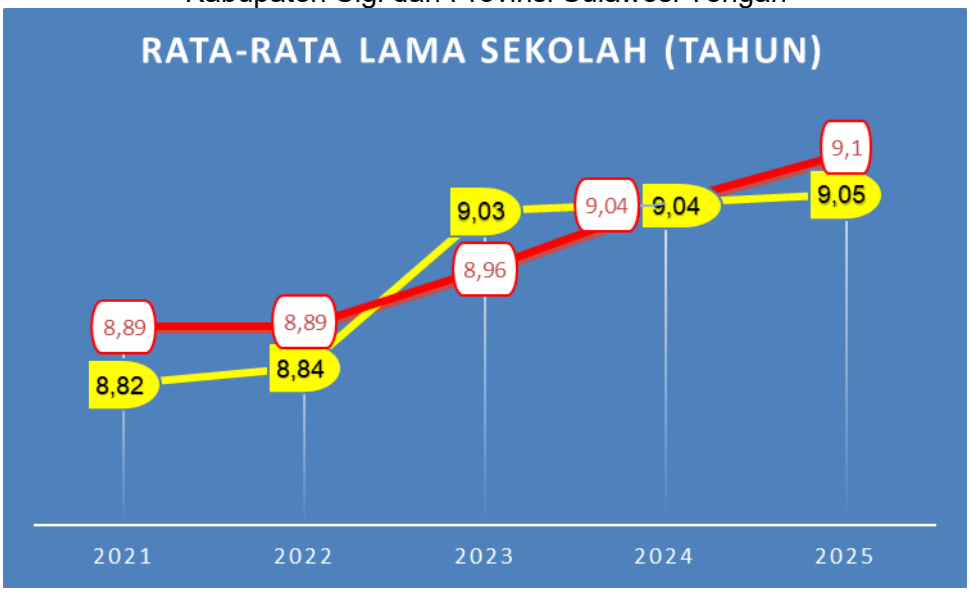
4. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pembangunan Pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sigi telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis.

Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) merupakan salah satu sub komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa,

tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Sigi. Pada indikator ini terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sigi pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sigi tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 9,05 tahun menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini rata-rata telah menyelesaikan jenjang pendidikan hingga lulus SMP.

Gambar 2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025
Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah

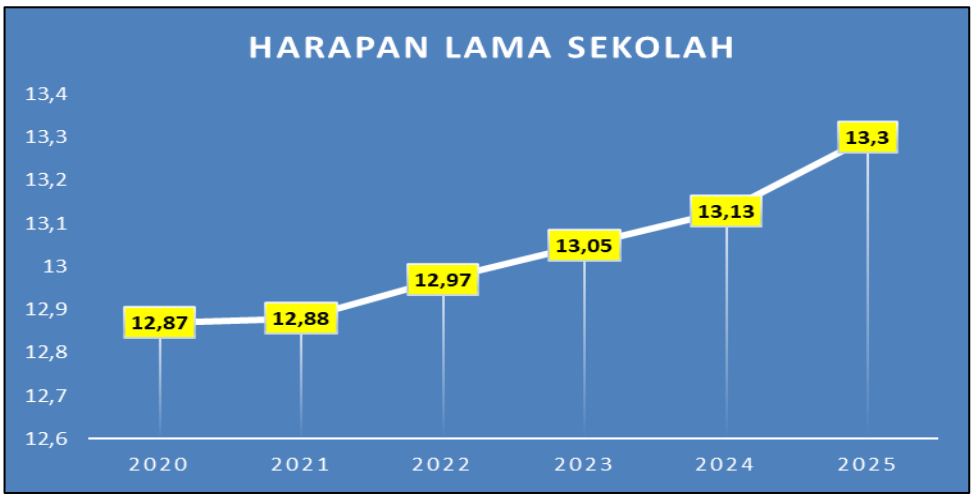


Sumber : BPS 2025, diolah Kembali

5. Angka Harapan Lama Sekolah

Pada tingkat makro ukuran mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Secara minimal penduduk harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara wajar, sehingga dapat dikatakan kemampuan baca tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk hidup sejahtera. Dengan demikian komponen yang termasuk dalam bidang pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menjelaskan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia di atas 25 tahun dalam menempuh pendidikan formal. Selanjutnya

komponen kedua dalam bidang pendidikan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjelaskan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan penduduk pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS menjelaskan mengenai adanya peluang bagi anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas untuk merasakan seluruh jenis pendidikan dengan kurun waktu tertentu. Selain itu, angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

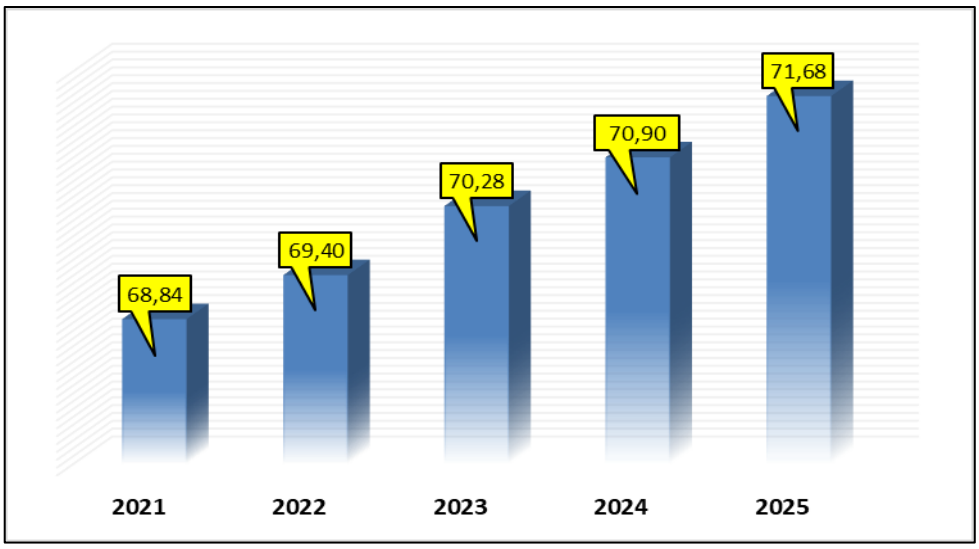


Gambar 2.9 Harapan Lama SekolahTahun 2020-2025 Kabupaten Sigi
Sumber : BPS Kabupaten Sigi

6. Angka Harapan Hidup

Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa melalui indikator umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir mengacu pada rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang yang baru lahir di suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran umum tentang tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan juga merupakan salah satu komponen penting karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat dalam hal kesehatan dan umur panjang. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan. Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sigi dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi

UHH penduduk Kabupaten Sigi di tahun 2025 mencapai 71,68 tahun, artinya anak yang lahir pada tahun 2025 diharapkan untuk dapat hidup hingga berumur 71,68 tahun. Indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,78 tahun dibandingkan tahun 2024.

7. Prevelensi Balita Gizi Buruk

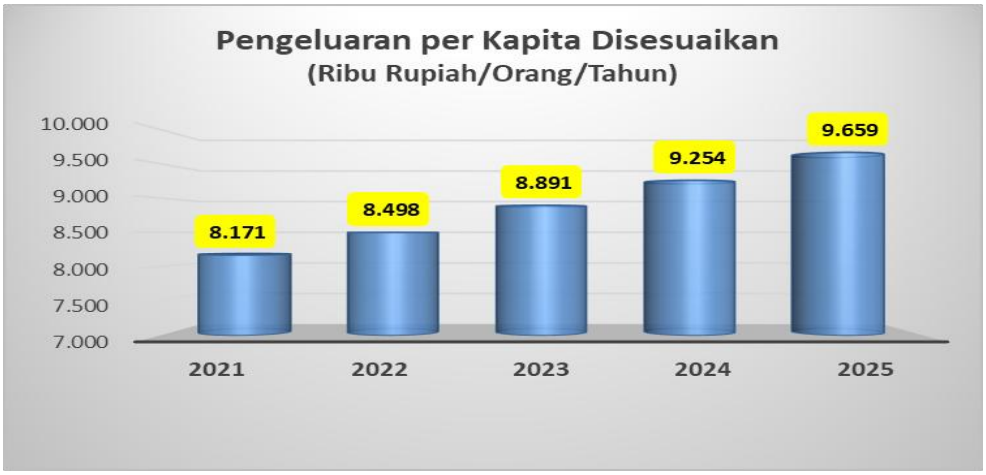
Pada tahun 2025 prevalensi gizi buruk di Kabupaten Sigi sebesar 0,4%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2023-2025 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun.

8. Daya beli/Pengeluaran Perkapita penduduk

Pengeluaran konsumsi merupakan variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pengeluaran konsumsi perkapita adalah Indikator yang mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,perumahan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap barang serta layanan lainnya. Indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan ini tidak sekadar menghitung rata-rata pengeluaran

masyarakat di suatu wilayah, tetapi juga menyesuaikannya dengan daya beli serta faktor inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang standar hidup di wilayah tersebut.

Dalam perkembangannya Tahun 2024 pengeluaran perkapita penduduk Sigi mencapai Rp. 9.254.000 (Sembilan juta Dua Ratus Lima puluh EMpat ribu rupiah) meningkat 4,19 persen dibandingkan pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp.9.659.000 (Sembilan juta Enam ratus Lima Puluh Sembilan ribu rupiah). Capaian indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, secara rinci sebagai berikut:



Gambar 2.11 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sigi

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Seni Budaya

Jumlah Grup Seni per 10.000 penduduk yang ada di Kabupaten Sigi mengalami kenaikan hingga 2024. Hal ini disebabkan adanya motivasi bagi para anak muda untuk lebih kreatif dalam membuat karya seni karena terinspirasi dari beberapa grup seni tersebut mampu untuk berprestasi sampai tingkat Nasional. Adapun grup seni tersebut terdiri atas seni tari, seni musik, seni rupa dan seni teater.

Kabupaten Sigi memiliki beragam warisan seni, adat, tradisi dan budaya yang mencerminkan identitas, kekayaan, dan keunikan masyarakat Kabupaten Sigi. Salah satu warisan yang sangat kaya dan didominasi oleh kebudayaan suku asli seperti Suku Kaili dan Suku Kulawi (Kaili Indo/Etnik Kulawi), warisan budaya tak benda dalam bentuk kesenian tradisional berupa

musik, tarian, sastra lisan, hingga festival seni budaya yang tumbuh subur di wilayah ini. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen mengembangkan seni dan budaya, salah satunya melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana seni dan budaya.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sigi Tahun 2022-2025

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sigi Berdasarkan Kecamatan	Unit	0	0	11	25
2	Jumlah Cagar Budaya yang Dipelihara	Unit	268	268	327	338
3	Jumlah Kesenian Tradisional di Kabupaten Sigi	Kesenian	12	15	18	24
4	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	Kesenian	7	10	14	21
5	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Berdasarkan Kecamatan	Objek	139	139	139	139
6	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dibina	Objek	75	86	95	113
7	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi	Karya	4	6	9	12
8	Jumlah Karya Budaya Yang Inventarisasi	Karya	6	9	14	18

2. Olahraga

Indikator Kepemudaaan dan olahraga dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Semakin baik perkembangan dalam bidang kepemudaan dan olahraga, serta semakin membutuhkan pengelolaan yang baik. Selain klub olahraga, fokus olahraga juga dapat difokuskan pada indikator ketersediaan gedung olahraga di mana gedung olahraga adalah suatu sarana pendukung kegiatan olahraga warga Kabupaten Sigi. Perkembangan terhadap fokus olahraga di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 2.22 di bawah ini :

Tabel 2.14 Realisasi Indikator Fokus Olahraga Kabupaten Sigi

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Atlet Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	Orang	0	20	114	17	5
2	Jumlah Wirausaha Muda Mandiri	Orang	-	-	-	-	25
3	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif	Organisasi	-	-	-	-	147
4	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	Cabang	0	0	281	284	285
5	Jumlah Seluruh Cabang Olahraga Yang ada/terdaftar	Cabang	20	20	20	29	29
6	Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	0	0	0	1	1
7	Jumlah Seluruh Atlit Pelajar	Orang	0	28	11	25	10
8	Jumlah wasit yang bersertifikat	Orang	0	1	3	6	0
9	Jumlah atlet Kabupaten Sigi yang memenangi Kejuaraan Nasional	Orang	0	1	3	6	0
10	Jumlah Atlet Yang Memenangi Kejuaraan Internasional	Orang	0	0	4	2	0
11	Jumlah Prestasi Olahraga yang dimenangkan	Orang	0	20	114	17	5

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sigi

2.2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan indikator variabel aspek pelayanan umum dilihat berdasarkan fokus urusan wajib dan urusan pilihan yaitu:

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pemenuhan atas hak pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi salah satu indikator keadilan dalam keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga sebuah investasi sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan pembangunan daerah. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) akan memperoleh keahlian dalam pembangunan SDM, baik berupa akses, pemerataan maupun peningkatan mutu pendidikan

Pemenuhan pendidikan berdasarkan di Kabupaten Sigi dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menjadi salah satu indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap kelompok pendidikan berdasarkan usia standar pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK merupakan harapan penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikan. APK juga digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang dapat dilihat melalui partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi nilai APK suatu daerah dapat diartikan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang mengemban pendidikan tertentu (Kemendikbud, 2022). Nilai APK dan APM Kabupaten Sigi dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sigi Tahun 2023-2025

Angka Partisipasi Murni (APM)			
	2023	2024	2025
SD/MI	94,09	95,28	92,70
SMP/MTs	73,7	77,09	76,24
SMA/SMK/MA	53,84	60,03	64,41
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	2022	2024	2025
SD/MI	101,15	100,67	106,96
SMP/MTs	93,78	84,87	89,42
SMA/SMK/MA	81,77	82,51	92,87

Sumber : BPS Kab. Sigi, Tahun

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan, oleh karenanya Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun sebagai program prioritas nasional dan juga telah tertuang pada RPJMN tahun 2025-2029. Program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang memperluas masa wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, yang meliputi satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah. Program Wajib Belajar 13 Tahun memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak usia dini (PAUD) atau TK. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia dengan memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dari usia dini.

Urgensi kebijakan ini didasari oleh pentingnya pendidikan prasekolah dan menengah dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia. Fase usia 0-6 tahun merupakan fase periode emas atau golden age. Pada fase periode emas terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat dan menentukan perkembangan kognitif, sosial, emosional, serta keterampilan hidup di masa depan. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi memiliki potensi anak (5-6 tahun) tidak tertampung pada tahun 2026 sebanyak 8.148. Kondisi ini berdampak pada kesiapan anak dalam memasuki jenjang sekolah dasar, serta berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di jenjang berikutnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi percepatan yang telah dirumuskan pemerintah antara lain pengembangan PAUD-SD satu atap,

pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), penegerian PAUD, penyediaan layanan PAUD keliling, serta perluasan program afirmasi seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pemerintah mendorong inovasi pembelajaran melalui digitalisasi sekolah, penguatan kurikulum, serta peningkatan kompetensi guru.

Bagi Kabupaten Sigi, implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun memerlukan integrasi data APS, APM, dan APK sebagai dasar pemetaan kebutuhan layanan pendidikan. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan akses PAUD, pemerataan pendidikan menengah, penjaminan mutu pembelajaran, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung perluasan akses dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat tumbuh sebagai sumber daya manusia yang cerdas, produktif, dan kompetitif.

Tabel 2.16 Data Sekolah Dasar di Kabupaten Sigi TA. 2025/2026

Kecamatan	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah Sekolah SD (Negeri+ Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri)	Jumlah Guru SD (Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri+ Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri)	Jumlah Murid SD (Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri+ Swasta)
Pipikoro	4	17	21	40	63	103	216	706	922
Kulawi Selatan	9	3	12	82	4	86	873	107	980
Kulawi	19	6	25	163	22	185	1158	184	1342
Lindu	10	2	12	93	9	102	545	56	601
Nokilalaki	6	1	7	53	11	74	451	313	764
Palolo	26	2	28	266	9	286	2750	119	2869
Gumbasa	10	1	11	100	5	110	1137	37	1174
Dolo Selatan	15	1	16	144	9	160	1524	61	1585
Dolo Barat	18	1	19	225	6	238	1546	75	1621
Tanambulava	8	1	9	78	4	87	831	53	884
Dolo	16	2	18	183	15	211	2028	155	2183
Sigi Biromaru	34	7	41	392	59	508	4821	777	5598
Sigi Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marawola	16	4	20	190	77	346	2458	905	3363
Marawola Bara	8	9	17	86	47	189	310	504	814
Kinovaro	12	2	14	120	18	154	1164	84	1248
Sigi	**211**	**59**	**270**	**2215**	**358**	**2839**	**21812**	**4136**	**25948**

Tabel 2.17 Data Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sigi TA. 2025/2026

Kecamatan	Jumlah Sekolah SMP (Negeri)	Jumlah Sekolah SMP (Swasta)	Jumlah Sekolah SMP (Negeri+ Swasta)	Jumlah Guru SMP (Negeri)	Jumlah Guru SMP (Swasta)	Jumlah Guru SMP (Negeri+ Swasta)	Jumlah Murid SMP (Negeri)	Jumlah Murid SMP (Swasta)	Jumlah Murid SMP (Negeri+ Swasta)
Pipikoro	2	1	3	21	5	26	79	47	126
Kulawi Selatan	3	-	3	53	-	53	628	-	628
Kulawi	7	-	7	103	-	103	599	-	599
Lindu	2	-	2	23	-	23	157	-	157
Nokilalaki	2	1	3	27	3	30	264	6	270
Palolo	7	-	7	118	-	118	1170	-	1170
Gumbasa	2	1	3	32	6	38	167	113	280
Dolo Selatan	4	-	4	65	-	65	505	-	505
Dolo Barat	4	1	5	78	9	87	557	75	632
Tanambulava	2	-	2	41	-	41	316	-	316
Dolo	1	2	3	36	10	46	473	137	610
Sigi Biromaru	9	3	12	164	14	178	1359	190	1549
Sigi Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marawola	3	1	4	73	7	80	729	55	784
Marawola Barat	5	1	6	56	4	60	195	58	253
Kinovaro	4	-	4	62	-	62	394	-	394
Sigi	**57**	**11**	**68**	**952**	**58**	**1010**	**7592**	**681**	**8273**

Sumber : BPS Kab. Sigi, Tahun 2026

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek derajat kesehatan masyarakat. Tingginya derajat kesehatan suatu masyarakat mencerminkan kualitas hidup yang baik, sekaligus menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas penduduk yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kesehatan dianggap sebagai indikator kunci dalam pembangunan manusia dan wilayah. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi prioritas bagi pemerintah melalui penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, konsumsi makanan bergizi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan yang merata menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mendukung kesejahteraan penduduk di seluruh wilayah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, data dan informasi terkait indikator kesehatan menjadi elemen penting dalam menyusun perencanaan kebijakan. Berbagai indikator kesehatan seperti Umur Harapan Hidup (UHH), rata-rata lama sakit, hingga jumlah tenaga kesehatan dan penolong kelahiran, yang berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan program kesehatan yang efektif.

Kabupaten Sigi sudah melakukan percepatan penurunan stunting melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif. Tabel dibawah ini menunjukkan prevalensi stunting tahun 2023-2025.

Tabel 2.18 Prevalensi Stunting di Kabupaten Sigi Tahun 2020-2025

Tahun	Prevalensi Stunting	Keterangan
2020	18,8	Prevalensi berdasarkan ePPBGM
2021	15,5	
2022	19,09	
2023	15,85	
2024	13,49	
2025	11,5	

Tabel 2.19 Prevalensi Stunting di Kabupaten Sigi Tahun 2025 – Februari 2026

No	Puskesmas	AGUSTUS 2025				%	FEBRUARI 2026				%	PERBANDINGAN (%)
		Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Balita	Stunting		Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Balita	Stunting		
1	PIPIKORO	12	47	529	59	11,2	14	52	555	66	11,9	0,7
2	KULAWI SELATAN	19	47	654	66	10,1	17	48	624	65	10,4	0,3
3	KULAWI	11	32	993	43	4,3	6	42	970	48	4,9	0,6
4	LINDU	10	20	433	30	6,9	7	16	461	23	5,0	-1,9
5	NOKILALAKI	4	30	431	34	7,9	1	21	387	22	5,7	-2,2
6	PALOLO	63	83	1858	146	7,9	29	92	1849	121	6,5	-1,3
7	GUMBASA	10	26	793	36	4,5	12	24	791	36	4,6	0,01
8	DOLO SELATAN	29	56	1251	85	6,8	37	46	1265	83	6,6	-0,2
9	DOLO BARAT	46	82	1044	128	12,3	35	59	1036	94	9,1	-3,2
10	TANAMBULAVA	20	55	471	75	15,9	21	52	469	73	15,6	-0,4
11	DOLO	62	187	1208	249	20,6	75	173	1226	248	20,2	-0,4
12	SIGI BIROMARU	52	130	1772	182	10,3	54	135	1786	189	10,6	0,3
13	SIGI KOTA	26	100	770	126	16,4	25	82	736	107	14,5	-1,8
14	MARAWOLA	64	182	1599	246	15,4	51	189	1467	240	16,4	1,0
15	MARAWOLA BARAT	41	47	328	88	26,8	44	35	335	79	23,6	-3,2
16	KINOVARO	46	92	858	138	16,1	41	95	820	136	16,6	0,5
JUMLAH		515	1216	14992	1731	11,5	469	1161	14777	1630	11,0	-0,5

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Sigi

Tabel 2.20 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Sigi

Kecamatan	Jumlah Rumah Sakit Umum	Poliklinik	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Apotek
Pipikoro	–	–	1	1	4	...
Kulawi Selatan	–	1	1	–	1	1
Kulawi	1	1	1	1	6	...
Lindu	–	–	1	–		...
Nokilalaki	–	–	–	1	2	1
Palolo	–	1	1	1	6	5
Gumbasa	–	–	1	–	3	1
Dolo Selatan	–	–	1	–	2	...
Dolo Barat	–	1	1	–	3	...
Tanambulava	–	...	–	1	3	...
Dolo	–	1	–	1	2	3
Sigi Biromaru	–	2	1	–	4	6
Sigi Kota	1	–	...	...	5	3
Marawola	–	1	1	1	2	5
Marawola Barat	–	–	–	1		...
Kinovaro	–	–	–	1	3	...
Sigi	**2**	**8**	**10**	**9**	**46**	**25**

Sumber : BPS, Kab. Sigi dalam Angka Tahun 2026, diolah kembali

Tabel 2.21 Tenaga Kesehatan Kabupaten Sigi

Kecamatan	Tenaga Kesehatan - Perawat	Tenaga Kesehatan - Bidan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Tenaga Kesehatan Psikologi Klinis	Jumlah Tenaga Keterapian Fisik	Jumlah Tenaga Keteknisan Medis	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional
Pipikoro	29	19	4	15	1	3	3	–	–	–	–	–
Kulawi Selatan	16	32	6	6	2	3	3	–	–	–	–	–
Kulawi	26	31	4	12	6	4	4	–	–	–	–	–
Lindu	29	24	4	7	3	5	2	–	–	–	–	–
Nokilalaki	6	8	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–
Palolo	30	41	7	9	3	5	5	–	–	–	–	–
Gumbasa	23	24	4	8	3	2	3	–	–	–	–	–
Dolo Selatan	17	22	5	5	5	5	4	–	–	–	–	–
Dolo Barat	47	41	5	16	6	5	4	–	–	–	–	–
Tanambulava	10	13	1	8	3	3	2	–	–	–	–	–
Dolo	20	38	8	15	5	6	8	–	–	–	–	–
Sigi Biromaru	30	51	6	6	5	4	5	–	–	–	–	–
Sigi Kota	113	133	347	42	22	8	55	–	8	10	16	–
Marawola	35	53	9	16	4	6	8	–	–	–	–	–
Marawola Barat	13	18	2	7	1	1	3	–	–	–	–	–
Kinovaro	17	23	4	8	4	3	4	–	–	–	–	–
Sigi	461	571	418	183	74	64	115	–	8	10	16	–

Sumber : BPS, Kab. Sigi dalam Angka Tahun 2026, diolah kembali

Tabel 2.22 Indikator Kinerja Kesehatan Kab.Sigi

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Tahun		
			2023	2024	2025
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,11	71,33	71,63
2	Jumlah Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indikator	12	12	12
3	Jumlah dan Jenis Alkes Sesuai Standar	Unit	9.603	11.941	17.602
4	Jumlah Alkes yang Ada	Unit	9.603	11.941	17.602
5	Jumlah Apotek	Unit	51	51	64
6	Jumlah Apotek yang Memenuhi Standar Kesehatan	Unit	51	51	64
7	Jumlah Balita Pendek	Jiwa	2.421	2.172	1.752
8	Jumlah Balita Sangat Pendek	Jiwa	269	673	639
9	Jumlah Balita yang Diukur	Jiwa	15.274	16.342	14.454
10	Jumlah Faskes	Unit	20	20	21
11	Jumlah Faskes yang Terakreditasi Paripurna	Unit	3	10	10
12	Jumlah Kasus Kematian Perempuan Diakibatkan oleh Proses yang Berhubungan dengan Kehamilan Persalinan	Kasus	0	9	7
13	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	4.163	3.521	3.791
14	Jumlah Seluruh Kunjungan di Fasilitas Kesehatan	Jiwa	138.988	154.056	191.481
15	Jumlah Kunjungan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan	Kunjungan	9.176	17.637	18.846
16	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan	Kunjungan	129.812	136.419	172.635,02

Sumber: Portal Satu Data kabupaten Sigi 2026

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membentuk daya saing daerah. Pewujudannya dilakukan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, perencanaan dan pengendalian tata ruang, dan pengembangan perumahan.

Tabel 2.23 Realisasi indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Tahun		
			2023	2024	2025
1	Jumlah Panjang Jalan Kondisi Baik	Kilometer	719	309	345
2	Jumlah Keseluruhan Panjang Jalan Kabupaten Sigi	Kilometer	1.153,15	1.168,22	1.168,22
3	Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten yg Dilayani oleh Jaringan Irigasi yg Dikelola	Hektar	11.888,30	11.888,30	11.888,30
4	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Sigi	Hektar	6.550	6.550	6.550
5	Jumlah Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya Diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	Unit Rumah	1.177	1.177	1.177
6	Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya Telah Diolah di Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Unit Rumah	49	53	75
7	Jumlah Tenaga Terampil pada Badan Usaha Bidang Kontruksi yang Memiliki Sertifikat KompetensiJumlah Keseluruhan Tenaga Terampil pada Badan Usaha Bidang Kontruksi	Orang	28	43	81
8	Jumlah Kegiatan Pembangunan atau peningkatan Kualitas Infrastruktur ke PU an (dalam DPA)	Kegiatan	100	42	13

Sumber : Portal Satu Data kabupaten Sigi 2026

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah rumah layak huni. Keberadaan rumah tidak layak huni menunjukkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial pada keluarga tersebut. Tahun 2025, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berkurang sebanyak 79 unit, dimana ada sebanyak 10.471 RTLH berkurang menjadi 10.392 di tahun 2025 RTLH.

Sedangkan persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani Tahun 2025 sebesar 6,39 persen.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mengembangkan investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja diperlukan stabilitas sosial dan politik. Untuk menciptakan iklim daerah yang kondusif, Pemerintah Kabupaten Sigi selalu melakukan pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP). Selain itu, setiap individu masyarakat harus membangun deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat. Hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah.

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP). selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP.

6. Urusan Sosial

Ada beberapa permasalahan dalam bidang sosial antara lain masih tingginya jumlah penduduk miskin, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, belum merata dan terkoordinasinya pelaksanaan berbagai kebijakan dan Program penanggulangan kemiskinan, belum optimalnya institusi yang menangani masalah kemiskinan kemudian ada pula permasalahan dibidang kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat antara lain rendahnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat, kurang tersedianya kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi masyarakat. Adanya faktor-faktor sosial ekonomi yang dapat memicu kerawanan sosial ekonomi dan konflik sosial konflik ekonomi. Terbatasnya kuantitas dan kualitas fasilitas sosial yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin.

Tabel 2.24 Realisasi indikator Urusan Sosial

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator		
			2024	2025
1	Jumlah Tagana, Korban Bencana Alam, Non Alam dan Sosial Penerima Manfaat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	1.387	651
2	Jumlah Tagana, Korban Bencana Alam, Non Alam dan Sosial yang Seharusnya Menerima Manfaat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	1.387	651
3	Jumlah Penyandang disabiltas	Orang	1.638	13.313
4	Jumlah Anak terlantar	Anak	41	7.237
5	Jumlah anak balita terlantar	Anak	4	5.440
6	Jumlah Fakir miskin	Orang	156.698	169.689
7	Jumlah Anak berhadapan dengan hukum	Anak	13	7
8	Jumlah Anak jalanan	Anak	0	2
9	Jumlah Anak korban tindak kekerasan	Anak	5	7
10	Jumlah Gelandangan	Orang	0	9
11	Jumlah Pengemis	Orang	0	9
12	Jumlah Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	Orang	60	565
13	Jumlah Lanjut usia terlantar	Orang	406	5.808
14	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	156.698	169.689
15	Jumlah Korban bencana alam	Orang	1.321	583
16	Jumlah Korban bencana non alam	Orang	66	68
17	Jumlah disabilitas yang seharusnya menerima jaminan sosial	Orang	1.638	13.313
18	Jumlah disabilitas yang menerima jaminan sosial	Orang	150	76

B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan sebagai berikut :

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan khususnya penanggulangan tingkat pengangguran merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang lebih terfokus agar upaya penanganan pengangguran benar-benar terarah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional mengingat masalah pengangguran mempunyai implikasi yang sangat luas bagi masalah sosial, politik dan keamanan. Untuk mengatasi masalah pengangguran perlu dibuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi para pencari kerja di Kabupaten Sigi.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk Angkatan kerja. Pada tahun 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sigi sebesar 75,92%. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2025 sebesar 2,55% hal ini menggambarkan dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Sigi terdapat sekitar 2 orang berstatus pengangguran.

Tabel 2.25 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi Tahun 2025

Kegiatan Utama	Kegiatan Utama (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2025	2025	2025
Angkatan Kerja	91659	63671	155330
Bekerja	89920	61837	151757
Pengangguran Terbuka	1739	1834	3573
Bukan Angkatan Kerja	12594	36379	48973
Sekolah	7300	8318	15618
Mengurus Rumah Tangga	2175	26595	28770
Lainnya	3119	1466	4585
Jumlah	104253	100050	204303

Sumber : BPS Kabupaten Sigi Tahun 2026

2. Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam proses pembangunan peranan perempuan yang berwawasan atau berperspektif gender dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender karena selama ini masih banyak ditemui perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga.

Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan serta anak di Kabupaten Sigi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), terdapat 64 kasus kekerasan yang ditangani sepanjang tahun 2025, meningkat dari 63 kasus pada tahun sebelumnya

Dari total 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didata DP3A Sigi, angka tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama:Kekerasan terhadap perempuan: 27 kasus (mayoritas merupakan kasus KDRT).Kekerasan terhadap anak: 37 kasus.

. Untuk itu, diharapkan kedepannya perempuan akan lebih banyak berprestasi dalam pembangunan karena peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dari usaha pemberdayaan perempuan itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Tabel 2.26 Indikator DPPPA Kabupaten Sigi Tahun 2025

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	TAHUN
			2025
1	Indeks Pembangunan Gender	Persen	-
2	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Melapor	Perempuan	28
3	Jumlah Korban Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan	Anak	15
4	Jumlah Korban Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Melapor ke P2TP2A	Anak	44
5	Jumlah Desa atau Kelurahan Layak Anak	Desa/Kelurahan	13
6	Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	1
7	Jumlah OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	OPD	-
8	Jumlah OPD yang Melaksanakan Kebijakan PPRG	OPD	31
9	Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Rumah Perlindungan	Perempuan	4
10	Jumlah laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan/anak	Laporan	28
11	Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Perempuan	9
12	Jumlah anak yang bermasalah dengan hukum	Anak	15
13	Jumlah kekerasan dalam rumah tangga	Kasus	28
14	Jumlah kekerasan pada anak	Kasus	44
15	Jumlah kekerasan pada perempuan dewasa	Kasus	28
16	Jumlah kasus kekerasan fisik terhadap perempuan/anak	Kasus	28
17	Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan/anak	Kasus	44
18	Jumlah kasus kekerasan psikis terhadap perempuan/anak	Kasus	28
19	Jumlah kasus kekerasan pelecehan terhadap perempuan/anak	Kasus	44
20	Jumlah kasus tindak perdagangan orang	Kasus	0
21	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga fisik	Kasus	28
22	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga psikis	Kasus	28
23	Jumlah laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan/anak yang ditindaklanjuti	Laporan	28
24	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan/anak yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	Orang	1
25	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan/anak yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial	Orang	0
26	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan/anak yang diputuskan	Perkara	3
27	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan/anak yang disidangkan	Perkara	26
28	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan/anak yang membutuhkan layanan bantuan hukum	Orang	28
29	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan/anak yang membutuhkan layanan pemulangan	Orang	1
30	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan/anak yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Orang	2
31	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan/anak yang membutuhkan reintegrasi sosial	Orang	2

3. Urusan Pangan

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Di Kabupaten Sigi telah dilaksanakan kegiatan dimaksud oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kinerja urusan pangan dijelaskan melalui Skor Pola Pangan Harapan, Dimana pada tahun 2025 berapa pada angha 83,9 naik 3,7 poin dari capaian 2024 yang berada pada skor 80,2.

Tabel 2.27 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Sigi Tahun 2025

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	TAHUN
			2025
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menurut Jenis Penangkapan Perairan Daratan	Ton	62,64
	a. Nila	Ton	48,90
	b. Mas	Ton	13,74
2	Jumlah Nlai Produksi Perikanan Tangkap menurut Jenis Penangkapan Perairan Daratan	Ribu Rupiah	1.175.620
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	903,13
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	62,65
5	Jumlah Lumbung Pangan	Unit	26
6	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	Desa	10
7	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	10
8	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82
9	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	3.315

4. Urusan Lingkungan Hidup

Berbagai aktivitas yang dilakukan manusia dengan tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya banyak daerah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Capaian penyelenggaraan urusan dinas lingkungan hidup dapat dilihat pada indikator Indeks kualitas lingkungan, persentase penanganan sampah Selengkapnya realisasi indikator urusan lingkungan hidup disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.28 Realisasi indikator urusan lingkungan hidup

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	TAHUN
			2025
1	Jumlah Sampah yang Tertangani	Ton	10.402,50
2	Jumlah Total Timbulan Sampah Kabupaten Sigi	Ton	48.664,36
3	Jumlah sampah yang terkelola melalui 3R	Ton	7.842,21
4	Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Diawasi	Unit	8
5	Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Diawasi yang Taat	Unit	8
7	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Seharusnya Dikelolan Di seluruh Kecamatan	Lokasi	3
8	Jumlah Luas RTH (Taman) yang Dikelola	Meter Persegi	15.714
9	Jumlah luas RTH Taiganja desa kalukubula kec.sigi biromaru yang dikelola	Meter Persegi	15.714
10	Jumlah luas RTH Desa Lolu Kec.Sigi Biromaru yang dikelola	Meter Persegi	38.296
11	Jumlah luas RTH Desa Binangga Kec.Marawola yang dikelola	Meter Persegi	8.155
12	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Teregistrasi ke DLH	Pengaduan	4
13	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk ke DLH yang Tertangani	Pengaduan	4
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	97,48
15	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,33
16	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	92,48
17	Jumlah Dokumen yang Tersedia	Dokumen	8
18	Jumlah Lembaga Atau Masyarakat Yang Mengikuti Lomba Untuk Mendapatkan Penghargaan LH	Sekolah	3
19	Jumlah Volume Produksi sampah	Ton	48.664,36
20	Jumlah Volume Produksi sampah ditangani	Ton	10.402,50
22	Jumlah Areal Pelayanan Pengelolaan Sampah	Km Persegi	364,30
23	Jumlah sampah yang terkurangi melalui Program 3R (Reuse, reduce, dan Recycle)	Ton	7.846,21
24	Jumlah limbah B3 ynag disimpan di TPS Limbah B3	Kg	4.420
25	Jumlah Lahan Krutis terdata	Ha	11.071,75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Penerbitan dokumen identitas penduduk yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk harus dimiliki oleh semua warga negara di mana hal ini merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak asasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 270.19 jiwa ditahun 2024 maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Sampai Tahun 2024 penduduk berusia 17 tahun ke atas yang melakukan perekaman KTP sebanyak 34.691 orang. Sedangkan untuk persentase anak usia 01-7 tahun yang memiliki KIA mencapai 76.847 orang.

Tabel 2.29 Realisasi indikator urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Tahun
			2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	82
2	Jumlah Kematian yang Dilaporkan	Jiwa	1.752
3	Jumlah akta kematian yang sudah diterbitkan di Kabupaten Sigi	Dokumen	1.656
4	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	Dokumen	1.752
5	Jumlah akta kelahiran yang sudah diterbitkan di Kabupaten Sigi	Dokumen	164.720
6	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	Dokumen	164.720
7	Jumlah akta perceraian yang sudah diterbitkan di Kabupaten Sigi	Dokumen	1.591
8	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian (Non Muslim)	Dokumen	165
9	Jumlah akta perkawinan yang sudah diterbitkan di Kabupaten Sigi	Dokumen	78.865
10	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim)	Dokumen	20.644
11	Jumlah Kepemilikan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia	Dokumen	4.696
12	Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi	Jiwa	279.104
13	Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi Berjenis Kelamin Laki-Laki	Jiwa	143.006
14	Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi Berjenis Kelamin Perempuan	Jiwa	136.098
15	Jumlah penduduk usia pendidikan	Jiwa	85.616
16	Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi yang Wajib Memiliki e-KTP	Jiwa	203.012
17	Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi yang sudah memiliki e-KTP Berdasarkan Kecamatan	Jiwa	199.927
18	Jumlah penduduk yang belum memiliki E-KTP	Jiwa	3.085
19	Jumlah Penduduk Non Muslim yang Berstatus Cerai Hidup	Jiwa	828
20	Jumlah Penduduk Non Muslim yang Berstatus Kawin	Jiwa	45.125
21	Jumlah Penduduk Pindah Datang yang Dilaporkan	Jiwa	4.949
22	Jumlah Penduduk Usia 0 - 18 Tahun	Jiwa	83.405
23	Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun	Jiwa	28.055
24	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Jiwa	14.409
25	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Jiwa	29.020
26	Jumlah Penduduk yang Memiliki KIA	Jiwa	40.403
27	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK	Jiwa	94.809
28	Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki KIA (Berusia 0-17 Tahun)	Jiwa	80.105
29	Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki KK	Jiwa	97.074
30	Jumlah penduduk usia dewasa	Jiwa	198.999
31	Jumlah penduduk usia belum dewasa	Jiwa	80.105
32	Jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran (<= 4 tahun)	Jiwa	17.430
33	Jumlah bayi yang belum memiliki akta kelahiran (<= 4 tahun)	Jiwa	513
34	Jumlah kepala keluarga	KK	97.074
35	Jumlah pasangan menikah yang sudah memiliki akte nikah	Pasangan	78.865
36	Jumlah pasangan menikah yang belum memiliki akte nikah	Pasangan	55.670

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sigi sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pemberdayaan masyarakat, penataan dan penguatan otonomi desa yang berbudaya, beradat dan partisipatif serta penguatan Pemerintahan desa.

Capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dimana indicator persentase pengentasan desa tertinggal pada tahun 2025 mencapai 31,37 persen Dimana jumlah desa teringgal sebanyak 13 desa, desa Berkembang sebanyak 64 desa, Desa Maju sebanyak 77 desa dan desa Mandiri sebanyak 22 Desa.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) berfokus pada penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Kebijakan ini menyasar isu utama di daerah, seperti pernikahan dini, penurunan angka stunting (Sigi Zero Stunting), serta pemberdayaan masyarakat dan kelompok Gen Z

Inisiatif utama dan pencapaian pengendalian penduduk di Kabupaten Sigi mencakup

Penyusunan GDPK dan PJPK Dimana Pemerintah daerah memetakan proyeksi kependudukan jangka panjang. Ini memproyeksikan rasio ketergantungan penduduk Sigi berada di angka 48,21%. Dokumen ini menjadi pedoman untuk memastikan kualitas sumber daya manusia dan mengendalikan laju pertumbuhan yang seimbang

Fokus pada Remaja dan Pernikahan Dini: Tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu tantangan besar yang ditangani melalui program pemberdayaan dan edukasi keluarga. Sosialisasi smart parenting digencarkan guna menekan risiko masalah sosial dan kesehatan reproduksi pada remaja

8. Urusan Perhubungan

Pembangunan dibidang perhubungan dimaksudkan untuk mendukung pembangunan sektor-sektor lain salah satunya ialah pembangunan sarana transportasi yang berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang, dan jasa baik ditingkat lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas, melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang perhubungan Kabupaten Sigi merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Urusan perhubungan terdiri dari 2 (dua) sektor yaitu sektor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP).

Jumlah dermaga penyeberangan yang ada di Kabupaten Sigi mengalami peningkatan, Pada Tahun 2025 jumlah dermaga penyeberangan sudah mencapai 3 (tiga) unit. Dimana data trayek angkutan penyebrangan berada di kecamatan lindu.

Jumlah pemasangan rambu-rambu setiap tahunnya hanya berjumlah 1 (satu) unit setiap Tahun, hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia untuk pemasangan rambu-rambu sangat terbatas.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada sub sektor telekomunikasi, kebutuhan akan informasi yang cepat menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Walaupun sarana telekomunikasi berupa telepon kabel dapat menjangkau beberapa kecamatan, namun perkembangan teknologi informasi berupa telepon genggam sudah dapat menjangkau seluruh Kecamatan.

Guna memberikan pelayanan informasi yang luas kepada masyarakat, ada sebanyak 35 kelompok Informasi(KIM) yang tersebar di desa

guna untuk memberikan informasi dan data tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bisa di akses oleh Masyarakat luas.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sebagai pilar ekonomi daerah koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dirasakan sangat penting keberadaannya sehinggah harus tetap tumbuh dan berkembang. Alasannya ada empat yaitu mensejahterakan rakyat, menyelamatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta membangun pertumbuhan ekonomi. Perkembangan UKM dapat dipengaruhi oleh kondisi makro-ekonomi dan sektor ril. Sektor UMKM jika dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Namun di sisi lain, UMKM juga masih di hadapkan pada masalah yang mendasar yang secara garis besar mencakup Pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya. Kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha. Ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembanga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Tabel 2.30 Realisasi indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	2025
1	Jumlah Koperasi yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	Unit	268
2	Jumlah Koperasi	Unit	268
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	221
4	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	48
5	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi	Unit	16
6	Jumlah Koperasi Binaan Kabupaten	Unit	95
7	Jumlah Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Kegiatan	13
8	Jumlah Seluruh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) - Unit Simpan Pinjam (USP)	Unit	40
9	Jumlah Koperasi Pegawai Negeri (KPN)	Unit	9
10	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	Unit	12
11	Jumlah Koperasi Peternakan	Unit	3
12	Jumlah Koperasi Pertanian (Koptan)	Unit	7
13	Jumlah Koperasi Syariah (Kopsyah)	Unit	4
14	Jumlah Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)	Unit	4
15	Jumlah Koperasi Wanita (Kopwan)	Unit	3
16	Jumlah Koperasi Pemasaran	Unit	1
17	Jumlah Koperasi Produsen (Kopsen)	Unit	27
18	Jumlah Koperasi Konsumen	Unit	3
19	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Unit	5
20	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	Unit	5
21	Jumlah Anggota Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100

11. Urusan Penanaman Modal

Realisasi pembangunan untuk urusan penanaman modal diukur dengan indikator antara lain jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (ribu), rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dan PMDN), dan Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta). Rasio daya serap tenaga kerja diperoleh dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMD dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Tahun 2025 persentase peningkatan investasi di kabupaten Sigi mencapai 139,82 persen.

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sigi. Pada Tahun 2025 atlet yang berprestasi sebanyak 15 orang dengan jumlah medali yang diperoleh sebanyak 16 medali

Pembangunan dibidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa belum tersedia lapangan maupun gelanggang olahraga di Kabupaten Sigi.

13. Urusan Kebudayaan

Capaian pembangunan urusan kebudayaan dapat diukur melalui indikator kinerja daerah terkait penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Ada sebanyak 25 cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Sigi, dan semuanya tetap terjaga kelestariannya, hal ini disebabkan karena pencatatan yang setiap Tahun berkala dilakukan oleh Bidang Kebudayaan, dengan melibatkan para Juru Pelihara situs yang di Kabupaten Sigi serta hasil delineasi yang dilakukan Badan Pengelola Cagar Budaya Gorontalo yang membawahi wilayah Provinsi

Sulawesi Tengah dengan melibatkan bidang Kebudayaan Kabupaten Sigi serta laporan dari masyarakat.

14. Urusan Perpustakaan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi berdasarkan reviu Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi yaitu Pelayanan Arsip yang baik dan Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan yang baik. Pada tahun 2025 indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kabupaten Sigi dengan skor 22,84 tertinggi pada Tingkat kabupaten se propinsi Sulawesi Tengah.

15. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Pada tahun 2025 mencapai 66,62 persen arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dan 67,71 persen untuk arsip inaktif, Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional mencapai 58,58 persen.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten Sigi, yaitu bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kontribusi PDRB urusan perikanan diperoleh dari beberapa kegiatan yakni Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan Hasil Perikanan, jumlah total produksi perikanan (tangkap dan Budidaya) mencapai 1.201,9 ton dan jumlah total produksi perikanan yang ditetapkan sebanyak 1.200 ton hal ini menunjukkan kinerja yang mencapai 100,15 persen dari target yang direncanakan pada tahun 2025.

2. Urusan Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata selama Tahun 2025 dapat dilihat pada realisasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 23 wisatawan mancanegara dimana angka ini menunjukkan penurunan kunjungan yang pada tahun 2024 mencapai 23 wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan nusantara menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan mencapai 28.363 wisatawan nusantara dimana pada tahun 2024 mencapai 27.126 wisatawan nusantara.

Kunjungan wisata sangat dipengaruhi pada kegiatan promosi pariwisata melalui beberapa media antara lain *videotrone* promosi potensi pariwisata pada terminal kedatangan Bandara Mutiara Palu serta media promosi lain seperti media sosial *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Website* perangkat daerah.

3. Urusan Pertanian

a) Pertanian

Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi diarahkan pada kawasan-kawasan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah, berada di daerah dataran rendah yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Tanambulava. dan Kecamatan Dolo, serta memiliki potensi untuk dapat dilalui jaringan irigasi alam dan buatan. Kawasan pengembangan pertanian lahan basah diarahkan pada desa-desa berlokasi di Kecamatan-kecamatan tersebut di atas dengan alokasi lahan untuk 30 Tahun mendatang seluas 33.697.00 Hektar. Pengembangan budidaya usaha tani merupakan usaha budidaya integral dan bersifat universal, dimana memandang kawasan sebagai titik sentral pembangunan komoditas dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sumberdaya lahan.

Peruntukan lahan untuk kawasan budidaya pertanian lahan kering memiliki prinsip yang relatif sama dengan pengembangan perencanaan untuk kawasan pertanian lahan basah, yaitu dengan

mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk komoditi pertanian lahan kering, kondisi topografi dan pengairan, status lahan, dan bukan merupakan bagian dari kawasan lindung.

Kawasan Pengembangan Pertanian Lahan Kering memiliki kemungkinan pengembangan menjadi Kawasan Perkebunan, khususnya untuk kebun buah-buahan. Hal ini disebabkan karena kawasan perkebunan memiliki kesesuaian lahan yang hampir sama dengan pertanian lahan kering.

Walaupun lahan yang dialokasikan untuk pertanian lahan kering dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan, tetapi prioritas penggunaaan lahan tetap merupakan alokasi lahan untuk Pertanian Lahan Kering. Berdasarkan pada arahan RTRW Provinsi alokasi lahan untuk pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi adalah sebesar lebih kurang 16 ribu Ha. Tetapi, dengan melihat ketersediaan lahan yang ada, pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi dapat dikembangkan hingga 30.453.67 Ha yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi.

Dalam pengembangan pertanian Kabupaten Sigi ke depan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui usaha pertanian terpadu, pengembangan sistem pertanian organik dan sistem usaha agrbisnis; Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berdaya saing berbasis agribisnis untuk memenuhi kebutuhan pangan dan produk di dalam negeri dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan pangan; serta memanfaatkan pasar bahan baku industri pengolahan dalam negeri dan peluang eksport untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; Mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan tangguh, serta Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas petani *(Capacity building)* dan pelaku usaha agribisnis untuk mampu mengakses teknologi, permodalan dan informasi pasar serta pengembangan kelembagaan petani.

Pengembangan pertanian organik merupakan salah satu strategi dalam upaya pengembangan komoditas pertanian yang memiliki daya saing baik pasar lokal maupun eksport. Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Data Tanaman Pangan kabupaten sigi untuk Padi dengan luas panen mencapai 21.053,5 hektare dan total produksi sebesar 110.290,3 ton. Produktivitas rata-rata sebesar 5,1 ton per hektare, Jagung dengan luas panen 11.705,5 hektare dan produksi sebesar 52.132,1 ton. Produktivitas sebesar 4,3 ton per hektare, Kedelai hanya 53 hektare dengan produksi 76 ton. Produktivitas sebesar 1,5 ton per hektare, Kacang tanah luas panen sebesar 152,5 hektare dan produksi 169,3 ton, dengan produktivitas yang masih rendah yakni hanya 1,01 ton per hektare dan Ubi Kayu lahan seluas 54,4 hektare, namun mampu menghasilkan produksi sebesar 1.138,2 ton dengan produktivitas tertinggi dari semua komoditas, yaitu 19,8 ton per hektare.

b) Perkebunan

Pengembangan Kawasan Perkebunan diarahkan tersebar secara merata di seluruh Kabupaten Sigi. Alokasi luas lahan kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2008-2038 adalah sebesar 55.718 Hektar. Pengembangan secara ekstensif untuk perkebunan masih dimungkinkan sepanjang komoditasnya adalah tanaman yang mempunyai fungsi pemeliharaan dan perlindungan terhadap air dan tanah.

Pengembangan kawasan perkebunan memiliki arti penting dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi. Mengingat kontribusi sektor perkebunan yang cukup berarti dalam

pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, serta fungsi perlindungan terhadap lingkungan, maka upaya secara ekstensif masih dapat dilakukan.

Penetapan rencana kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk kawasan perkebunan rakyat dengan beragam jenis-jenis komoditas perkebunan yang terdapat di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 87.879 hektar. Namun demikian, didalam peruntukan kawasan perkebunan terdapat juga kawasan hutan adat seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar di Kecamatan Kulawi.

Penetapan rencana kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk kawasan perkebunan rakyat dengan beragam jenis-jenis komoditas perkebunan yang terdapat di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 87.879 hektar. Namun demikian, didalam peruntukan kawasan perkebunan terdapat juga kawasan hutan adat seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar di Kecamatan Kulawi.

Realisasi komoditas perkebunan di Kabupaten Sigi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.31 Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Sigi Tahun 2025

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu	Luas Areal Tanaman
Kelapa/Coconut	3070,1	6321
Kelapa sawit/Palm oil	22,5	150
Kopi/Coffee	509,7	4144
Kakao/Cocoa	17523,8	28997
Jambu mete/Cashew nut	–	5
Pala/Nutmeg	3	1134
Cengkeh/Clove	23,9	404

Sumber : BPS kabupaten Sigi

c) Peternakan

Populasi ternak merupakan salah satu indikator yang mendapat pertimbangan pada suatu daerah, demikian pula Kabupaten Sigi peningkatan populasi menjadi pokok tujuan dalam

upaya pengembangan peternakan. Populasi ternak tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.32 Populasi Ternak di Kabupaten Sigi Tahun 2025

No.	Uraian Data Indikator Kinerja	Satuan Indikator	T A H UN
			2025
1	Data Kasus Penyakit Hewan Menular	Kasus	959
2	Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sigi Menurut Jenis Hewan Ternak	Ekor	623.062
3	Jumlah sarana Peternakan yang ada di kabupaten Sigi	Unit	146
4	Jumlah Produksi hasil Peternakan	Kg	285.000
5	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit terhadap hewan	Ekor	11.000
6	Jumlah Produksi daging	Kg	55.350
7	Jumlah petani penerima subsidi premi Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS)	Orang	0

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kab.Sigi

4. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Capaian penyelenggaraan urusan perdagangan dapat di lihat dari banyaknya tempat perdagangan yang ada. Di kabupaten Sigi ada sebanyak 96 Rumah makan/Restoran. Untuk pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuannya ada sebanuak 8 pelaku usaha. Di tahun 2025 jumlah industry kecil dan menengah di kabupaten sigi mencapai 2.120 yang tersebar di 16 Kecamatan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan proses jual beli.

5. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain transmigrasi bertujuan untuk pemerataan dan penyebaran penduduk dalam satu wilayah potensial serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Pada Tahun 2025 pembangunan transmigrasi difokuskan pada revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo yang terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yaitu SKP A, SKP B dan SKP C dimana terdapat 3 (tiga) Satuan Permukiman Transmigrasi di dalamnya yaitu Satuan Permukiman Lembantongoa SP1, Lembantongoa SP2 dan Bulupountu SP3.

Penempatan transmigrasi dilaksanakan pada akhir Tahun 2018 sejumlah 50 kepala keluarga (KK) di satuan Permukiman (SP) 3 Bulupountu sebagai langkah cepat pemerintah daerah Kabupaten Sigi dan pemerintah pusat dalam penanganan bencana alam gempa dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018. Penempatan di Tahun 2019 di 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu 50 kepala keluarga (KK) di Satuan permukiman (SP)2 Lembantongoa Kecamatan Palolo dan 50 kepala keluarga (KK) di satuan permukiman (SP)3 Bulupountu Kecamatan Sigi Kota. Masyarakat yang ditempatkan diperioritaskan pada transmigrasi penduduk setempat (TPS) guna percepatan penanganan penanggulangan bencana alam gempa dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018.

2.2.5 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya saing merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat atau menggambarkan perkembangan suatu wilayah. Makin tinggi daya saing suatu daerah, makin tinggi pergerakkan dan aktivitas ekonomi yang dapat dicapai daerah tersebut. Keterbatasan infrastruktur daerah yang merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing daerah menjadi kendala atau hambatan dalam memanfaatkan segala potensi sumberdaya yang dimiliki suatu daerah.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga secara ekonomi dapat dilihat melalui besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Semakin besar pendapatan, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Namun data yang akurat tentang besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga sangat sulit diperoleh. Dalam prakteknya indikator pendapatan sering menghadirkan masalah-masalah tertentu. Pendapatan sulit didefinisikan karena pendapatan mencakup banyak komponen yang berkaitan dengan moneter, misalnya pendapatan rumah tangga pertanian sulit dihitung

karena sebagian besar konsumsinya berasal dari hasil produksi sendiri. Selain itu, individu cenderung membuat pernyataan yang keliru tentang tingkat pendapatannya, yang umumnya di bawah perkiraan (*under estimated*). Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut dan juga karena alasan nilai tabungan yang rendah, pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan total pengeluaran rumah tangga.

Struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mencirikan rumah tangga dengan memberikan gambaran pengeluaran makanan dan non makanan. Tingkat urgensi kebutuhan terhadap kedua jenis pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Jika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat pun menurun pada hampir semua rumah tangga. Namun, keadaan seperti ini lebih dirasakan pada kalangan rumah tangga miskin. Sebab, hal ini memaksa mereka lebih banyak menekan pengeluaran dan menggunakan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keterbatasan mereka, maka sangat wajar apabila rumah tangga khususnya yang mengalami penurunan standar hidup secara drastis akan mengambil tindakan dengan memberikan prioritas utama pada pengeluaran untuk makanan. Dengan demikian, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi makanan.

Rumah tangga yang lebih mampu biasanya mempunyai barang-barang non makanan lebih banyak daripada rumah tangga yang relatif lebih miskin. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang dibelanjakan bukan untuk makanan.

Tabel 2.33 Pengeluaran per Kapita Tahun 2022 s.d 2024
Kabupaten Sigi

Kabupaten/Kota	2023	2024*	2025**
1	2	3	4
Sigi	25.893	26.471	27.175
Sulawesi Tengah	**62.584**	**68.001**	**72.959**

Sumber : BPS Kabupaten Sigi 2026

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Selanjutnya akan dibahas untuk pengeluaran bukan makanan. Jika penduduk sudah dapat memenuhi kebutuhan makanannya, mereka cenderung membelanjakan sisanya untuk pengeluaran lainnya. Kecenderungan menabung di Indonesia masih relatif rendah. Dengan asumsi tersebut, jika pengeluaran non makanan semakin besar, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan penduduk. Demikian sebaliknya jika pendapatan semakin rendah, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin tinggi dan pengeluaran untuk non makanan semakin rendah. Pengeluaran non makanan ini terdiri dari 6 kelompok konsumsi, yaitu:

1) Perumahan dan fasilitas rumah tangga;
2) Aneka barang dan jasa, termasuk di dalamnya biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan jasa lainnya;
3) Pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
4) Barang tahan lama;
5) Pajak, pungutan dan asuransi;
6) Keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Pada Tahun 2025 persentase pengeluaran non pangan penduduk kabupaten Sigi didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sebesar 57,01 persen, sebanyak 16,78 persen untuk aneka barang dan jasa. Sedangkan untuk pemenuhan pakaian, barang, pajak, retribusi dan keperluan pesta cenderung memiliki persentase pengeluaran yang hampir sama yakni pada kisaran

5-8 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Sigi masih memprioritaskan pendapatannya untuk keperluan non pangan masih pa kebutuhan yang bersifat primer, sandang, pangan papan. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingkat pendapatan yang umumnya masih relatif rendah.

Tabel 2.34 Golongan Pengeluaran Non Pangan Tahun 2025
Kabupaten Sigi

No	Kelompok Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran	Persentase pengeluaran
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	300.114	28,94
2	Aneka Barang dan Jasa	78.558	7,57
3	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	29.225	2,82
4	Barang yang tahan lama	12.696	1,22
5	Pajak Pungutan dan asuransi	46.476	4,48
6	Keperluan pesta dan upacara	1.084	0,1
Jumlah		**477.909**	**46,08**

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2026 diolah kembali

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Konteks ketersediaan infrastruktur sebuah wilayah terhadap Aspek Daya Saing Daerah adalah semakin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur sebuah kabupaten/kota tentunya akan meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah yang meningkat tentunya akan menjadi daya tarik terhadap pelaku ekonomi dalam berinvestasi di Kabupaten Sigi.

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Sigi sejauh ini berdasar pada pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang untuk menjamin tercapaianya tujuan dan sasaran tata ruang yang direncanakan melalui keterpaduan dalam pelaksanaan pengendalian ketaatan terhadap tata ruang yang telah di koordinasikan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta melalui badan atau dinas terkait penataan ruang. Ketaatan terhadap RTRW mengacu pada peraturan zonasi untuk penetapan kegiatan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona, yaitu a) penetapan intensitas kegiatan pada setiap zona yang ditetapkan, b) penetapan luasan kawasan yang diijinkan untuk suatu fungsi tertentu selama masih berkesesuaian.

1. **Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

   Pada Tahun 2022 merupakan Tahun awal perencanaan Tata Ruang Wilayah dengan rencana peruntukan RTRW (kawasan budidaya) sebanyak 258.477 ha. Yang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan. Dengan rasio ketaatan terhadap RTRW 0% ini menunjukan bahwa pada awal perencanaan tata ruang rasio ketaatan secara umum sesuai rencana. Sedangkan pada Tahun 2025 di mana kebutuhan pembangunan daerah menyebabkan permintaan akan lahan budidaya untuk kegiatan pembangunan meningkat sehingga rasio ketaatan terhadap RTRW dengan rasio sebesar 0,0003. Rasio ini menunjukan telah terjadi perubahan pola penggunaan ruang di banding Tahun awal perencanaan. Secara umum rasio Ketaatan Terhadap RTRW digambarkan pada pada tabel dan gambar di bawah ini:

2. **Luas Wilayah Produktif**

   Berdasarkan arahan penggunaan kawasan budidaya pada rencana pola ruang Kabupaten Sigi dapatlah digambarkan arahan kawasan yang dapat digunakan sebagai wilayah produktif yang dapat dikembangkan untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian, perkebunan, permukiman dan area penggunaan lain, sehingga wilayah produktif ini dapat difungsikan guna mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sigi yang berbasis ekonomi kerakyatan.

   Berdasarkan rasio wilayah produktif 2025 sebesar 0,85 , luas wilayah produktif 92.459,03 dan luas seluruh Wilayah Budidaya 108.187,73.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu indikator untuk menarik iklim investasi adalah adanya kondisi keamanan yang dapat dilihat pada rendahnya tingkat kriminalitas di suatu daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi menunjukkan pada Tahun 2025 jumlah kejahatan terhadap jiwa sebanyak 141 kasus. Dimana kasus

kejahatan terbanyak adalah penganiayaan yaitu 88 kasus, dan kejahatan terhadap benda merupakan kejahatan yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengrusakan barang milik orang lain. Selama tahun 2025 terjadi 181 kasus kejahatan di kabupaten Sigi, dan 58 diantaranya merupakan pencurian biasa. Kasus terbanyak lainnya adalah narkoba, penipuan, dan penggelapan.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Pada Tahun 2025, jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja adalah 155.330 penduduk , sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah sebanyak 48.973 penduduk.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dari total angkatan kerja pada Tahun 2025, penduduk Kabupaten Sigi yang bekerja tercatat sebesar 98,94 persen sedangkan yang diklasifikasikan sebagai penganggur sekitar 1,06 persen.

2. Rasio Ketergantungan

Situasi kependudukan di suatu wilayah, selain digambarkan melalui laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya, juga dapat tercermin dari komposisi penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin. Semakin rendah proporsi penduduk usia tidak produktif, anak-anak dan manula, menyebabkan angka ketergantungan (*dependency ratio*) semakin kecil. Rendahnya dependency ratio memberikan kesempatan bagi penduduk produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia, yang terbagi menjadi kelompok penduduk usia produktif (15-64 Tahun) dan penduduk usia tidak produktif (0-14 Tahun dan di atas 65 Tahun). Rasio ketergantungan (*Depedency Ratio*) di Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebesar 197,300 atau dengan kata lain angka ketergantungan mencapai 46,93 persen.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi capaian kinerja daerah tahun 2025 memiliki kedudukan strategis dalam penyusunan RKPD Tahun Rencana. Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, sehingga capaian pada tahun tersebut menjadi titik awal untuk menilai arah perkembangan pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta kesesuaian antara keluaran program dan kegiatan dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai. Sejalan dengan arah penyusunan RKPD Tahun Rencana, hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai dasar untuk memperkuat konsistensi antara sasaran RPJMD, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, serta dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

2.2.1 Evaluasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Dari sisi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, kinerja RKPD Tahun 2025 menunjukkan tingkat pelaksanaan yang relatif baik, tercermin dari realisasi kinerja dan anggaran yang mencapai target. Adapun sebagai berikut:

Tabel. 2.35 Matriks Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA pada RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2025

NO	URUSAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 (%)		KRITERIA PENILAIAN
		K	Rp	
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**99,84%**		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99,91%	94,85%	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	99,84%	96,30%	Sangat Tinggi
3	Rumah Sakit Tora Belo	100,00%	93,07%	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	98,87%	97,64%	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan dan Tata Ruang	100,00%	98,60%	Sangat Tinggi
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00%	97,74%	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100,00%	95,93%	Sangat Tinggi

NO	URUSAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 (%)		KRITERIA PENILAIAN
8	Dinas Sosial	100,00%	98,76%	Sangat Tinggi
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00%	96,85%	Sangat Tinggi
II	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	**96,96%**		
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	100,00%	97,91%	Sangat Tinggi
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88,72%	93,42%	Tinggi
3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	100,00%	94,22%	Sangat Tinggi
4	Dinas Lingkungan Hidup	88,30%	95,52%	Tinggi
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,02%	95,23%	Sangat Tinggi
6	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00%	97,06%	Sangat Tinggi
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	96,16%	Sangat Tinggi
8	Dinas Perhubungan	99,20%	91,52%	Sangat Tinggi
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,00%	96,47%	Sangat Tinggi
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	91,22%	89,41%	Sangat Tinggi
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,00%	95,54%	Sangat Tinggi
12	Dinas Pemuda Dan Olahraga	100,00%	97,50%	Sangat Tinggi
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100,00%	96,10%	Sangat Tinggi
III	**Urusan Pilihan**	**89,56%**		
1	Dinas Pariwisata	96,62%	94,59%	Sangat Tinggi
2	Dinas Tanaman Pangan Hurtikultura dan Perkebunan	61,60%	95,54%	Sedang
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100,00%	96,57%	Sangat Tinggi
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100,00%	97,72%	Sangat Tinggi
IV	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**99,06%**		
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	98,09%	95,27%	Sangat Tinggi

NO	URUSAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 (%)		KRITERIA PENILAIAN
2	Badan Pendapatan Daerah	99,80%	96,01%	Sangat Tinggi
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	99,80%	83,76%	Sangat Tinggi
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	96,67%	94,31%	Sangat Tinggi
5	Sekretariat DPRD	100,00%	98,60%	Sangat Tinggi
6	Inspektorat	100,00%	91,35%	Sangat Tinggi
	Sekretariat Daerah	98,92%		
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	100,00%	96,66%	Sangat Tinggi
2	Bagian Administrasi Hukum	90,50%	96,51%	Sangat Tinggi
3	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100,00%	90,42%	Sangat Tinggi
4	Bagian Administrasi Organisasi	100,00%	97,59%	Sangat Tinggi
5	Bagian Administrasi Pembangunan	100,00%	99,76%	Sangat Tinggi
6	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	100,00%	95,94%	Sangat Tinggi
7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00%	98,98%	Sangat Tinggi
8	Bagian Administrasi Perlengkapan dan Umum	98,74%	95,15%	Sangat Tinggi
9	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	100,00%	93,36%	Sangat Tinggi
10	Bagian Barang dan Jasa	100,00%	97,32%	Sangat Tinggi
	Rata-rata	**96,86%**	**95,50%**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2025 (data diolah)

Capaian penyerapan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rencana kerja perangkat daerah telah dapat dilaksanakan. Meski begitu, kualitas evaluasi tidak cukup hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran. Penilaian perlu diarahkan pada ketercapaian keluaran, kontribusi keluaran terhadap hasil, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesesuaian lokasi dan kelompok sasaran, serta keberlanjutan hasil pembangunan. Untuk uraian lebih lengkap sudah termuat dalam dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2025.

2.2.2 Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan dan sasaran menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah, penentuan program prioritas RKPD tahun rencana, khususnya rumusan tujuan, sasaran, dan indikator, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2025.

Analisis target tujuan dan sasaran dilakukan untuk memastikan bahwa penetapan prioritas pembangunan tahun rencana memiliki dasar kinerja yang terukur. Evaluasi capaian RKPD Tahun 2025 digunakan untuk melihat ketercapaian indikator, deviasi antara target dan realisasi, efektivitas program prioritas, serta kebutuhan penguatan intervensi pada tahun rencana. Dengan demikian, target tahun rencana tidak hanya dipahami sebagai angka perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pencapaian sasaran RPJMD.

Apabila capaian indikator Tahun 2025 telah mencapai atau melampaui target RPJMD, target tahun rencana dapat dipertahankan sesuai RPJMD atau ditingkatkan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah, kesiapan perangkat daerah, dan dukungan kebijakan nasional maupun provinsi. Apabila capaian Tahun 2025 masih berada di bawah target, maka target tahun rencana tetap diarahkan untuk mengejar sasaran RPJMD melalui penguatan program prioritas, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara lebih intensif.

Tabel. 2.36 Matriks Capaian Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2025

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD 2025	Realisasi RKPD 2025	Status Capaian
MISI 1	**Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan**					
	(1.1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas		Indeks Infrastruktur Daerah	0,63	0,48	**Belum Tercapai**
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Kemantapan Jalan	0,26	0,3	**Melampaui**
			Indeks Kemantapan Irigasi	0,69	0,7	**Melampaui**
			Indeks Akses Air Minum	0,75	0,77	**Melampaui**
			Indeks Akses Sanitasi	0,82	0,73	**Tercapai**
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	85,43	86,14	**Melampaui**
		Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Rasio Konektivitas	54,06	Belum ada data	-
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,25	Belum ada data	-
MISI 2	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera**					
	(2.1) Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter, dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	71,50-72,00	71,68	**Tercapai**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD 2025	Realisasi RKPD 2025	Status Capaian
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Literasi	60	Belum ada data	-
			Skor Numerasi	60	Belum ada data	-
			Rata-rata Lama Sekolah	9,04	Belum ada data	-
			Harapan Lama Sekolah	13,21	Belum ada data	-
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	62,75	22,84	Belum Tercapai
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	71,69	71,63	Tercapai
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	30	12,12	Melampaui
			Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 Kelahiran Hidup)	122	Belum ada data	-
	(2.2) Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60	Belum ada data	-
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,43	Belum ada data	-
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,03	Belum ada data	-
		Meningkatnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,24-61,30	Belum ada data	-
		Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	82,18	88,59	Melampaui
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	20	Belum ada data	-

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD 2025	Realisasi RKPD 2025	Status Capaian
			Indeks Partisipasi Olahraga	0,5	Belum ada data	-
	(2.3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	10,47	10,47	Tercapai
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	2,3	Melampaui
			Indeks Gini Rasio	0,250-0,240	0,252	Belum Tercapai
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	71	Belum ada data	-
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,86	Belum ada data	-
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	14	Belum ada data	-
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Penduduk Bekerja	0,73	Belum ada data	-
		Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Pendapatan Perkapita di Kawasan Transmigrasi	5,7	Belum ada data	-
MISI 3	**Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata**					
	(3.1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,10-4,15	3,91	Tercapai
			Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEB)	17,2	Belum ada data	-
			Indeks Ekonomi Hijau (IEH)	72,78	Belum ada data	-

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD 2025	Realisasi RKPD 2025	Status Capaian
		Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	40,76	41,09	Melampaui
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	0,51	Belum ada data	-
			PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	0,66	Belum ada data	-
			Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	3,5	Belum ada data	-
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,05	Belum ada data	-
		Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	18,75	Belum ada data	-
			Rasio Kewirausahaan Daerah	0,026	Belum ada data	-
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	50	-36,8	Belum Tercapai
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,45	8,32	Melampaui
MISI 4	**Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan harmoni sosial**					
	(4.1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,48	88,12	Melampaui
		Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,4	Belum ada data	-
		Menurunnya Intensitas GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	28	Belum ada data	-
			Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	565655,11	Belum ada data	-

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD 2025	Realisasi RKPD 2025	Status Capaian
			Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan	32	Belum ada data	-
		Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah dan luas genangan yang tertangani	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	39,36	Belum ada data	-
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	12,73	Belum ada data	-
		Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	0,08	0,65	Melampaui
		Meningkatnya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	49,7	Belum ada data	-
	(4.2) Meningkatkan keamanan daerah dan ketahanan bencana serta perubahan iklim		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	Belum ada data	-
			Indeks Risiko Bencana	162,5	126,74	Melampaui
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	76	Belum ada data	-
		Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,47	Belum ada data	-
	(4.3) Meningkatkan harmoni sosial		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75	Belum ada data	-
		Meningkatnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	50,2	Belum ada data	-
MISI 5	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif**					

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD 2025	Realisasi RKPD 2025	Status Capaian
	(5.1) Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	70,5	68,22	Tercapai
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	40,05	14,5	Belum Tercapai
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	3,54-3,60	Belum ada data	-
			Indeks Reformasi Hukum	87,83	Belum ada data	-
			Nilai SAKIP	BB	B	Belum Tercapai
			Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Sangat Baik	Melampaui
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,38	3,21	Tercapai
		Meningkatnya tata kelola berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,35	Belum ada data	-
		Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah	B	Belum ada data	-
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	74,68	77,05	Melampaui
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	95	99,14	Melampaui
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Baik	Belum ada data	-
		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,6	Belum ada data	-

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD 2025	Realisasi RKPD 2025	Status Capaian
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	75	100	Melampaui
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	2,27	2,78	Melampaui
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	79,85	Tercapai
			Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2	1,9	Tercapai
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,32	3,102	Tercapai
		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	84	81	Tercapai

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2025

2.2.3 Evaluasi Capaian Indikator Daerah Tahun 2025

2.2.3.1 Evaluasi Indikator Utama Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa indikator utama pembangunan daerah menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 70,90 pada tahun 2024 menjadi 71,68 pada tahun 2025. Tingkat kemiskinan menurun dari 12,06 persen menjadi 10,47 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 2,55 persen menjadi 2,30 persen. Pada dimensi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,50 persen menjadi 3,91 persen, disertai peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari Rp46,53 juta menjadi Rp48,69 juta. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi daerah.

Perbaikan indikator makro tersebut perlu tetap dibaca secara proporsional. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan kenaikan nilai ekonomi nominal per penduduk, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli riil masyarakat. Selain itu, Rasio Gini meningkat dari 0,246 menjadi 0,252. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat pembangunan. Karena itu, agenda pengurangan kemiskinan perlu dilanjutkan bersamaan dengan penguatan kebijakan pemerataan pendapatan, perluasan akses terhadap sumber penghidupan, peningkatan kualitas layanan dasar, penciptaan kesempatan kerja produktif, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Pada aspek struktur ekonomi daerah, kontribusi PDRB industri pengolahan meningkat tipis dari 1,97 persen menjadi 2,00 persen. Peningkatan ini memberikan sinyal positif, tetapi kontribusinya masih relatif kecil terhadap struktur perekonomian daerah. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan agroindustri, penguatan UMKM, koperasi, investasi produktif, serta rantai nilai pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Sementara itu, kontribusi PDRB Kabupaten menurun dari 3,69 persen menjadi 3,27 persen, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat posisi relatif perekonomian Kabupaten Sigi terhadap wilayah rujukan yang lebih luas.

Dari sisi daya saing dan tata kelola, Indeks Daya Saing Daerah meningkat dari 3,27 menjadi 3,40. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas daerah dalam mendukung produktivitas, ekosistem usaha, dan daya saing wilayah. Pada saat yang sama, beberapa indikator tata kelola dan kapasitas kelembagaan perlu mendapat perhatian. Indeks Inovasi Daerah menurun dari 38,14 menjadi 14,5, sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi menurun dari 70,5 menjadi 68,22. Penurunan tersebut menjadi sinyal perlunya penguatan manajemen inovasi daerah, kualitas dokumentasi dan bukti dukung, konsistensi pelaporan, akuntabilitas kinerja, digitalisasi pemerintahan, serta perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pada aspek infrastruktur, Indeks Infrastruktur Daerah menurun dari 0,63 menjadi 0,48. Penurunan ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD karena infrastruktur merupakan prasyarat bagi pemerataan layanan dasar, konektivitas wilayah, mobilitas ekonomi, dan pengembangan kawasan strategis. Arah kebijakan tahun berikutnya perlu menempatkan pembangunan infrastruktur secara lebih selektif dan berbasis prioritas, dengan mempertimbangkan urgensi layanan dasar, daya ungkit ekonomi, dukungan terhadap kawasan produktif, konektivitas antarwilayah, kesiapan lahan dan dokumen teknis, serta kemampuan fiskal daerah.

Pada aspek lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah meningkat dari 79,78 menjadi 88,12. Capaian ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan menjadi modal penting bagi Kabupaten Sigi sebagai daerah dengan karakter ekologis yang kuat. Arah pembangunan ke depan perlu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan dan air, serta pembangunan rendah karbon. Pada sisi ketangguhan wilayah, Indeks Risiko Bencana tahun 2025 tercatat sebesar 126,74. Karena belum tersedia data pembanding tahun sebelumnya dalam tabel evaluasi, indikator ini belum dapat dianalisis secara tren. Meski begitu, karakteristik wilayah Kabupaten Sigi yang memiliki kerentanan geografis, ekologis, dan kebencanaan menuntut agar mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penguatan kapasitas masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.37 Capaian Indikator Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Awal 2024	Capaian 2025
PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp juta	46,53	48,69
Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEB)	Angka	16,73	N/A
Indeks Ekonomi Hijau (IEH)	Angka	N/A	N/A
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	1,97	2,00
Tingkat Kemiskinan	%	12,06	10,47
Rasio Gini	Angka	0,246	0,252
Kontribusi PDRB Kabupaten	%	3,69	3,27
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,50	3,91
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	58,8	N/A
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,55	2,30
Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	0,63	0,48
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	38,14	14,5
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,27	3,40
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	N/A	N/A
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	70,50	68,22
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,90	71,68
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	N/A	N/A
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	N/A	94,72
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	79,78	88,12
Indeks Risiko Bencana	Angka	N/A	126,74

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2025 (dengan perbaikan)

2.2.3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci

Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci menjadi dasar untuk menilai keterhubungan antara sasaran strategis RPJMD, urusan pemerintahan, program perangkat daerah, dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Dalam kerangka penyusunan evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mencatat capaian angka, tetapi juga untuk

menguji apakah program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan keluaran yang efektif dalam mendukung hasil pembangunan. Pendekatan ini penting agar perencanaan tahunan tidak berhenti pada pemenuhan daftar kegiatan, melainkan benar-benar menjadi instrumen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan untuk menjadi kebijakan ditahun rencana.

2.2.4 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sigi Tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar telah mengalami perkembangan pada beberapa urusan, terutama pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan sebagian layanan kebencanaan. Capaian tersebut mengindikasikan adanya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat melalui pelayanan yang menjadi kewenangan daerah.

Pada urusan pendidikan, capaian SPM menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Capaian layanan pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan anak usia dini yang pada tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai target, meningkat pada tahun 2024 dan dilaporkan mencapai 100 persen pada tahun 2025. Perkembangan ini menjadi indikasi positif terhadap semakin kuatnya dukungan layanan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi, baik dari sisi cakupan sasaran maupun pemenuhan layanan minimal.

Tabel. 2.38 SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	83,61%	97,62%	100%
2	Pendidikan Dasar	88,68%	96,71%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	80,85%	97,62%	100%

Urusan pekerjaan umum juga memperlihatkan tren peningkatan, khususnya pada penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian yang pada tahun 2023 masih

relatif rendah, meningkat pada tahun 2024 dan dilaporkan mencapai 100 persen pada tahun 2025. Perkembangan ini perlu terus dijaga melalui penguatan kualitas infrastruktur, keberlanjutan layanan, serta validasi data penerima manfaat agar capaian administratif sejalan dengan kondisi pelayanan di lapangan.

Tabel. 2.39 SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	27,09%	74,77%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	43,32%	82,06%	81,46%

Pada urusan perumahan rakyat dan urusan sosial, capaian SPM secara umum telah menunjukkan pemenuhan terhadap target layanan yang teridentifikasi. Hal ini menggambarkan bahwa intervensi terhadap masyarakat terdampak bencana, masyarakat yang membutuhkan relokasi, serta kelompok rentan telah menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Ke depan, penguatan basis data kelompok sasaran tetap diperlukan agar pelayanan sosial dasar semakin tepat sasaran, responsif, dan adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat.

Tabel. 2.40 SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

Tabel. 2.41 SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

Di sisi lain, urusan kesehatan masih memerlukan penguatan lebih lanjut karena capaian antar jenis pelayanan dasar belum merata. Beberapa layanan, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, balita, usia produktif, penderita hipertensi, ODGJ berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV masih belum seluruhnya mencapai target 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan SPM kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, akses wilayah, kesinambungan pelayanan, serta efektivitas deteksi dini dan penjangkauan sasaran.

Tabel. 2.42 SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,54%	81,74%	76,95%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	86,65%	80,90%	89,94%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90,89%	83,53%	92,85%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	77,41%	80,31%	78,59%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75,47%	86,32%	78,13%

No	Jenis Pelayanan Dasar	2023	2024	2025
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	75,81%	77,20%	62,32%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	79,41%	82,68%	93,44%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	73,67%	95,60%	67,86%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	124,54%	96,18%	93,73%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	77,57%	86,41%	67,72%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80,87%	91,81%	85,62%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	93,67%	78,85%	89,11%

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan kebencanaan, capaian SPM menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun pada tahun 2025 masih terdapat layanan yang belum mencapai 100 persen, terutama pada pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, serta pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Sigi yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan tantangan akses antarwilayah.

Atas dasar capaian dan tantangan tersebut, pemenuhan SPM Kabupaten Sigi pada tahun rencana perlu diarahkan pada penguatan layanan dasar yang lebih merata, terukur, dan berbasis data. Prioritas perbaikan perlu difokuskan pada pemutakhiran data sasaran, penguatan layanan di wilayah terpencil, peningkatan kapasitas SDM pelayanan dasar, penyelarasan program dan subkegiatan dengan indikator e-SPM, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Pendekatan ini penting agar pencapaian SPM tidak hanya tercermin dalam angka pelaporan, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sigi.

Tabel 2.43 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023-2025

Urusan SPM	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025	Keterangan
Pendidikan	Pendidikan dasar 88,68%; pendidikan kesetaraan 80,85%; PAUD 83,61%	Meningkat signifikan: pendidikan dasar 96,71%; kesetaraan 94,70%; PAUD 97,62%	Dilaporkan mencapai 100% pada seluruh jenis layanan dasar	Capaian menunjukkan perbaikan kuat. Tantangan berikutnya adalah menjaga mutu layanan, validitas data sasaran, dan pemerataan akses wilayah terpencil
Kesehatan	Capaian bervariasi antarjenis layanan; beberapa layanan belum mencapai target penuh	Sebagian layanan meningkat, namun masih terdapat kesenjangan pada cakupan layanan tertentu	Masih bervariasi; layanan usia produktif, hipertensi, ODGJ berat, ibu hamil, balita, TBC, dan HIV belum seluruhnya 100%	Urusan kesehatan menjadi prioritas penguatan karena dipengaruhi partisipasi masyarakat, akses geografis, tenaga kesehatan, skrining, dan kesinambungan layanan
Pekerjaan Umum	Air minum 27,09%; air limbah domestik 43,32%	Meningkat menjadi air minum 74,77%; air limbah domestik 82,06%	Dilaporkan mencapai 100% untuk air minum dan air limbah domestik	Capaian meningkat tajam. Perlu dipastikan keberlanjutan layanan, kualitas infrastruktur, dan konsistensi data penerima manfaat
Perumahan Rakyat	Dilaporkan 100% untuk rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah	Dilaporkan 100%	Dilaporkan 100%	Capaian baik, namun tetap perlu penguatan basis data rumah terdampak bencana dan kebutuhan relokasi
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Kebakaran	Dilaporkan 100% untuk ketertiban umum dan kebakaran	Dilaporkan 100%	Dilaporkan 100%	Tahun 2025 menunjukkan penurunan capaian sehingga perlu penguatan sarana, personel, waktu tanggap, dan cakupan layanan

Urusan SPM	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025	Keterangan
Kebencanaan	Informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan/evakuasi dilaporkan 100%	Dilaporkan 100%	Informasi rawan bencana 100%; pencegahan dan kesiapsiagaan 97,92%; penyelamatan dan evakuasi 100%	Secara umum baik, namun kesiapsiagaan perlu terus diperkuat mengingat karakter wilayah Sigi rawan bencana
Sosial	Capaian pelayanan sosial dasar dilaporkan sesuai target layanan yang teridentifikasi	Capaian pelayanan sosial dasar dilaporkan sesuai target layanan yang teridentifikasi	Sebagian besar layanan sosial dasar dilaporkan 100%	Perlu penguatan data terpadu kelompok rentan, termasuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, dan korban bencana

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Sigi Tahun 2023-2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Sigi telah bergerak positif pada aspek pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing daerah, dan kualitas lingkungan hidup. Agenda yang masih memerlukan penguatan meliputi pemerataan kesejahteraan, transformasi struktur ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan inovasi daerah, penguatan reformasi birokrasi, pemenuhan pelayanan dasar, serta peningkatan ketangguhan terhadap risiko bencana.

Berdasarkan gambaran tersebut, hasil evaluasi tahun 2025 menjadi dasar teknokratik untuk menajamkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Tahun Rencana. Indikator yang menunjukkan kemajuan perlu dipertahankan dan diperluas dampaknya, sedangkan indikator yang mengalami pelemahan perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan strategi, penajaman program, pemilihan kegiatan dan subkegiatan yang lebih berdaya ungkit, serta penguatan pengendalian pelaksanaan. Dengan pendekatan tersebut, RKPD Tahun rencana diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan tahunan yang berbasis data, berorientasi hasil, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, dan mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2.5 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan salah satu instrumen penjaringan aspirasi masyarakat yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. telaah terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilakukan bukan semata-mata untuk menampilkan daftar usulan kegiatan, melainkan untuk membaca pola kebutuhan masyarakat, keterkaitan aspirasi dengan isu pembangunan daerah, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah menunjukkan bahwa proses perencanaan aspirasi masyarakat masih terkonsentrasi pada kebutuhan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dukungan sarana produksi pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, serta penyediaan sarana kepemudaan dan olahraga. Pola tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat masih sangat berkaitan dengan pemenuhan akses dasar, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, penguatan pendapatan rumah tangga, serta penyediaan ruang aktivitas sosial dan ekonomi di tingkat desa.

Telaah terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD juga memperlihatkan bahwa isu tata kelola pemerintahan berbasis data, kinerja, digitalisasi, dan partisipasi inklusif menjadi aspek lintas sektor yang perlu mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan. Setiap kegiatan perlu dipastikan memiliki lokus yang jelas, penerima manfaat yang terdata, kesesuaian dengan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, serta keterkaitan dengan indikator kinerja dan prioritas pembangunan daerah.

Ke depan, integrasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran perlu terus diperkuat melalui penyelarasan dengan isu strategis daerah, prioritas pembangunan, kewenangan perangkat daerah, kapasitas fiskal, serta kesiapan pelaksanaan di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, Pokok-Pokok Pikiran DPRD tidak hanya menjadi instrumen penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sigi.

2.2.6 Telaah Hasil Inovasi Tahun 2025

Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong penyelesaian permasalahan pembangunan secara lebih adaptif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penyusunan RKPD, inovasi daerah tidak ditempatkan semata-mata sebagai daftar capaian atau praktik baik perangkat daerah, melainkan sebagai bagian dari telaah teknokratik untuk menilai kontribusi pembaruan cara kerja pemerintahan terhadap penyelesaian permasalahan daerah, penguatan prioritas pembangunan, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil inventarisasi inovasi daerah, portofolio inovasi Kabupaten Sigi menunjukkan kecenderungan yang cukup kuat pada aspek pelayanan dasar, perlindungan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, pengelolaan pendapatan daerah, serta tata kelola administrasi pemerintahan. Inovasi seperti POS CASTING, SigaP, Haalo Tora Belo, Protek Sigi, Siratna Sigi, To Sigi, E-Report, Satoe Jiwa, Si Jiwa, dan Road Map Prima memperlihatkan adanya upaya perangkat daerah untuk memperbaiki cara kerja pelayanan, mempercepat respons pemerintah, memperkuat basis data, serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan arah pembangunan RKPD, inovasi daerah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klaster utama. Pertama, klaster penguatan sumber daya manusia dan pelayanan dasar, yang mencakup inovasi di bidang kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan administrasi kependudukan. Klaster ini relevan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan kerentanan sosial, penguatan layanan dasar, serta perlindungan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah. Kedua, klaster transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang mencakup inovasi dalam pelaporan, pengelolaan informasi, administrasi kelembagaan, pendapatan daerah, dan pelayanan publik. Klaster ini mendukung agenda peningkatan akuntabilitas, efektivitas birokrasi, transparansi, dan responsivitas pemerintah daerah. Ketiga, klaster infrastruktur dan pengembangan wilayah, yang

tercermin melalui inovasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pendukung sektor strategis daerah.

Berdasarkan telaah terhadap isu strategis dan arah prioritas pembangunan Kabupaten Sigi, masih terdapat ruang penguatan inovasi daerah pada sektor yang secara langsung mendukung visi pembangunan daerah berbasis pertanian, pariwisata, dan keberlanjutan. Inovasi yang berorientasi pada hilirisasi komoditas pertanian, rantai nilai produk unggulan, agroeduwisata, ekonomi kreatif desa, pengelolaan destinasi wisata, ketahanan pangan lokal, lingkungan hidup, mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan rawan, dan konservasi sumber daya alam masih perlu diperluas. Hal ini penting karena tantangan pembangunan daerah tidak hanya berada pada pelayanan dasar dan tata kelola, tetapi juga pada peningkatan daya saing ekonomi wilayah, pengurangan risiko bencana, perlindungan lingkungan hidup, dan penguatan basis ekonomi masyarakat.

Atas dasar tersebut, inovasi daerah perlu diarahkan sebagai strategi operasional RKPD untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Inovasi yang telah berjalan dan terbukti memberikan manfaat perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas data, pengukuran dampak, perluasan jangkauan layanan, integrasi dengan program dan kegiatan perangkat daerah, serta replikasi pada wilayah atau sektor yang memiliki kebutuhan serupa. Sementara itu, perangkat daerah perlu didorong mengembangkan inovasi baru yang lebih responsif terhadap isu strategis, khususnya pertanian, pariwisata, ekonomi lokal, lingkungan hidup, dan ketahanan bencana.

Melalui pendekatan tersebut, inovasi daerah diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif dalam penilaian inovasi, tetapi menjadi bagian integral dari proses perencanaan pembangunan tahunan. Inovasi daerah perlu diposisikan sebagai mekanisme pembaruan kebijakan, perbaikan layanan, efisiensi tata kelola, dan percepatan penyelesaian masalah pembangunan yang mendukung pencapaian tema, prioritas, sasaran, dan target RKPD Kabupaten Sigi.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Perumusan masalah dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 dilakukan melalui sintesis terhadap arah pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, kondisi lingkungan dinamis yang berkembang, serta hasil Desk Rakortek Tahun 2027, baik tematik maupun per urusan pemerintahan. Matriks berikut menggambarkan alur penalaran dan dasar penajaman isu strategis agar rumusan isu Tahun 2027 bersifat operasional, terukur, serta dapat diturunkan ke dalam prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, lokasi, target, dan perangkat daerah pengampu.

Tabel 2.44 Rumusan Masalah dan Isu Strategis Kabupaten Sigi Tahun 2027

No.	Arah/Permasalahan RPJMD 2025-2029	Evaluasi RKPD Tahun 2025	Kondisi Lingkungan Dinamis	Rumusan Final Isu Strategis Tahun 2027	Fokus Operasional Tahun 2027
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial menjadi agenda penting dalam pencapaian visi daerah	Evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa layanan dasar masih perlu diperkuat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan stunting, akses layanan bagi kelompok rentan, dan pemerataan pelayanan di wilayah yang sulit dijangkau	Persiapan Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi menjadi momentum untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, anak berisiko putus sekolah, dan peserta didik dari wilayah terpencil. Di sisi lain, kebutuhan pemenuhan SPM dan peningkatan kualitas SDM tetap menjadi tekanan utama pembangunan daerah	Penguatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan layanan dasar yang inklusif	Dukungan Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi; peningkatan akses dan mutu pendidikan; layanan kesehatan dasar; pemeriksaan kesehatan; percepatan penurunan stunting; pemenuhan SPM; perlindungan anak; peningkatan literasi; layanan adminduk; serta layanan dasar bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan wilayah terpencil
2	RPJMD menempatkan ketahanan lingkungan, ketahanan bencana, perlindungan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian penting dari arah pembangunan daerah	Evaluasi pelaksanaan RKPD menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi bencana, perlindungan sosial, pemulihan layanan dasar, serta kesiapsiagaan terhadap wilayah rawan bencana	Gempa bumi 16 Juni 2026 dengan dampak terutama di Kecamatan Palolo dan Nokilalaki menunjukkan bahwa risiko bencana perlu menjadi perhatian eksplisit dalam RKPD Tahun 2027. Kondisi ini menuntut pemulihan pascabencana sekaligus penguatan infrastruktur dan layanan dasar yang lebih tangguh	Pemulihan pascabencana dan penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana	Pendataan kerusakan berbasis data terpadu; rehabilitasi rumah dan fasilitas publik; pemulihan akses jalan dan jembatan; penguatan layanan dasar darurat; perlindungan masyarakat terdampak; desa tangguh bencana; rencana kontinjensi; komunikasi kebencanaan; serta integrasi pengurangan

No.	Arah/Permasalahan RPJMD 2025-2029	Evaluasi RKPD Tahun 2025	Kondisi Lingkungan Dinamis	Rumusan Final Isu Strategis Tahun 2027	Fokus Operasional Tahun 2027
					risiko bencana dalam tata ruang dan pembangunan infrastruktur
3	RPJMD menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, pemerataan layanan, dan pengembangan kawasan strategis untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah	Evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa infrastruktur dasar, akses jalan, konektivitas kawasan produksi, permukiman, air bersih, sanitasi, dan layanan wilayah masih membutuhkan penajaman prioritas, terutama pada wilayah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses	Dampak bencana, kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan kawasan pertanian dan pariwisata, serta tuntutan pemerataan akses publik memperkuat kebutuhan infrastruktur yang tidak hanya membangun fisik, tetapi juga mendukung pelayanan dan produktivitas masyarakat	Pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan layanan kawasan strategis	Peningkatan jalan dan jembatan prioritas; jalan produksi; irigasi; air bersih; sanitasi; infrastruktur permukiman; infrastruktur pendidikan dan kesehatan; akses digital; konektivitas kawasan pertanian dan pariwisata; serta dukungan infrastruktur pada wilayah terpencil, rawan bencana, dan kawasan strategis daerah
4	RPJMD menempatkan pertanian dan pariwisata sebagai basis utama pembangunan ekonomi daerah, dengan kebutuhan peningkatan produktivitas, nilai tambah, kelembagaan ekonomi, dan daya saing daerah	Evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa daya saing ekonomi daerah, produktivitas sektor unggulan, UMKM, koperasi, investasi, akses pasar, dan pengembangan ekonomi lokal masih perlu diperkuat	Arah pembangunan nasional Tahun 2027 menekankan produktivitas, investasi, dan penguatan ekonomi bernilai tambah. Bagi Kabupaten Sigi, hal ini relevan dengan pengembangan pertanian, perkebunan, pangan, UMKM, koperasi, pariwisata, agroeduwisata,	Transformasi ekonomi daerah berbasis produktivitas pertanian, UMKM, pariwisata, dan investasi produktif	Peningkatan produktivitas pertanian; penguatan penyuluh; hilirisasi komoditas lokal; pascapanen dan standar mutu; penguatan koperasi, UMKM, dan industri kecil; pengendalian inflasi pangan; promosi investasi; perluasan

No.	Arah/Permasalahan RPJMD 2025-2029	Evaluasi RKPD Tahun 2025	Kondisi Lingkungan Dinamis	Rumusan Final Isu Strategis Tahun 2027	Fokus Operasional Tahun 2027
			ekonomi kreatif, dan investasi produktif		kesempatan kerja; pengembangan desa wisata, agroeduwisata, ekonomi kreatif; serta penguatan rantai nilai produk unggulan daerah
5	RPJMD memuat arah pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan sumber daya alam, ketahanan pangan, dan penguatan daya dukung wilayah	Evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, pengendalian sampah, pengelolaan sumber daya air, dan perlindungan kawasan masih perlu diperkuat agar tidak menghambat keberlanjutan pembangunan	Risiko perubahan iklim, potensi kekeringan, kerentanan pangan, tekanan terhadap kawasan hulu/DAS, serta kebutuhan pengembangan ekonomi hijau dan pembiayaan ekologis menjadi kondisi dinamis yang perlu dipertimbangkan dalam RKPD Tahun 2027	Ketahanan pangan, air, lingkungan hidup, dan pembangunan rendah karbon.	Perlindungan lahan pertanian pangan; peningkatan produksi pangan lokal; pengelolaan sumber daya air; penguatan perikanan darat; konservasi kawasan hulu; rehabilitasi lahan kritis; pengendalian alih fungsi lahan; pengelolaan sampah dan limbah; pengurangan emisi gas rumah kaca; pemanfaatan energi baru terbarukan secara bertahap; ekonomi hijau; dan pembiayaan ekologis
6	RPJMD menekankan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, integrasi data, monitoring dan evaluasi, akuntabilitas kinerja,	Kompleksitas pembangunan Tahun 2027, termasuk kebutuhan pemulihan bencana, layanan dasar, pengentasan kemiskinan, GEDSI, dan sinkronisasi	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data, kinerja, digitalisasi, dan partisipasi inklusif	Penguatan Satu Data; integrasi data sektoral dan spasial; peningkatan kualitas perencanaan berbasis bukti; monitoring dan evaluasi kinerja; penguatan SAKIP;

No.	Arah/Permasalahan RPJMD 2025-2029	Evaluasi RKPD Tahun 2025	Kondisi Lingkungan Dinamis	Rumusan Final Isu Strategis Tahun 2027	Fokus Operasional Tahun 2027
		digitalisasi layanan, serta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran	pusat dan daerah, menuntut tata kelola berbasis data, respons cepat, dan koordinasi lintas perangkat daerah		SPBE; digitalisasi pelayanan publik; keamanan informasi; kearsipan; inovasi daerah; serta Musrenbang inklusif agar aspirasi kelompok rentan masuk dalam perencanaan dan penganggaran
7	RPJMD memuat arah pembangunan yang inklusif, partisipatif, memperhatikan kelompok rentan, masyarakat adat, perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, serta pemberdayaan masyarakat desa	Evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, partisipasi kelompok rentan, dan intervensi terhadap kemiskinan masih perlu diperkuat agar manfaat pembangunan lebih merata	Musrenbang inklusif, pendekatan GEDSI, perlindungan anak, pengarusutamaan gender, masyarakat adat, kemiskinan ekstrem, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan JKK-JKM menjadi kebutuhan dinamis yang perlu dioperasionalkan dalam RKPD Tahun 2027	Penguatan pembangunan inklusif, GEDSI, perlindungan sosial adaptif, dan ketahanan pekerja rentan	Penerapan GEDSI dalam program pembangunan; penyediaan data terpilah; penguatan partisipasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, pemuda, dan kelompok miskin/rentan; penguatan perlindungan sosial adaptif; serta perluasan perlindungan JKK-JKM bagi petani, buruh tani, pekerja harian, pelaku usaha mikro, pekerja informal, dan pekerja berpenghasilan rendah
8	RPJMD membutuhkan dukungan kapasitas fiskal, efektivitas belanja, kolaborasi pembangunan,	Evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan perlunya penajaman belanja prioritas,	Kebutuhan pembangunan Tahun 2027 semakin kompleks, termasuk pemulihan pascabencana,	Penguatan kapasitas fiskal, efektivitas belanja prioritas,	Penajaman belanja berdasarkan prioritas dan daya ungkit; optimalisasi pendapatan daerah;

No.	Arah/Permasalahan RPJMD 2025-2029	Evaluasi RKPD Tahun 2025	Kondisi Lingkungan Dinamis	Rumusan Final Isu Strategis Tahun 2027	Fokus Operasional Tahun 2027
	dan penguatan pembiayaan untuk mencapai target jangka menengah daerah	peningkatan efektivitas program, pengendalian kegiatan yang kurang berdampak, serta penguatan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja	Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, perlindungan sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini menuntut pembiayaan kolaboratif dan pemilahan kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan mitra nonpemerintah	dan pembiayaan kolaboratif	peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran; pemilahan kewenangan pusat-provinsi-kabupaten-desa; pemanfaatan CSR, hibah, perguruan tinggi, dunia usaha, *ecological funding*; serta kolaborasi multipihak untuk pendidikan, pemulihan bencana, infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan lingkungan hidup

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi 2025-2029, Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2025, Hasil Telaah Kondisi Lingkungan Dinamis Kabupaten Sigi, Hasil Desk Rakortek 2027.

Berdasarkan matriks tersebut, isu strategis Kabupaten Sigi Tahun 2027 dapat dipahami sebagai hasil sintesis yang berjenjang. RPJMD Tahun 2025-2029 memberikan arah jangka menengah dan koridor visi pembangunan daerah. Evaluasi RKPD Tahun 2025 memberikan dasar empirik mengenai capaian, kesenjangan, dan kebutuhan perbaikan kinerja pembangunan. Kondisi lingkungan dinamis Tahun 2027 memberikan konteks aktual yang perlu direspons, seperti bencana, penguatan layanan pendidikan, perlindungan pekerja rentan, GEDSI, Musrenbang inklusif, risiko iklim, tekanan fiskal, dan kebutuhan daya saing ekonomi daerah. Sementara itu, hasil Desk Rakortek Tematik dan Per Urusan memberikan penajaman sinkronisasi antara agenda nasional, kewenangan daerah, perangkat daerah pengampu, program, kegiatan, indikator, target, lokasi, dan kebutuhan pendanaan.

Atas dasar sintesis tersebut, rumusan isu strategis Tahun 2027 tidak disusun sebagai daftar permasalahan sektoral, melainkan sebagai agenda pembangunan lintas urusan yang bersifat operasional. Setiap isu strategis perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam prioritas pembangunan daerah, sasaran prioritas, program prioritas, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, lokasi intervensi, perangkat daerah penanggung jawab, serta sumber pendanaan yang memungkinkan. Pendekatan ini penting agar RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 mampu menjadi dokumen perencanaan tahunan yang fokus, sinkron, responsif, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam memuat kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah perlu melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang sudah dirancang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sigi Periode 2025-2029 dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sigi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional maupun regional, dimana harus saling sinergi untuk meningkatkan perekonomiannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan upaya untuk mencapai visi misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Berdasarkan data rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun 2027 bahwa Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,11 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan investasi yang tinggi, belanja pemerintah yang optimal, serta kinerja ekspor yang tetap stabil. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global

maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, maka APBN berperan strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang diperkuat melalui sinergi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan, sehingga perekonomian tidak hanya tumbuh kuat tetapi juga berkelanjutan dengan stabilitas makrofiskal yang tetap terjaga.

Pada tahun 2025, konsumsi rumah tangga kembali menguat dengan pertumbuhan 4,98 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,94 persen. Sebagai tahun pertama administrasi pemerintahan baru, terdapat penyesuaian program pemerintah dan akselerasi belanja, P-KP tumbuh lebih rendah namun tetap ekspansif mencapai 2,50 persen. Adapun Pergeseran anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) ke program pemerintah pusat juga turut menahan rambatan konsumsi pemerintah dari sisi pengeluaran pemerintah daerah. Di tengah berbagai dinamika global dan tahun politik nasional, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh 5,09 persen sepanjang tahun 2025. Di tengah tantangan perdagangan global, ekspor barang dan jasa riil Indonesia mencatat pertumbuhan positif tercermin dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 12,66 persen sepanjang tahun 2025.

Pada tahun 2025, ekspor riil tumbuh sebesar 7,03 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,85 persen. Di sisi lain, kinerja impor barang dan jasa riil juga mengalami pertumbuhan positif. Impor barang tahun 2025 tumbuh sebesar 4,77 persen, Sementara impor jasa tetap tumbuh meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan impor barang. Secara keseluruhan, peningkatan impor pada tahun 2025 masih mencerminkan kebutuhan riil perekonomian domestik dan tetap berada dalam kondisi yang terkendali.

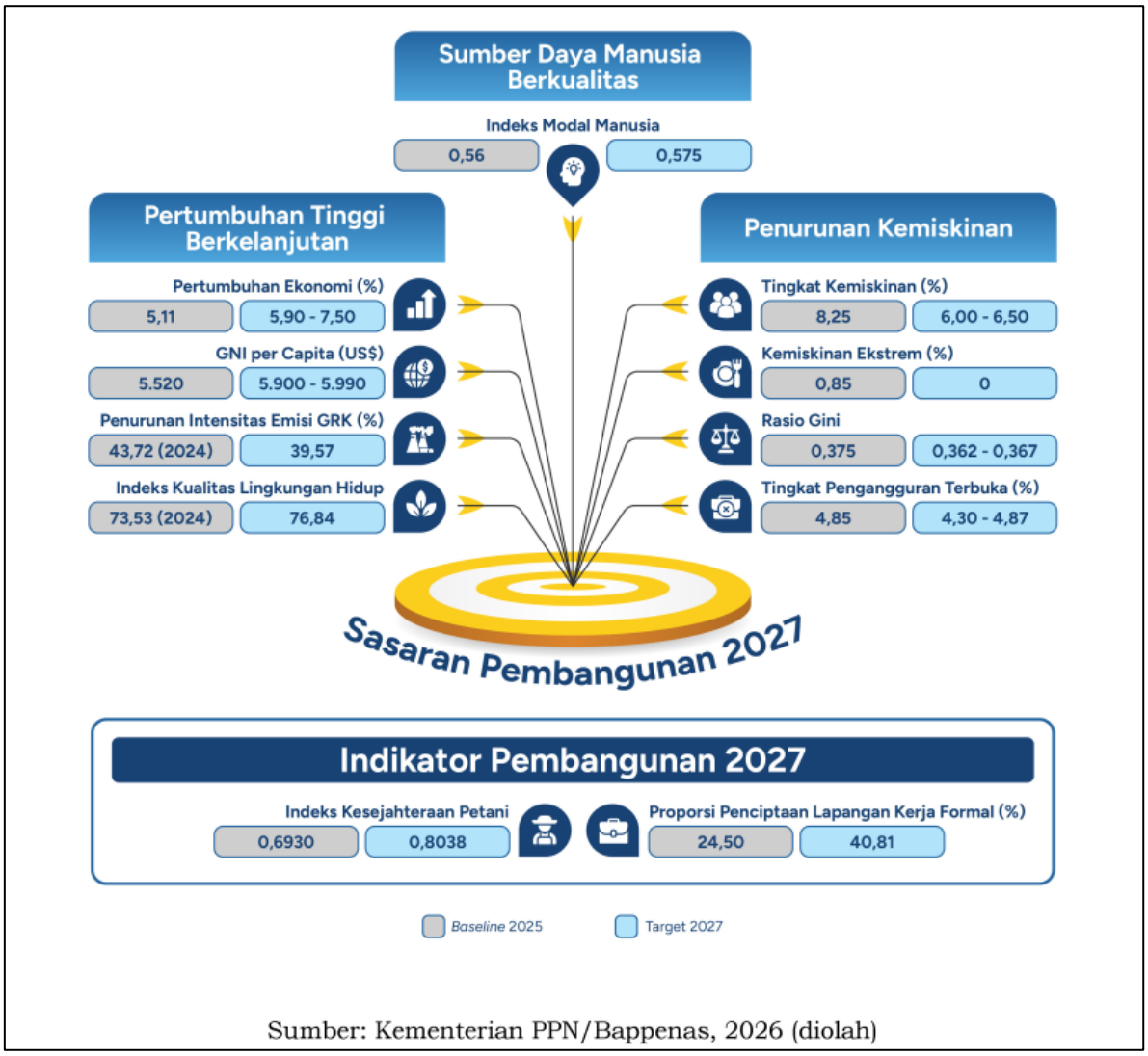
Di sisi lain, inflasi yang terkendali telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. Memasuki periode pemulihan ekonomi, tekanan inflasi kembali mereda dan inflasi tercatat sebesar 2,61 persen (*yoy*) pada tahun 2023 Seiring meredanya tekanan harga, inflasi dalam tren penurunan dan kembali berada dalam

rentang sasaran yang telah ditetapkan hingga mencapai 1,6 persen (yoy) di tahun 2024, atau terendah sepanjang sejarah. Namun Seiring dengan menguatnya permintaan domestik, inflasi kembali meningkat secara moderat menjadi sekitar 2,92 persen (*yoy*) namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Sektor Penyediaan Akomodasi serta Makan Minum menunjukkan pola pemulihan kuat pascapandemi yang kemudian termoderasi dengan Pertumbuhan tahunan meningkat dari 3,88 persen pada 2021 menuju puncak 11,95 persen pada 2022. Kemudian melandai menjadi 10,00 persen pada 2023, 8,46 persen pada 2024 dan 7,41 persen pada tahun 2025. Dengan inflasi yang relatif terkendali dan konsumsi rumah tangga tetap solid, keseluruhan kinerja sektor ini mencerminkan transisi menuju fase pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sektor pertanian di tahun 2025 melonjak signifikan tumbuh 5,33 persen dari 0,68% tahun 2024. kinerja sektor pertanian meningkat terkait kebutuhan program MBG serta membaiknya teknologi dan sarana budidaya turut mendorong pertumbuhan subsektor pertanian lainnya. Pada tahun 2026, sektor pertanian diperkirakan masih akan tumbuh tinggi didorong oleh kebijakan Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional melalui produksi yang berkelanjutan.

Adapun Sasaran pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Adapun target Indikator Makro Nasional pada Tahun 2027 sebagai berikut:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

3.1.1.1 Arah Kebijakan Proyek Strategis Nasional

Kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah. PSN diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas, mengembangkan wilayah berbasis potensi unggulan, dan memperluas akses terhadap infrastruktur serta layanan dasar. PSN Direktif Presiden merupakan proyek strategis yang ditetapkan langsung oleh Presiden berdasarkan urgensi, dampak strategis, dan kebutuhan percepatan pelaksanaan agenda prioritas nasional. PSN Direktif Presiden meliputi:

1. PSN Makan Bergizi Gratis;

2. PSN Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
3. PSN Sekolah Rakyat;
4. PSN Kartu Usaha Afirmatif;
5. PSN Kartu Kesejahteraan;
6. PSN Digitalisasi Pendidikan;
7. PSN Pengelolaan Sampah Terpadu;
8. PSN Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit; dan
9. PSN Pengembangan Mobil Nasional.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, PSN didukung oleh percepatan perizinan, pembiayaan, pengadaan tanah, fasilitasi proyek, penyederhanaan administrasi, serta penguatan pemantauan dan evaluasi berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Persebaran PSN juga diarahkan lebih merata untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Sigi

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sigi adalah perkembangan ekonomi daerah dan nasional. Perkembangan ekonomi telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Kerangka ekonomi makro Kabupaten Sigi merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Selain indikator tersebut juga akan disertakan indikator – indikator lain sebagai penunjang dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Sigi terus bangkit dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini mulai terlihat pada tahun 2025 kondisi ekonomi telah pulih kembali dengan pertumbuhan sebesar 3,91%, dan dilanjutkan di tahun 2026 sebesar 4,64-4,69% kemudian diproyeksikan akan tetap tumbuh antara 5,18-5,23% pada tahun 2027. Kondisi perekonomian tersebut tentunya juga berpengaruh pada indikator lainnya seperti inflasi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan IPM.

Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Adapun beberapa Indikator Makro Kabupaten Sigi sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang ideal. Selama kurun waktu tahun 2024 s/d 2025, perkembangan IPM kabupaten Sigi selalu meningkat. Saat ini nilai IPM Kabupaten Sigi sudah berada pada kelas/kategori IPM tinggi (diatas 70), IPM Kabupaten Sigi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari angka 70,90 pada tahun 2024 menjadi 71,68 pada tahun 2025.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut

umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Nilai IPM Kabupaten Sigi sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, seluruh komponen IPM, baik komponen kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita mengalami kenaikan.

2. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi pusat perhatian Pemerintah Kabupaten Sigi, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan selalu menyertakan upaya pengentasan kemiskinan di dalamnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Secara umum, persentase penduduk miskin di kabupaten Sigi Tahun 2025 (10,47%) menurun 1,59 poin dibandingkan dengan tahun 2024 (12,06%) dan berada di peringkat 5 (lima) terendah dari 13 kabupaten/kota se-provinsi sulawesi tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh ketimpangan akses antarwilayah sehingga Arah pembangunan diarahkan untuk penguatan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi) dengan prioritas wilayah rentan

dan integrasi program pengurangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sigi. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sigi pada tahun 2025 (2,30%) menurun dibandingkan dengan tahun 2024 (2,55%) dimana Penduduk usia kerja pada Tahun 2025 sebanyak 204.303 jiwa, turun sebanyak 3.251 jiwa jika dibanding dengan tahun 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 155.330 jiwa, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 48.973 jiwa.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada tahun 2025, secara total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi mengalami pertumbuhan (3,91%), dibandingkan dengan tahun 2024 (3,50%). dengan pertumbuhan yang terjadi pada setiap lapangan usaha tidak terdapat lapangan usaha yang tumbuh diatas 10%; Terdapat 8 Lapangan usaha yang tumbuh dengan klasfikasi pertumbuhan ekonomi sedang, yaitu Pengadaan listrik dan gas; Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Komunikasi; Jasa Perusahaan; Real Estate dan Jasa Lainnya.

Sedangkan 9 lapangan usaha lainnya berada pada pertumbuhan dibawah 5%. Lapangan Usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang; Konstruksi; Jasa Keuangan dan Asuransi;

Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

5. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sigi atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai 48,69 juta rupiah atau rata rata setiap bulannya masyarakat sigi akan memiliki penghasilan sekitar 4,02 juta rupiah. Namun sayangnya angka ini bukan berarti setiap masyarakat sigi memiliki penghasilan 4,02 juta rupiah setiap bulannya, karena terdapat ketimpangan antara penduduk rural dan urban. Sehingga, penghasilan tersebut bisa jadi dikuasai oleh beberapa persen kelompok masyarakat saja.

6. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2025, nilai Gini Ratio sebesar (0,252) dibandingkan dengan Gini Ratio pada tahun 2024 sebesar (0,246). Hal ini menunjukkan ada ketimpangan pendapatan antara kelompok desil atas dan desil bawah akan tetapi ketimpangan pendapatan di kabupaten sigi masih di kategorikan ketimpangan rendah. Perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menekan angka ketimpangan pendapatan, karena pada tahun dimana gini ratio naik sedikit saja, kemiskinan akan naik drastis.

Adapun kondisi sosial ekonomi Kabupaten Sigi di tahun 2025, 2026 dan 2027 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Sigi Tahun 2025, Perkiraan Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

URAIAN	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027
Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp.)	13589,21	13500,0 – 14000,00	14000,00–14500,00
PDRB atas dasar harga Konstan (Juta Rp.)	7425,48	8000,00 – 8500,00	8500,00 – 9000,00
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp.)	48,69	50,31 - 54,79	50,62 - 55,10
PDRB perkapita atas dasar harga konstan (Juta Rp.)	26,60	29,18	29,20 - 29,69
Pertumbuhan PDRB (%)	3,91	4,64 - 4,69	5,18 - 5,23
Kontribusi PDRB Kabupaten	3,27	4,22	4,58
Indikator Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan (%)	10,47	10,47 - 10,97	9,94 - 10,44
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	26.03	28.000 - 28.500	28.500 - 29.000
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,77	2,40 - 2,45	2,35 - 2,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,44	0,60 - 0,70	0,55 - 0,60
Garis Kemisikinan (Rp)	474.669	500.000 - 525.000	525.000 - 550.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,30	2,37	2,35
Jumlah Penganggur	3.889	3.300 - 3.400	3.300 - 3.400
Gini Rasio	0,252	0,239 - 0,234	0,233 - 0,228
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,68	72,65 - 73,15	73,80 - 74,30
Angka Harapan Hidup	71,63	72,05	72,41 - 72,50
Rata-rata Lama Sekolah	9,05	9,05	9,07 - 9,10
Harapan Lama Sekolah	13,30	13,29	13,37 - 14,00
Pengeluaran perkapita (Ribu Rp.)	9.659	9.750 - 10.000	9.850 - 10.000
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik (Rumah Sakit) (%)	85,2	88,00 - 89,00	88,00 - 89,00

Sumber: BPS; (data diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Reformasi anggaran dengan pendekatan *New Publik Management* meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari anggaran tradisional (*traditional budget*) ke anggaran berbasis kinerja (*performance budget*).

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah secara lebih spesifik diarahkan, sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja *(performance oriented)* untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
2. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
3. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah *(work better and cost less)*;
4. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, serta pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian fungsi anggaran

dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh penting dalam pelaporan keuangan antara lain:

1. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah;
2. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
3. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;
4. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah dan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diketahui bahwa struktur APBD menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang meliputi:

1) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2) Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;
3) Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan keuangan daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, pendanaan melalui APBD Provinsi, kolaborasi APBD kabupaten/kota, Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

Adapun kebijakan nasional yang signifikan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2027 antara lain yaitu adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi

Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan adaptif terhadap perkembangan daerah. Selain itu, Pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan rasio pendapatan lebih tinggi, serta menjaga APBD tetap sehat, efisien, dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Sigi, selain berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pendapatan daerah juga mengacu pada :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Derah dan Retribusi Daerah;
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali berbagai potensi sumberdaya penerimaan secara optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bermakna bahwa Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan desentralisasi/penyerahan urusan pemerintah melalui otonomi daerah, maka kebijakan umum pemerintah daerah berdasarkan undang-undang telah menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sigi adalah

bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Sigi Tahun 2024 s.d Tahun 2027

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TA.2024 (audited)	REALISASI TA.2025 (audited)	TAHUN 2026	Proyeksi/Target Pada Tahun 2027
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.410.150.504.679**	**1.189.888.414.790**	**1.140.088.875.709**	**1.147.167.062.392**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**84.824.192.278**	**100.945.078.154**	**98.848.695.588**	**102.202.976.729**
4.1.01	Pajak Daerah	35.118.053.979	44.393.219.166	48.809.795.588	48.336.771.329
4.1.02	Retribusi Daerah	3.039.618.382	2.022.512.540	2.258.600.000	2.085.905.400
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.092.871.872	2.337.214.390	2.000.000.000	2.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.573.648.045	52.192.132.058	45.780.300.000	49.780.300.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.309.724.872.946**	**1.068.727.289.085**	**1.020.305.745.097**	**1.020.305.745.097**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.256.834.631.489	1.008.552.587.476	962.543.321.000	962.543.321.000
4.2.01.05	Dana Desa	154.494.636.326	119.034.921.766	52.251.471.000	52.251.471.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	31.841.897.000	21.514.135.000	0	0
4.2.01.07	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	117.419.602.500	62.560.154.084	29.311.289.000	29.311.289.000
4.2.01.08	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	655.819.930.339	633.151.507.541	633.052.310.000	633.052.310.000
4.2.01.09	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	297.258.565.324	172.291.869.085	247.928.251.000	247.928.251.000
4.2.01.09.001	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	144.946.300.321	16.091.875.982	57.644.057.000	57.644.057.000
4.2.01.09.002	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	152.312.265.003	156.199.993.103	190.284.194.000	190.284.194.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.890.241.457	60.174.701.609	57.762.424.097	57.762.424.097
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.790.241.457	59.974.701.609	57.762.424.097	57.762.424.097
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	100.000.000	200.000.000	0	0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**15.601.439.455**	**20.216.047.551**	**20.934.435.024**	**24.658.340.566**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.601.439.455	20.216.047.551	20.934.435.024	24.658.340.566

Sumber : BKAD Kab.Sigi

A. Pendapatan Daerah

Dengan melihat capaian kinerja pendapatan daerah pada tahun 2024 dan 2025 diharapkan tetap tumbuh dan positif di tahun 2026. Adapun target kinerja pendapatan daerah tahun 2027 diharapkan dapat mendukung dan menjaga APBD tetap sehat, efisien dan efektif. Maka ditargetkan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp.1.147.167.062.392 dijabarkan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya untuk usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi sebagai salah satu sumber pembebanan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi, diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan PAD di Kabupaten Sigi antara lain adalah :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
2) Mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3) Menyusun regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perubahan ketentuan perundang-undangan;
4) Mengoptimalkan pendaftaran dan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
5) Mengoptimalkan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
6) Mengoptimalkan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

Pendapatan Asli Daerah di tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp.98.848.695.588 dan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.102.202.976.729,00.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari 2 (dua) komponen yang terdiri dari : 1) Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum: Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus: DAK

Fisik dan DAK Non Fisik); Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa; 2) Dana Transfer Antar Daerah yang meliputi: Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer di tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp.1.020.305.745.097,00 dan pada tahun 2027 diproyeksikan tetap sebesar Rp.1.020.305.745.097,00.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Pendapatan lain-lain. Secara umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari 1). Dana Darurat; 2). Dana Hibah; 3). Lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari tabel diatas menunjukan bahwa proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2026 adalah sebesar Rp.20.934.435.024,00 dan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.24.658.340.566.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dalam APBD ditujukan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2027 diarahkan pada belanja yang berkualitas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, antara lain:

1. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya Pemenuhan mandatory spending, dukungan pencapaian target pembangunan, serta dukungan pada program prioritas nasional;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan operasional;
3. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;

4. Pengembangan kepariwisataan yang berbasis ekowisata, budaya, dan kearifan lokal yang terintegrasi;
5. Memenuhi usulan pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang dan Pokok–pokok Pikiran DPRD dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
6. Meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran penerima program daerah melalui pemanfaatan DTSEN;
7. Memenuhi pelaksanaan program daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow program* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan warna baru sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada kedua Undang-Undang tersebut, lebih-lebih dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada prisipnya bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Aturan pokok tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :

1. Asas Tahunan;
2. Asas universalitas;
3. Asas kesatuan;
4. Asas spesialitas;
5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
6. Profesionalitas;
7. Proporsionalitas;
8. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; dan
9. Pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi :

1. Penyusunan dan penetapan APBD

Anggaran sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan daerah merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan

dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. APBD sebagai instrumen kebijakan ekonomi, berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan APBD

   Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari Rancangan APBD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat prognosis untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

   Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas, diaudit oleh lembaga independen (dalam hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi masih dijumpai kendala-kendala sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah belum seluruhnya diterbitkan;
2. Kurang tersedianya sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan;
3. Belum optimalnya sinkronisasi jadwal penyusunan antara APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten;

4. Adanya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi, sementara pemerintah Kabupaten tidak diberitahu berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya;
5. Keuangan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dengan persentase PAD sangat kecil terhadap APBD.

Dengan melihat kendala di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan modifikasi dan penyesuaian dengan peraturan yang baru;
2. Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
3. Mengikuti pelatihan dan *workshop* mengenai perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis;
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi (OPD) untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 sebesar Rp.1.157.791.262.710, dan pada Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.1.140.088.875.709, dijabarkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 s.d Tahun 2027

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TA.2024 (audited)	REALISASI TA.2025 (audited)	TAHUN 2026	Proyeksi/Target Pada Tahun 2027
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**	**1.441.015.456.141**	**1.205.322.078.915**	**1.157.791.262.710**	**1.140.088.875.709**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.005.345.704.315**	**941.434.290.728**	**951.836.980.995**	**959.957.251.603**
5.1.01	Belanja Pegawai	547.590.556.019	580.775.450.926	700.534.516.134	697.564.696.977
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.749.475.902	331.752.728.829	232.905.699.661	202.357.272.826
5.1.04	Belanja Subsidi	2.450.817.950	2.199.945.127	50.000.000	681.466.800
5.1.05	Belanja Hibah	69.417.912.244	26.547.165.846	18.346.765.200	59.269.815.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.136.942.200	159.000.000	0	84.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**203.993.787.011**	**65.925.778.300**	**79.064.855.856**	**53.242.198.247**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	982.534.000	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.566.114.816	21.994.787.775	53.483.742.256	27.101.814.294
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.896.098.558	18.544.762.809	6.193.454.110	13.050.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.114.695.523	19.453.774.146	16.400.095.490	11.640.383.953
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.170.359.809	5.743.677.970	2.937.564.000	1.450.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	263.984.305	188.775.600	50.000.000	0
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.912.745.909**	**4.944.688.400**	**3.400.000.000**	**3.400.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.912.745.909	4.944.688.400	3.400.000.000	3.400.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**227.763.218.906**	**193.017.321.488**	**123.489.425.859**	**123.489.425.859**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.124.684.980	4.977.492.764	5.106.839.559	5.106.839.559
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	224.638.533.926	188.039.828.724	118.382.586.300	118.382.586.300

Sumber : BKAD Kab.Sigi

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi daerah), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan daerah lain yang diperlukan.

Adapun Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sigi
Tahun 2024 s.d Tahun 2027

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TA.2024 (audited)	REALISASI TA.2025 (audited)	TAHUN 2026	Proyeksi/Target Pada Tahun 2027
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**69.965.831.452**	**39.112.019.643**	**17.702.387.000**	**3.000.000.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**69.965.831.452**	**39.112.019.643**	**17.702.387.000**	**0**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.965.831.452	39.112.019.643	17.702.387.000	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	3.000.000.000

Sumber : BKAD Kab.Sigi

A. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran berbasis kinerja memungkinkan penyusunan APBD defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja. Sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibanding dengan belanja. Untuk menutup defisit dan untuk menyalurkan surplus anggaran dibutuhkan pembiayaan. APBD Tahun Anggaran 2025-2029 diproyeksikan akan mengalami defisit kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang akibat adanya upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Sigi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi masih menempatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebagai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk belanja penyertaan modal dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan kepada masyarakat Kabupaten Sigi saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan strategi pembiayaan dimaksud, maka kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan untuk:

1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai indikator sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dalam kaitan ini penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah yang bersifat stimulan, dan untuk swasta/masyarakat didorong melalui kerangka regulasi yang kondusif;
2. Mengarahkan pembiayaan program kegiatan yang tidak tumpang tindih melalui pemilahan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan melaksanakan pendanaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta perkiraan kapasitas masing-masing instansi/OPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan untuk mencapai indikator – indikator yang telah ditetapkan, dengan demikian pelaksanaan pembangunan dapat selesai sesuai rencana dengan meminimalkan dana yang tidak terserap.

3. Mengutamakan pembiayaan program, kegiatan yang strategis dan cepat tumbuh, berkembang sehingga dengan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan.

3.2.4 Alternatif Kebijakan Pendanaan Non-APBD

Selain pendanaan dari APBD, pembangunan daerah juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non-APBD Kabupaten Sigi, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, CSR, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Govermental Organization* (NGO) sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Dalam rangka perencanaan pembangunan Kabupaten Sigi, selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana tugas pembantuan serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota.

b. APBD Provinsi

   Dalam hal Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi. sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

c. Corporate Social Responsibility (CSR)

   Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,

norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP merupakan sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. TJSLP dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber kolaborasi pendanaan pembangunan yang potensial untuk dioptimalkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

d. Pendanaan Non-Pemerintah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Govermental Organization (NGO)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Govermental Organization (NGO) dapat berperan sebagai co-funding partner bersama pemerintah daerah dalam berbagai sektor prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan. LSM atau NGO juga berkontribusi melalui dana hibah atau bantuan dari nasional maupun internasional sehingga menjadi sumber pendanaan pembangunan tambahan bagi pemerintah daerah.

Beberapa LSM atau NGO yang telah menginisiasi kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi diantaranya yaitu:

Tabel. 3.5 Mitra Pembangunan Daerah

NO	MITRA PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI
1	KARSA INSTITUTE	Fasilitasi Serial Training dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas dan Good Agricultural Practices (GAP)	Kec. Lindu (Puro'o dan Tomado)
2	JB COCOA	Program Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Pertanian Kakao Berkelanjutan Berbasis Komunitas	- Kecamatan Palolo: Desa Sigimpu, Bobo, Kapiroe, Petimbe, Makmur, Bunga, Rahmat, Kulawi, Karunia, Sejahtera, Uenuni, Banpres, Tongoa '- Nokilalaki: Bulili, Sopu, Kamarora A, Kamarora B, Kadidia

NO	MITRA PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI
3	MERCY CORPS Indonesia	Mengelola Risiko Melalui Pengembangan Ekonomi (M-RED)	- Kec.Kulawi 1. Salua2. Namo3. Bolapapu4. Boladangko5. Toro6. Matau - Dolo Selatan1. Sambo2. Wisolo3. Balongga4. Poi5. Pulu6. Walatana7. Bangga
4	PERKUMPULAN IMUNITAS	Penguatan Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati	Desa Lonca dan Tangkulowi
5	ECONESIA	Pendampingan kelembagaan kelompok petani Kopi Arabika	Marawola Barat (Lewara, Dombu, Soi, Ongulero, Panasibaja, Lemosiranindi, Matantimali
		Aksi iklim melalui FOLU Net Sink, melalui aktivitas rehab DAS dan lahan kritis.	Dolo Selatan (Pulu, Rogo, Bulubete, Baluase, Walatana, Bangga).
6	ADRA INDONESIA	Creating Carbon Sinks and Green Community Livelihoods / Membangun Penyerapan Karbon dan Mata Pencaharian Berkelanjutan bagi Masyarakat	Marawola Barat
7	YAYASAN SHEEP Indonesia	Membangun ketangguhan masyarakat dalam mengurangi dampak risiko bencana dan perubahan iklim berbasis lanskapral Practices (GAP)	- Kec. Dolo Selatan : Bangga, Rogo - Kec. Sigi Biromaru : Sidondo II - Kec. Tanambulava : Sibalaya Barat - Kec. Marawola : Beka
8	GAMPIRI INTERAKSI	Program inkubasi usaha dan pengembangan kapasitas kepemudaan (GIAT 3.0)	Kec. Lindu (Puro'o dan Tomado)
		Inkubasi Koperasi	Kec. Sigi Biromaru (Ngata Baru dan Pombewe) Kec. Dolo Selatan (Ramba dan Wisolo), Kec. Dolo Barat (Pesaku dan Rarampadende)

NO	MITRA PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI
9	GAMPIRI BUMI LESTARI	Peningkatan Produksi & Produktivitas serta Penyerapan Komoditi Unggulan Kopi dan Vanili	- Marawola Barat : Dombu, Lewara, Soi, Wayu - Palolo : Bunga, Bobo, Rejeki, Lembantongoa - Sigi Biromaru : Pombewe - Dolo Selatan : Bangga, Walatana - Gumbasa : Tuva - Lindu : Puro'o, Olu - Kulawi : Lonca, Toro, Boladangko - Kulawi Selatan : Pilimakujawa - Pipikoro : Lonebasa, Onu
10	ADAPTATION FUND	Adaptasi Perubahan Iklim (Adaptation Fund)	- Gumbasa : Bangga, Pandere, Pakuli Utara - Dolo Selatan : Sambo, Simoro, Wisolo
11	Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)	Verifikasi wilayah adat dan pendampingan penguatan tata kelola wilayah adat dan hutan adat	- Kec. Lindu : Puro'0, Langko, Tomado, Anca - Kec. Kulawi : Lonca - Kec. Kinovaro : Lewara - Kec. Sigi Biromaru : Sigi Biromaru - Kec. Gumbas : Bangga - Kec. Dolo Selatan : Walatana, Wisolo
12	GIZ	Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (SOLUSI)	- Lindu : Puro'o, Tomado - Sigi Biromaru : Loru, Ngatabaru
		Forests and Climate Change (FORCLIME)	- Kec.Lindu : Puro'o, Langko, Tomado, Anca, Olu - Kec.Palolo : Bakubakulu - Kec.Kulawi : Salua

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sigi Tahun 2027 sebagai penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang hendak dicapai pada tahun rencana, sedangkan prioritas pembangunan merupakan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjawab isu strategis, permasalahan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan target kinerja Tahun 2027.

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 mengacu pada RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, sedangkan target tahunannya mempertimbangkan target RPJMD dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025. Dengan dasar tersebut, prioritas pembangunan RKPD Tahun 2027 disusun agar terukur, dapat dikendalikan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 memperhatikan tema RKP Tahun 2027, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri, serta tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas, dan Kualitas SDM. Pada tingkat daerah, arah tersebut diterjemahkan melalui tema RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027, yaitu Penguatan SDM dan Transformasi Tata Kelola Pemerintah Daerah untuk Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah.

Prioritas pembangunan Tahun 2027 dirumuskan melalui kerangka penilaian yang mempertimbangkan kesesuaian dengan sasaran RPJMD, urgensi permasalahan, hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2025, daya ungkit terhadap sasaran pembangunan, kewenangan daerah, kesiapan implementasi, kemampuan fiskal, sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi, serta manfaat langsung bagi masyarakat.

Bab ini menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan, program prioritas, rencana kerja dan pendanaan, serta target kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah Tahun 2027. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan diharapkan memastikan pelaksanaan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 berjalan konsisten, terarah, terukur, dan berkontribusi terhadap pencapaian visi Kabupaten Sigi yang maju dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 merupakan kerangka kinerja tahunan yang menunjukkan kondisi pembangunan yang hendak dicapai pada tahun rencana. Rumusan tujuan dan sasaran tersebut mengacu pada RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, target tahunan, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 menerjemahkan arah pembangunan jangka menengah ke dalam sasaran, prioritas, arah kebijakan, program prioritas, serta rencana kerja dan pendanaan tahunan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 tidak disusun sebagai rumusan baru yang berdiri sendiri, melainkan menggunakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Konsistensi antara tujuan dan sasaran RKPD dengan RPJMD diperlukan untuk memastikan kesinambungan pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu “Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan, Berbasis Pertanian dan Pariwisata.” Dengan konsistensi tersebut, setiap prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan program prioritas Tahun 2027 dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dan sasaran Tahun 2027 mengacu pada target tahunan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2025, perkembangan kondisi pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 menjadi dasar pengendalian pembangunan agar program dan kegiatan perangkat daerah tetap berorientasi pada hasil, terukur, dan selaras dengan target pembangunan daerah.

4.1.1 Kedudukan Tujuan dan Sasaran RKPD dalam RPJMD

Tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 berkedudukan sebagai penjabaran tahunan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Rumusan tersebut wajib mengacu pada RPJMD, sehingga tidak disusun sebagai rumusan baru yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kesinambungan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan target pembangunan jangka menengah daerah.

Kedudukan tersebut penting karena RKPD menjembatani arah pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan. RKPD Tahun 2027 harus menjaga konsistensi substansi perencanaan, baik dari sisi tujuan dan sasaran, indikator kinerja, target tahunan, arah kebijakan, prioritas pembangunan, maupun program prioritas daerah. Konsistensi ini diperlukan agar seluruh perangkat daerah memiliki arah kerja yang sama dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Dengan mengacu pada RPJMD, tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 menjadi kerangka kinerja tahunan yang menunjukkan kondisi pembangunan yang hendak dicapai. Target Tahun 2027 ditetapkan dengan memperhatikan target tahunan RPJMD, hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2025, isu strategis daerah, kemampuan keuangan daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 menjadi dasar pengendalian agar program dan kegiatan perangkat daerah tetap berorientasi pada hasil.

4.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2027

Tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027

berdasarkan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
MISI 1	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan				
	(1.1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas		Indeks infrastruktur daerah	0,67	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas	1. Indeks Kemantapan Jalan	0,39	Pekerjaan Umum
			2. Indeks Kemantapan Irigasi	0,69	
			3. Indeks Akses Air Minum	0,76	
			4. Indeks Akses Sanitasi	0,83	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	72,54	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	56,24	Perhubungan
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,28	Komunikasi dan Informatika
MISI 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera				
	(2.1) Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	73,80-74,30	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	1. Skor Literasi	70	Pendidikan
			2. Skor Numerasi	60,5	
			3. Rata-rata Lama Sekolah	9,07	
			4. Harapan Lama Sekolah	13,37	
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,5	Perpustakaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	72,41	Kesehatan
			2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	24	
			3. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	97	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
	(2.2) Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,42	
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	
		Meningkatnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,50-63,60	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	85,5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	65	Kepemudaan dan Olahraga
			2. Indeks Partisipasi Olahraga	0,51	
	(2.3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		1. Tingkat Kemiskinan	10,47-10,97	
			2. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,35	
			3. Indeks Gini Rasio	0,233-0,228	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	72,43	Sosial
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,49	Pangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Penduduk Bekerja	0,75	Tenaga Kerja
		Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Pendapatan Perkapita di Kawasan transmigrasi	5,9	Transmigrasi
MISI 3	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata				
	(3.1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah		1. Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	5,18-5,23	
			2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEB)	18,15	
			3. Indeks Ekonomi Hijau (IEH)	75,01	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	1. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	39,95	Pertanian
			2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	1,01	Pariwisata
			3. PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	0,67	
			4. Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	4,5	Perindustrian
			5. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,33	Perdagangan
		Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	1. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	21,37	Koperasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
			2. Rasio Kewirausahaan Daerah	0,028	Usaha Kecil dan Mikro
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	60	Penanaman Modal
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,53	Unsur Keuangan (Pendapatan Daerah)
MISI 4	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial				
	(4.1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,75	
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,42	Lingkungan Hidup
		Menurunnya intensitas emisi GRK menuju Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission)	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	31	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
			2. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	709986,93	
			3. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	33,29	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani	1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	43,4	
			2. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	14,03	
		Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan	Rasio ketaatan terhadap RTRW	0,08	Tata Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	50,7	Pertanahan
	(4.2) Meningkatkan Keamanan Daerah dan ketahanan bencana serta perubahan iklim		1. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64	
			2. Indeks Risiko Bencana	152,14	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	85,39	Satpol PP
		Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,51	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
	(4.3)				

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
	Meningkatkan harmoni sosial		Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	75,75	
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	50,7	Kebudayaan
MISI 5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif				
	(5.1) Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat		1. Indeks Reformasi Birokrasi	74,07	
			2. Indeks Inovasi Daerah (IID)	44,15	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Indeks Pelayanan Publik	3,73-3,79	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi, Bagian PBJ dan Bagian Tata Pemerintahan)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
			2. Indeks Reformasi Hukum	89,59	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			3. Nilai SAKIP	BB	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			4. Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			5. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,43	Unsur Sekretariat Daerah
		Meningkatnya tata kelola berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,65	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah	B	Kearsipan
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	74,86	Unsur Kepegawaian

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD*	96,91	Unsur Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Baik	Unsur Perencanaan
		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,15	Statistik
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	85	Unsur Penelitian & Pengembangan
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	2,90	Unsur Keuangan (UMKM)
			2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,42	Unsur Keuangan (BKAD)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Urusan/Perangkat Daerah Pengampu
			3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2,42	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,39	Unsur Pengawasan
		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	84	Unsur Kesbangpol

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah, penentuan program prioritas RKPD Tahun 2027, serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaannya, target tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2025 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap arah pencapaian RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2027 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan dirumuskan bukan sebagai daftar kegiatan sektoral, melainkan sebagai hasil penajaman sasaran pembangunan, target indikator, evaluasi capaian, isu strategis, tema pembangunan, arah kebijakan, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun rencana.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2027 diarahkan untuk memastikan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 menjadi instrumen tahunan yang menghubungkan target jangka menengah RPJMD dengan program prioritas, rencana kerja perangkat daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Setiap prioritas pembangunan perlu memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran RPJMD, indikator kinerja tujuan dan sasaran, tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan, serta program prioritas daerah.

4.2.1 Metode dan Alur Perumusan Fokus dan Prioritas Pembangunan

Perumusan fokus pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 dilakukan melalui proses teknokratis berbasis kinerja. Proses ini memastikan prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan data, hasil evaluasi, isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta keselarasan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Fokus pembangunan berfungsi sebagai jembatan antara sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dengan prioritas pembangunan dan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Metode perumusan fokus pembangunan dilakukan dengan menelaah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, target indikator Tahun 2027, hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2025, permasalahan dan isu strategis daerah, tema RKP Tahun 2027, tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027, tema RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027, telaah aspirasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah diuraikan pada Bab II, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi tujuan, sasaran, indikator, dan target Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Kedua, penelaahan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 untuk melihat capaian, deviasi target, efektivitas program, serta kebutuhan penguatan intervensi. Ketiga, penajaman permasalahan dan isu strategis daerah yang memiliki urgensi, daya ungkit, dan dampak luas bagi masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, terutama terhadap tema RKP Tahun 2027 dan tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027. Sinkronisasi ini memastikan bahwa fokus pembangunan Kabupaten Sigi tidak hanya menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda pembangunan nasional dan provinsi sesuai kewenangan, potensi, serta karakteristik daerah.

Tahap berikutnya adalah penilaian dan penentuan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap sasaran RPJMD, urgensi permasalahan, deviasi capaian kinerja, daya ungkit, kewenangan daerah, kesiapan implementasi, kemampuan fiskal, sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi, serta manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui kerangka tersebut, fokus pembangunan Tahun 2027 dirumuskan secara selektif agar prioritas yang ditetapkan bersifat strategis, realistis, dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Hasil proses tersebut menjadi dasar dalam menetapkan fokus pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027, merumuskan prioritas pembangunan daerah, dan menentukan program prioritas RKPD Tahun 2027. Dengan demikian, fokus dan prioritas pembangunan Tahun 2027 tidak ditetapkan semata-mata berdasarkan daftar program sektoral, melainkan melalui analisis yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.2

Metode dan Alur Perumusan Fokus Pembangunan

Tahapan	Sumber/Dasar Analisis	Substansi yang Ditelaah	Hasil Analisis	Implikasi terhadap Fokus Pembangunan 2027
1	RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	Visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, target tahun 2027, penahapan pembangunan, arah kebijakan, dan program prioritas daerah	Teridentifikasi sasaran dan indikator tahun 2027 sebagai dasar RKPD	Fokus pembangunan diarahkan agar selaras dengan target tujuan dan sasaran RPJMD
2	Evaluasi RKPD Tahun 2025	Realisasi indikator tujuan dan sasaran, deviasi target, efektivitas program, kendala pelaksanaan, serta capaian output dan outcome program	Teridentifikasi capaian yang perlu dipertahankan, dipercepat, atau diperkuat	Sasaran dengan capaian yang belum optimal atau berdampak besar menjadi kandidat fokus pembangunan
3	Permasalahan dan isu strategis daerah	Isu layanan dasar, infrastruktur, SDM, ekonomi daerah, pertanian, pariwisata, lingkungan hidup, bencana, tata ruang, tata kelola, dan harmoni sosial	Teridentifikasi isu pembangunan yang memiliki urgensi tinggi dan berdampak langsung kepada masyarakat	Isu strategis menjadi dasar penajaman fokus pembangunan
4	RKP Tahun 2027	Tema RKP 2027, produktivitas, investasi, industri, sasaran pembangunan, prioritas nasional, dan pengarusutamaan pembangunan	Teridentifikasi agenda nasional yang selaras dengan kebutuhan dan kewenangan daerah	Fokus pembangunan Kabupaten Sigi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan berkualitas, produktivitas, investasi, industri, SDM, infrastruktur, dan keberlanjutan
5	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027	Akselerasi pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan melalui mobilitas investasi dan kualitas SDM	Teridentifikasi arah provinsi yang relevan dengan Kabupaten Sigi	Fokus pembangunan daerah mendukung investasi, kualitas SDM, pertumbuhan

Tahapan	Sumber/Dasar Analisis	Substansi yang Ditelaah	Hasil Analisis	Implikasi terhadap Fokus Pembangunan 2027
				berkualitas, dan keberlanjutan
6	Tema RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027	Penguatan SDM dan transformasi tata kelola pemerintahan daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah	Teridentifikasi dua pengungkit utama, yaitu SDM dan tata kelola, serta daya saing daerah sebagai orientasi hasil	Fokus pembangunan diarahkan untuk memperkuat SDM, tata kelola, infrastruktur, ekonomi unggulan, pariwisata, dan keberlanjutan
7	Telaah aspirasi dan pokok-pokok pikiran DPRD	Aspirasi masyarakat, kebutuhan wilayah, usulan layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan	Teridentifikasi aspirasi yang sesuai kewenangan dan mendukung sasaran pembangunan	Aspirasi yang relevan menjadi pertimbangan dalam penajaman fokus dan prioritas
8	Kemampuan penyelenggaraan daerah	Kewenangan daerah, kesiapan perangkat daerah, ketersediaan data, kesiapan lokasi, kapasitas kelembagaan, kemampuan fiskal, dan potensi dukungan non-APBD	Teridentifikasi fokus yang layak dilaksanakan dan dapat didukung oleh perangkat daerah	Fokus pembangunan dipilih berdasarkan kelayakan implementasi, bukan hanya kebutuhan normatif
9	Kerangka penilaian dan penentuan prioritas pembangunan	Urgensi, daya ungkit, deviasi capaian, dampak bagi masyarakat, kesesuaian RPJMD, sinkronisasi nasional-provinsi, kesiapan implementasi, dan kemampuan pendanaan	Terpilih bidang pembangunan yang memiliki urgensi tinggi, daya ungkit kuat, dan kontribusi langsung terhadap sasaran RPJMD	Fokus pembangunan ditetapkan sebagai dasar rumusan prioritas pembangunan daerah
10	Perumusan prioritas pembangunan daerah	Hasil seleksi fokus pembangunan	Fokus pembangunan dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan daerah	Prioritas pembangunan menjadi dasar penyusunan program prioritas RKPD

Tahapan	Sumber/Dasar Analisis	Substansi yang Ditelaah	Hasil Analisis	Implikasi terhadap Fokus Pembangunan 2027
11	Penentuan program prioritas RKPD Tahun 2027	Sasaran RPJMD, fokus pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan evaluasi efektivitas program	Teridentifikasi program prioritas yang mendukung sasaran dan prioritas pembangunan	Program prioritas menjadi dasar Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan

Sumber: Hasil analisis Bapperida Kabupaten Sigi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.

Berdasarkan alur tersebut, fokus pembangunan Tahun 2027 dirumuskan sebagai hasil penajaman sasaran RPJMD, evaluasi capaian kinerja, isu strategis daerah, sinkronisasi kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus pembangunan tersebut menjadi dasar logis dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai fokus penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sigi Tahun 2027.

4.2.2 Sinkronisasi Tema Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Sinkronisasi tema pembangunan dilakukan untuk memastikan bahwa RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 menjadi penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 sekaligus mendukung arah pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kewenangan, potensi, dan kebutuhan daerah.

Tema RKP Nasional Tahun 2027	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027	Tema RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027
"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri"	**"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas dan Kualitas SDM"**	**"Penguatan SDM dan Transformasi Tata Kelola Pemerintah Daerah untuk Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah"**

Tabel 4.3
Sinkronisasi Tema Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Level Perencanaan	Tema Tahun 2027	Kata Kunci Strategis	Relevansi bagi Kabupaten Sigi	Penyesuaian dalam RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027
Nasional-RKP Tahun 2027	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Produktivitas, investasi, industri, SDM, transformasi digital, infrastruktur, keberlanjutan	Kabupaten Sigi perlu memperkuat produktivitas sektor unggulan, kesiapan investasi, nilai tambah produk lokal, kualitas SDM, tata kelola, dan infrastruktur dasar	Penguatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi daerah, tata kelola, dan layanan dasar
Provinsi Sulawesi Tengah-RKPD Provinsi Tahun 2027	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi dan Kualitas SDM	Pertumbuhan berkualitas, keberlanjutan, mobilitas investasi, kualitas SDM	Kabupaten Sigi berperan mendukung pertumbuhan wilayah melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, UMKM, konektivitas, investasi, kualitas SDM, dan lingkungan	Penguatan SDM, peningkatan iklim investasi daerah, konektivitas wilayah, produktivitas sektor unggulan, pariwisata berkelanjutan, dan ketahanan lingkungan

Level Perencanaan	Tema Tahun 2027	Kata Kunci Strategis	Relevansi bagi Kabupaten Sigi	Penyesuaian dalam RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027
Kabupaten Sigi-RKPD Kabupaten Tahun 2027	Penguatan SDM dan Transformasi Tata Kelola Pemerintah Daerah untuk Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	SDM, tata kelola, daya saing, pertanian, pariwisata, infrastruktur, lingkungan, inovasi	Tema kabupaten merupakan penyesuaian arah nasional dan provinsi sesuai karakteristik daerah sesuai visi RPJMD Kabupaten Sigi	Prioritas diarahkan pada SDM, tata kelola, infrastruktur dasar, produktivitas sektor unggulan, pariwisata berkelanjutan, lingkungan, bencana, dan harmoni sosial

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, Rancangan Awal RKP Tahun 2027, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.

4.2.3 Sinkronisasi Prioritas Nasional, 9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi

Sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 dilakukan secara berjenjang untuk memastikan keterhubungan antara agenda pembangunan nasional, arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, serta mandat pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Sinkronisasi ini tidak dimaksudkan untuk menyusun prioritas baru di luar dokumen perencanaan daerah, melainkan untuk menunjukkan kesesuaian substantif antara prioritas nasional, 9 Program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi, isu strategis daerah, prioritas RKPD, serta program dan kegiatan perangkat daerah.

Pada tingkat nasional, RKP Tahun 2027 menjadi kerangka makro pembangunan yang mengarahkan agenda pembangunan pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Arah tersebut diterjemahkan melalui Prioritas Nasional dan Fokus Pembangunan Nasional yang menjadi rujukan sinkronisasi pembangunan daerah. Pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, arah pembangunan tersebut dijabarkan melalui 9 Program BERANI sebagai agenda strategis provinsi. Sementara itu, pada tingkat Kabupaten Sigi, arah nasional dan provinsi diterjemahkan melalui tema RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027, prioritas pembangunan daerah, serta 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi yang telah dilembagakan dalam RPJMD.

Dengan demikian, kedudukan 9 Program BERANI dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi dalam RKPD Tahun 2027 adalah sebagai instrumen sinkronisasi dan penajaman prioritas. Keduanya tidak menggantikan struktur prioritas RKPD, tetapi menjadi alat untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah memiliki keterhubungan yang jelas dengan agenda nasional, agenda provinsi, mandat RPJMD, dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sigi.

4.2.3.1 Kedudukan Agenda Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, agenda nasional, agenda provinsi, dan agenda kabupaten memiliki kedudukan yang berbeda tetapi saling terhubung. RKP Tahun 2027 menjadi rujukan sinkronisasi vertikal yang memuat Prioritas Nasional dan Fokus Pembangunan Nasional. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 dan 9 Program BERANI menjadi rujukan sinkronisasi provinsi yang perlu diperhatikan sesuai kewenangan dan karakteristik Kabupaten Sigi. Adapun RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi menjadi dasar utama perumusan tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program prioritas, serta rencana kerja dan pendanaan daerah. Kedudukan tersebut dapat dipahami sebagai berikut.

Tabel 4.4

Kedudukan Agenda Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
dalam RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027

Level Perencanaan	Agenda/Dokumen	Kedudukan dalam RKPD Tahun 2027	Fungsi dalam Pemetaan
Nasional	RKP Tahun 2027, Prioritas Nasional, dan Fokus Pembangunan Nasional	Kerangka sinkronisasi vertikal tertinggi	Menunjukkan kontribusi Kabupaten Sigi terhadap sasaran dan fokus pembangunan nasional sesuai kewenangan daerah
Provinsi	RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 dan 9 Program BERANI	Kerangka sinkronisasi provinsi	Menunjukkan dukungan Kabupaten Sigi terhadap agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Level Perencanaan	Agenda/Dokumen	Kedudukan dalam RKPD Tahun 2027	Fungsi dalam Pemetaan
Kabupaten Jangka Menengah	RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029, visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, target, dan 10 Program Unggulan	Mandat utama pembangunan daerah	Menjadi dasar utama perumusan tujuan, sasaran, indikator, prioritas, dan program RKPD
Kabupaten Tahunan	RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027	Penjabaran tahunan RPJMD	Menetapkan prioritas pembangunan tahunan berdasarkan RPJMD, evaluasi RKPD, isu strategis, kemampuan fiskal, dan sinkronisasi kebijakan
Operasional	Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan SIPD	Instrumen pelaksanaan dan penganggaran	Menurunkan prioritas ke dalam program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, pagu, dan sumber pendanaan

Sumber: Hasil analisis Bapperida Kabupaten Sigi, 2026.

Dalam pemetaan ini, 9 Program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah diposisikan sebagai agenda sinkronisasi provinsi, meliputi Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Makmur, Berani Harmoni, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Berkah, dan Berani Berintegritas. Sementara itu, 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi diposisikan sebagai mandat pembangunan daerah yang perlu diterjemahkan ke dalam prioritas RKPD dan program perangkat daerah, yaitu:

1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas
2. Akses Air Bersih, Perumahan Layak dan Layanan Publik untuk Masyarakat Kurang Mampu
3. Seragam Gratis bagi Siswa Baru dari Masyarakat Kurang Mampu, serta Peningkatan Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang Terintegrasi
4. Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM yang Berdaya Saing, termasuk Bantuan Permodalan dan KUR 0 persen
5. Penerapan Infrastruktur Hijau dan Mitigasi Bencana

6. Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Pendidikan Formal dan Nonformal, serta Layanan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan
7. Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Sosial bagi Petani, Lembaga Adat, Majelis Adat, Dewan Adat, dan Masyarakat Kurang Mampu
8. Pengembangan Pariwisata, Kebun Raya, dan Ruang Terbuka Hijau
9. Penerapan Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan
10. Peningkatan Harmoni Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kesepuluh Program Unggulan tersebut tidak seluruhnya berdiri sebagai nomenklatur program perangkat daerah. Dalam RKPD, Program Unggulan diposisikan sebagai agenda kebijakan yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai nomenklatur SIPD, kewenangan perangkat daerah, target kinerja, lokasi, dan kemampuan pendanaan. Untuk keperluan pemetaan, Program Unggulan Kabupaten Sigi selanjutnya disingkat PUG.

4.2.3.2 Matriks Sinkronisasi Nasional-Provinsi-Kabupaten

Sinkronisasi nasional, provinsi, dan kabupaten dilakukan dengan prinsip keterhubungan berjenjang. Prioritas Nasional dan Fokus Pembangunan Nasional menjadi kerangka awal. Selanjutnya, agenda tersebut diselaraskan dengan 9 Program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi, isu strategis Kabupaten Sigi Tahun 2027, prioritas RKPD Kabupaten Sigi, serta program prioritas perangkat daerah.

Pemetaan ini bersifat hubungan banyak-ke-banyak (many-to-many), yaitu satu Prioritas Nasional dapat didukung oleh lebih dari satu Program BERANI, lebih dari satu Program Unggulan Kabupaten Sigi, dan lebih dari satu prioritas RKPD. Sebaliknya, satu Program Unggulan Kabupaten Sigi juga dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional dan Program BERANI. Oleh karena itu, pemetaan tidak dibaca sebagai hubungan satu baris satu pasangan, tetapi sebagai hubungan dukungan substantif antaragenda pembangunan.

Tabel 4.5
Matriks Sinkronisasi Prioritas Nasional, 9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi Tahun 2027

No.	Prioritas Nasional/Fokus Nasional Terkait	9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah yang Relevan	10 Program Unggulan Kabupaten Sigi yang Relevan	Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027	Bentuk Dukungan Kabupaten Sigi
1	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Fokus terkait: digitalisasi dan efisiensi tata kelola; regulasi dan kelembagaan/hukum.	Berani Harmoni, Berani Berintegritas	PUG 9: Penerapan Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan; PUG 10: Peningkatan Harmoni Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data, digital, dan inovasi; penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial	Penguatan SAKIP, SPBE, SIPD, Satu Data, pengawasan, komunikasi publik, penguatan ideologi Pancasila, kewaspadaan nasional, pencegahan konflik sosial, serta partisipasi masyarakat
2	PN 2: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Fokus terkait: swasembada pangan, energi, dan air; stimulus produktivitas dan daya beli; hilirisasi SDA strategis; infrastruktur dan konektivitas ekonomi.	Berani Sejahtera, Berani Makmur, Berani Menyala	PUG 2: Akses Air Bersih dan Perumahan Layak; PUG 4: Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM; PUG 5: Infrastruktur Hijau dan Mitigasi Bencana; PUG 7: Perlindungan Sosial Petani dan Masyarakat Kurang Mampu; PUG 9: Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan	Penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan; peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar; penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial	Peningkatan produksi pangan lokal, penguatan prasarana pertanian, irigasi, air bersih, perikanan darat, konservasi kawasan hulu/DAS, pengelolaan lingkungan, pengurangan emisi GRK, serta dukungan koordinatif terhadap agenda energi

No.	Prioritas Nasional/Fokus Nasional Terkait	9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah yang Relevan	10 Program Unggulan Kabupaten Sigi yang Relevan	Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027	Bentuk Dukungan Kabupaten Sigi
3	PN 3: Pengembangan infrastruktur, lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, agromaritim industri, dan koperasi. Fokus terkait: infrastruktur dan konektivitas ekonomi; efisiensi investasi; investasi berorientasi industri dan ekspor; industri nasional.	Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur	PUG 1: Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas; PUG 2: Air Bersih dan Perumahan Layak; PUG 4: Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM; PUG 8: Pariwisata, Kebun Raya, dan RTH; PUG 9: Teknologi Bisnis dan Pemerintahan	Peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar; penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan; pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, RTH, dan identitas budaya lokal	Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, permukiman, transportasi, akses kawasan produksi dan wisata, penguatan UMKM, koperasi, IKM, ekonomi kreatif, dan promosi investasi daerah
4	PN 4: Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pemuda, olahraga, perempuan, dan penyandang disabilitas. Fokus terkait: kualitas SDM, tenaga kerja produktif, dan inovasi; stimulus produktivitas dan daya beli; digitalisasi tata kelola.	Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera	PUG 3: Seragam Gratis dan Sarana Pendidikan-Kesehatan Terintegrasi; PUG 6: Pengembangan SDM, Pelatihan, Pendidikan, dan Beasiswa; PUG 7: Perlindungan Sosial; PUG 9: Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan	Penguatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial yang inklusif; transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data, digital, dan inovasi	Penguatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan, literasi dan numerasi, pelatihan kerja, beasiswa, perlindungan sosial, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pemuda, olahraga, dan layanan berbasis data

No.	Prioritas Nasional/Fokus Nasional Terkait	9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah yang Relevan	10 Program Unggulan Kabupaten Sigi yang Relevan	Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027	Bentuk Dukungan Kabupaten Sigi
5	PN 5: Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Fokus terkait: investasi berorientasi industri dan ekspor; industri nasional; hilirisasi SDA strategis.	Berani Makmur, Berani Sejahtera, Berani Berkah	PUG 4: Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM Berdaya Saing; PUG 8: Pariwisata, Kebun Raya, dan RTH; PUG 9: Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan; PUG 10: Harmoni Sosial dan Partisipasi	Penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan; pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, RTH, dan identitas budaya lokal	Hilirisasi sederhana komoditas lokal, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan mutu dan standar produk, penguatan IKM, UMKM, koperasi, perdagangan, ekonomi kreatif, promosi investasi, dan penggunaan produk dalam negeri
6	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Fokus terkait: stimulus produktivitas dan daya beli; infrastruktur dan konektivitas ekonomi; inovasi pembiayaan pembangunan; swasembada pangan, energi, dan air.	Berani Sejahter, Berani Makmur, Berani Lancar, Berani Berkah	PUG 2: Air Bersih, Perumahan Layak, dan Layanan Publik untuk Masyarakat Kurang Mampu; PUG 4: Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM; PUG 6: Pengembangan SDM; PUG 7: Perlindungan Sosial; PUG 8: Pariwisata dan RTH; PUG 9: Teknologi Bisnis dan Pemerintahan	Penguatan kualitas SDM dan perlindungan sosial inklusif; peningkatan konektivitas wilayah; penguatan produktivitas sektor unggulan; pengembangan pariwisata berkelanjutan; penguatan ketahanan lingkungan dan harmoni sosial	Pemberdayaan desa, perlindungan sosial adaptif, pengurangan kemiskinan, bantuan ekonomi produktif, pelatihan kerja, penguatan kelompok usaha, akses layanan dasar, konektivitas desa, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal

No.	Prioritas Nasional/Fokus Nasional Terkait	9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah yang Relevan	10 Program Unggulan Kabupaten Sigi yang Relevan	Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027	Bentuk Dukungan Kabupaten Sigi
7	PN 7: Reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Fokus terkait: digitalisasi dan efisiensi tata kelola; regulasi dan kelembagaan/hukum; inovasi pembiayaan pembangunan.	Berani Berintegritas	PUG 9: Penerapan Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan; PUG 10: Harmoni Sosial dan Partisipasi Masyarakat	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data, digital, dan inovasi	Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, SAKIP, SPBE, SIPD, pengawasan internal, pengelolaan keuangan dan aset, statistik sektoral, riset-inovasi, pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja
8	PN 8: Memperkuat harmoni kehidupan dengan lingkungan alam dan budaya, toleransi antarumat beragama, serta ketahanan iklim dan bencana. Fokus terkait: regulasi dan kelembagaan; infrastruktur dan konektivitas ekonomi; inovasi pembiayaan pembangunan; swasembada pangan, energi, dan air.	Berani Harmoni, Berani Berkah, Berani Sejahtera	PUG 1: Infrastruktur dan Aksesibilitas; PUG 2: Air Bersih dan Perumahan Layak; PUG 5: Infrastruktur Hijau dan Mitigasi Bencana; PUG 7: Perlindungan Sosial; PUG 8: Pariwisata, Kebun Raya, dan RTH; PUG 10: Harmoni Sosial dan Partisipasi	Pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, RTH, dan identitas budaya lokal; penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial; peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar	Konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, pengurangan emisi, mitigasi bencana, pemulihan pascabencana, penataan ruang, RTH, kebudayaan, kesenian, cagar budaya, kerukunan umat beragama, ketenteraman, dan partisipasi masyarakat

Sumber: Dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027, RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, Evaluasi RKPD Tahun 2025, dan Rumusan Isu Strategis RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027.

Berdasarkan matriks tersebut, dukungan Kabupaten Sigi terhadap agenda nasional dan provinsi dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola utama. Pertama, dukungan langsung melalui kewenangan kabupaten, terutama pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, pangan, pertanian, perikanan, koperasi dan UMKM, pariwisata, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban umum, komunikasi dan informatika, statistik, perencanaan, pengawasan, keuangan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Kedua, dukungan koordinatif terhadap agenda yang menjadi kewenangan pusat atau provinsi, seperti energi, proyek strategis berskala besar, industri strategis, serta pembiayaan investasi berskala besar. Ketiga, dukungan lintas sektor melalui penguatan data, perencanaan, penandaan program, kolaborasi pendanaan, dan pengendalian kinerja.

Dalam RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027, pemetaan tersebut menunjukkan bahwa 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi memiliki keterhubungan dengan Prioritas Nasional dan 9 Program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah. Keterhubungan tersebut perlu diterjemahkan secara operasional ke dalam program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, pagu, perangkat daerah pengampu, dan sumber pendanaan agar dapat dikendalikan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2027.

4.2.3.3 Implikasi terhadap Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027

Hasil sinkronisasi Prioritas Nasional, 9 BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi memberikan implikasi terhadap penyusunan prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027.

1. Pertama, prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 tetap ditempatkan sebagai penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Dengan demikian, 9 BERANI dan 10 Program Unggulan tidak menggantikan struktur prioritas RKPD, melainkan menjadi instrumen untuk memperkuat sinkronisasi, memperjelas kontribusi daerah, dan menajamkan dukungan program perangkat daerah terhadap agenda nasional dan provinsi.
2. Kedua, setiap prioritas RKPD perlu diberi penandaan (tagging) terhadap Prioritas Nasional, Fokus Pembangunan Nasional, Program BERANI, Program Unggulan Kabupaten Sigi, isu strategis daerah, dan indikator

kinerja terkait. Penandaan ini diperlukan agar keterhubungan antara agenda makro dan program perangkat daerah dapat ditelusuri secara jelas pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

3. Ketiga, penajaman program perangkat daerah perlu memperhatikan kewenangan kabupaten. Agenda nasional dan provinsi yang menjadi kewenangan langsung kabupaten dapat diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Sementara itu, agenda yang bukan kewenangan langsung kabupaten diposisikan sebagai dukungan koordinatif melalui fasilitasi, penyediaan data, usulan lokasi, kesiapan dokumen teknis, dukungan masyarakat, atau kolaborasi pendanaan.
4. Keempat, sinkronisasi ini menegaskan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 diarahkan pada enam kelompok prioritas utama, yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial yang inklusif; transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data, digital, dan inovasi; peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar; penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, koperasi, dan investasi; pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, ruang terbuka hijau, dan identitas budaya lokal; serta penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial.
5. Kelima, hasil pemetaan ini menjadi dasar penajaman Bab V RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027. Pada Bab V, program prioritas diturunkan secara lebih rinci ke dalam kegiatan, subkegiatan, indikator keluaran, target, lokasi, pagu indikatif, sumber pendanaan, dan perangkat daerah pengampu. Dengan demikian, dukungan terhadap Prioritas Nasional, 9 BERANI, dan 10 Program Unggulan tidak berhenti pada narasi sinkronisasi, tetapi tercermin dalam struktur rencana kerja dan pendanaan.
6. Keenam, pemetaan ini menjadi dasar pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2027. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, 9 BERANI, dan Program Unggulan Kabupaten Sigi memiliki indikator yang terukur, penerima manfaat yang jelas, lokasi yang dapat diverifikasi, serta keluaran yang berkontribusi

terhadap sasaran RKPD dan target RPJMD. Dengan pendekatan tersebut, RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 diharapkan tidak hanya memenuhi aspek keselarasan dokumen, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian pembangunan yang berbasis kinerja, responsif terhadap isu strategis daerah, serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

4.2.4 Fokus Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027

Berdasarkan hasil sinkronisasi Prioritas Nasional, Fokus Pembangunan Nasional, 9 Program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi, hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, serta rumusan isu strategis daerah, fokus pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 diarahkan pada bidang pembangunan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran RPJMD, daya ungkit terhadap penyelesaian permasalahan daerah, dan kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Fokus pembangunan Tahun 2027 tidak dimaksudkan sebagai daftar sektor secara administratif, tetapi sebagai hasil penapisan terhadap kebutuhan pembangunan yang paling mendesak, memiliki daya ungkit, berada dalam kewenangan daerah, memiliki kesiapan implementasi, serta realistis terhadap kemampuan fiskal dan peluang dukungan pendanaan kolaboratif. Dengan pendekatan tersebut, fokus pembangunan menjadi jembatan antara sasaran RPJMD, tema RKPD, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan, dan program prioritas perangkat daerah.

Tabel 4.6

Fokus Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027

No.	Fokus Pembangunan Tahun 2027	Dasar Pertimbangan Utama	Keterkaitan dengan Misi RPJMD	Sasaran RPJMD yang Didukung	Arah Hasil yang Diharapkan
1	Penguatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial yang inklusif	Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan IPM, kemiskinan, dan TPT, tetapi pemerataan layanan dasar, stunting, kelompok rentan,	Misi 2	Sasaran pendidikan, kesehatan, literasi, keluarga berkualitas, perlindungan sosial, ketahanan pangan, desa, pemuda,	Meningkatnya akses dan mutu layanan dasar, perlindungan sosial adaptif, kualitas keluarga, kapasitas

No.	Fokus Pembangunan Tahun 2027	Dasar Pertimbangan Utama	Keterkaitan dengan Misi RPJMD	Sasaran RPJMD yang Didukung	Arah Hasil yang Diharapkan
		dan akses wilayah terpencil masih memerlukan penguatan.		olahraga, dan tenaga kerja.	pemuda, dan produktivitas tenaga kerja.
2	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data, digital, dan inovasi	Penurunan indikator reformasi birokrasi dan inovasi daerah menuntut penguatan SAKIP, SPBE, Satu Data, statistik sektoral, pengawasan, dan pelayanan publik.	Misi 5	Sasaran tata kelola pemerintahan, SPBE, perencanaan, statistik, riset-inovasi, keuangan, aset, pengawasan, dan profesionalitas ASN.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, kualitas layanan publik, integrasi data, inovasi daerah, efektivitas pengendalian, dan perencanaan berbasis bukti.
3	Peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Daerah menurun dan kebutuhan akses jalan, irigasi, air minum, sanitasi, hunian layak, akses produksi, akses layanan dasar, dan akses destinasi wisata masih tinggi.	Misi 1	Sasaran infrastruktur dasar, hunian layak, transportasi, dan layanan publik berbasis digital.	Meningkatnya akses jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, hunian layak, transportasi, akses digital, dan konektivitas kawasan strategis.
4	Penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, koperasi, dan investasi	Kontribusi industri pengolahan masih rendah, sedangkan visi daerah menempatkan pertanian dan pariwisata sebagai basis daya saing.	Misi 3	Sasaran PDRB sektor unggulan, koperasi dan UMKM, investasi, pendapatan daerah, dan produktivitas ekonomi sektoral.	Meningkatnya produktivitas, pascapanen, mutu produk, hilirisasi sederhana, kelembagaan ekonomi, investasi produktif, dan akses pasar.
5	Pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, ruang terbuka hijau, dan identitas budaya lokal	Pariwisata dan budaya lokal menjadi basis visi daerah, membutuhkan penguatan destinasi, desa wisata, ekonomi	Misi 3 dan Misi 4	Sasaran pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan hidup, budaya maju, dan harmoni sosial.	Meningkatnya kualitas destinasi, desa wisata, promosi, ekonomi kreatif, ruang publik/RTH,

No.	Fokus Pembangunan Tahun 2027	Dasar Pertimbangan Utama	Keterkaitan dengan Misi RPJMD	Sasaran RPJMD yang Didukung	Arah Hasil yang Diharapkan
		kreatif, promosi, dan pelibatan masyarakat.			pelestarian budaya, dan manfaat ekonomi lokal.
6	Penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial	Kabupaten Sigi memiliki karakter ekologis dan kebencanaan yang kuat, sehingga pembangunan 2027 perlu mengintegrasikan mitigasi risiko, adaptasi iklim, tata ruang, dan kohesi sosial.	Misi 4	Sasaran keanekaragaman hayati, emisi GRK, persampahan, tata ruang, ketangguhan bencana, ketenteraman, budaya, dan kerukunan.	Meningkatnya kualitas lingkungan, kesiapsiagaan bencana, penataan ruang berkelanjutan, ketenteraman, kerukunan, dan harmoni sosial.

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, Rancangan Awal RKP Tahun 2027, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.

Berdasarkan tabel tersebut, fokus pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat dua pengungkit utama tema RKPD, yaitu kualitas sumber daya manusia dan transformasi tata kelola pemerintahan. Fokus tersebut tetap didukung oleh konektivitas wilayah, produktivitas sektor unggulan, pariwisata berkelanjutan, ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial. Dengan demikian, fokus pembangunan saling mendukung dalam satu rantai pencapaian sasaran RPJMD.

4.2.5 Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Fokus pembangunan tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Prioritas pembangunan merupakan konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun rencana, sehingga setiap prioritas perlu memiliki sasaran utama, arah intervensi, indikator kinerja terkait, dan perangkat daerah pengampu yang dapat ditelusuri ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan.

Sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, delapan isu strategis Kabupaten Sigi Tahun 2027, sinkronisasi nasional-provinsi-kabupaten, 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi, kemampuan fiskal, serta kesiapan implementasi perangkat daerah. Dengan pendekatan tersebut, prioritas pembangunan daerah tidak menjadi daftar kegiatan sektoral, tetapi menjadi instrumen pencapaian target pembangunan tahunan yang terukur.

Tabel 4.7
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2027

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran Utama yang Didukung	Arah Intervensi Utama	Indikator Tujuan/Sasaran Kinerja Terkait
1	Penguatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial yang inklusif	Meningkatnya pendidikan, kesehatan, literasi, keluarga berkualitas, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan desa, dan produktivitas tenaga kerja	Pendidikan, kesehatan, literasi, stunting, perlindungan sosial, keluarga berkualitas, GEDSI, perlindungan anak, pemuda, olahraga, ketahanan pangan, desa, dan pelatihan kerja	Indeks Pembangunan Manusia
				Skor Literasi
				Skor Numerasi
				Rata-rata Lama Sekolah
				Harapan Lama Sekolah
				Usia Harapan Hidup
				Angka Kematian Ibu (AKI)
				Prevalensi Stunting
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
				Tingkat Kemiskinan
				Tingkat Pengangguran Terbuka
				Indeks Ketahanan Pangan
				Indeks Desa
				Rasio Penduduk Bekerja
2	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data, digital, dan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, digital, akuntabel, inovatif, dan partisipatif	SAKIP, SPBE, SIPD, statistik sektoral, riset-inovasi, pengawasan, profesionalitas ASN, pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan publik, kearsipan, serta kualitas perencanaan	Indeks Reformasi Birokrasi
				Indeks Pelayanan Publik
				Indeks Reformasi Hukum
				Nilai SAKIP
				Indeks Kualitas Kebijakan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran Utama yang Didukung	Arah Intervensi Utama	Indikator Tujuan/Sasaran Kinerja Terkait
				Indeks SPBE
				Indeks Pembangunan Statistik
				Indeks Inovasi Daerah
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
				Indeks Pengelolaan Aset Daerah
				Maturitas SPIP
				Indeks Profesionalitas ASN
3	Peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar	Meningkatnya akses infrastruktur dasar, hunian layak, transportasi, dan layanan publik berbasis digital	Jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, RTLH, PSU, permukiman, transportasi, konektivitas wilayah produksi, akses destinasi wisata, dan jaringan digital	Indeks Infrastruktur Daerah
				Indeks Kemantapan Jalan
				Indeks Kemantapan Irigasi
				Indeks Akses Air Minum
				Indeks Akses Sanitasi
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan
				Rasio Konektivitas
				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	Penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, koperasi, dan investasi	Meningkatnya PDRB sektor unggulan, kontribusi koperasi dan UMKM, investasi, PAD, dan daya saing ekonomi sektoral	Sarana produksi, prasarana pertanian, penyuluhan, kesehatan hewan, peternakan, perikanan budidaya, UMKM, koperasi, perdagangan, pasar, promosi investasi, pengendalian inflasi, dan hilirisasi sederhana	Laju Pertumbuhan Ekonomi
				PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
				PDRB Sektor Industri Pengolahan
				PDRB Sektor Perdagangan
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran Utama yang Didukung	Arah Intervensi Utama	Indikator Tujuan/Sasaran Kinerja Terkait
				Rasio Kewirausahaan Daerah
				Persentase Peningkatan Investasi
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
				Indeks Daya Saing Daerah
				Indeks Ekonomi Biru Indonesia
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah
				Indeks Akses Keuangan Daerah
5	Pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, ruang terbuka hijau, dan identitas budaya lokal	Meningkatnya nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, budaya maju, ruang publik, dan pelibatan masyarakat lokal	Destinasi Lindu, Bora, Paralayang, desa wisata, promosi wisata, ekonomi kreatif, *event* daerah, RTH, seni budaya, sejarah lokal, dan pelibatan masyarakat	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
				PDRB Sektor Ekonomi Kreatif
				Indeks Pembangunan Kebudayaan
				Indekator kunjungan/destinasi sesuai renja PD
6	Penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketangguhan bencana, tata ruang berkelanjutan, ketenteraman, budaya, dan harmoni sosial	Konservasi, keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, pengurangan emisi, mitigasi bencana, pemulihan pascabencana, penataan ruang, ketenteraman, kerukunan, budaya, trantibumlinmas, dan harmoni sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Penurunan Intensitas Emisi GRK
				Persentase Penurunan Emisi GRK
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
				Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
				Rasio Ketaatan terhadap RTRW

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran Utama yang Didukung	Arah Intervensi Utama	Indikator Tujuan/Sasaran Kinerja Terkait
				Indeks Risiko Bencana
				Indeks Ketahanan Daerah
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
				Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, Rancangan Awal RKP Tahun 2027, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.

4.2.6 Keterkaitan Prioritas dengan Permasalahan, Isu Strategis, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 merupakan hasil penajaman terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, hasil evaluasi capaian pembangunan, isu strategis daerah, arah kebijakan tahunan, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, setiap prioritas pembangunan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran RPJMD, isu strategis yang hendak dijawab, arah kebijakan pembangunan, serta program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Keterkaitan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan Tahun 2027 tidak berdiri sebagai agenda sektoral yang terpisah, melainkan menjadi instrumen pencapaian target pembangunan daerah secara terukur. Dengan demikian, program prioritas yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027 harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, baik pada aspek sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, perekonomian, pariwisata, lingkungan hidup, kebencanaan, tata ruang, maupun harmoni sosial.

Penyajian keterkaitan prioritas dengan sasaran RPJMD, isu strategis, arah kebijakan, dan program prioritas juga dimaksudkan untuk memperkuat konsistensi antara Bab IV, Bab V, dan Bab VI. Bab IV menegaskan sasaran dan prioritas pembangunan, Bab V menguraikan rencana kerja dan pendanaan, sedangkan Bab VI menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 4.8

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2027 dengan Sasaran RPJMD, Isu Strategis, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Isu Strategis yang Dijawab	Arah Kebijakan Tahun 2027	Program Prioritas
1	Penguatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial yang inklusif	Meningkatnya pendidikan, kesehatan, literasi, keluarga berkualitas, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan desa, dan produktivitas tenaga kerja	Isu 1: kualitas SDM dan layanan dasar inklusif; Isu 7: GEDSI, perlindungan sosial adaptif, dan pekerja rentan; Isu 8: efektivitas belanja prioritas.	Memperluas akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan, kesehatan, literasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan desa, serta perlindungan kelompok rentan berbasis data terpilah.	• Program Pengelolaan Pendidikan; • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan; • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; • Program Pemberdayaan Sosial; • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; • Program Perlindungan Anak; • Program Administrasi Kependudukan; • Program Perpustakaan;

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Isu Strategis yang Dijawab	Arah Kebijakan Tahun 2027	Program Prioritas
					• Program Kepemudaan dan Olahraga;
					• Program Ketahanan Pangan;
					• Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
					• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data, digital, dan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, digital, akuntabel, inovatif, dan partisipatif	Isu 6: tata kelola berbasis data, kinerja, digitalisasi, dan partisipasi inklusif; Isu 8: kapasitas fiskal, efektivitas belanja, dan pembiayaan kolaboratif.	Memperkuat perencanaan-penganggaran berbasis kinerja, SAKIP, SPBE, Satu Data, statistik sektoral, riset-inovasi, pengawasan, keuangan dan aset, layanan publik, serta partisipasi masyarakat.	• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
					• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
					• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
					• Program Statistik Sektoral;
					• Program Persandian;
					• Program Kearsipan;
					• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Isu Strategis yang Dijawab	Arah Kebijakan Tahun 2027	Program Prioritas
					• Program Riset dan Inovasi Daerah;
					• Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
					• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
					• Program Penyelenggaraan Pengawasan;
					• Program Kepegawaian
					• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
					• Program Pengawasan Internal
					• Program Pengelolaan Aset Daerah;
					• Program Dukungan tugas DPRD;
					• Program Informasi dan Komunikasi Publik
3	Peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar	Meningkatnya akses infrastruktur dasar, hunian layak, transportasi, dan	Isu 2: pemulihan pascabencana dan ketahanan wilayah; Isu 3: pemerataan infrastruktur	Menajamkan pembangunan infrastruktur berdasarkan urgensi layanan dasar, konektivitas kawasan produksi	• Program Penyelenggaraan Jalan;
					• Program Pengelolaan Sumber Daya Air;

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Isu Strategis yang Dijawab	Arah Kebijakan Tahun 2027	Program Prioritas
		layanan publik berbasis digital	dasar dan konektivitas; Isu 5: ketahanan air dan lingkungan.	dan wisata, pemulihan wilayah terdampak, kesiapan lokasi/dokumen, dan kemampuan fiskal.	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; • Program Pengembangan Permukiman; • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; • Program Sarana, Prasarana, Utilitas Umum ; • Program Penataan Bangunan Gedung; • Program Infrastruktur Digital Pendukung Pelayanan Publik; • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Isu Strategis yang Dijawab	Arah Kebijakan Tahun 2027	Program Prioritas
4	Penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, koperasi, dan investasi	Meningkatnya PDRB sektor unggulan, kontribusi koperasi dan UMKM, investasi, PAD, dan daya saing ekonomi sektoral	Isu 4: transformasi ekonomi daerah berbasis produktivitas pertanian, UMKM, pariwisata, dan investasi; Isu 5: ketahanan pangan, air, lingkungan, dan rendah karbon; Isu 8: pembiayaan kolaboratif.	Meningkatkan produktivitas komoditas lokal, penyuluhan, prasarana pertanian, kesehatan hewan, perikanan darat, UMKM/koperasi, perdagangan, IKM, promosi investasi, pengendalian inflasi, dan nilai tambah produk.	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; • Program Penyuluhan Pertanian; • Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; • Program Pengembangan UMKM; • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; • Program Perdagangan; • Program Stabilisasi Harga; • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Isu Strategis yang Dijawab	Arah Kebijakan Tahun 2027	Program Prioritas
					• Program Promosi Penanaman Modal;
					• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
					• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
					• Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
					• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5	Pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, ruang terbuka hijau, dan identitas budaya lokal	Meningkatnya nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya maju	su 4: transformasi ekonomi daerah; Isu 5: lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon; Isu 7: pembangunan inklusif dan partisipatif; Isu 8: pembiayaan kolaboratif.	Mengembangkan destinasi wisata prioritas, desa wisata, promosi pariwisata, ekonomi kreatif, ruang terbuka hijau, seni, budaya, sejarah lokal, serta pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan	• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
					• Program Pemasaran Pariwisata;
					• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
					• Program Pengembangan Kebudayaan;
					• Program Pengembangan Kesenian Tradisional;

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Isu Strategis yang Dijawab	Arah Kebijakan Tahun 2027	Program Prioritas
					• Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
					• Program Lingkungan Hidup terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Daya Dukung Destinasi
6	Penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketangguhan bencana, tata ruang berkelanjutan, ketenteraman, ketertiban, dan harmoni sosial	Isu 2: pemulihan pascabencana dan ketahanan wilayah; Isu 5: ketahanan pangan, air, lingkungan hidup, dan rendah karbon; Isu 6: tata kelola data; Isu 7: inklusi; Isu 8: pembiayaan kolaboratif.	Mengintegrasikan konservasi, pengelolaan sampah, penurunan emisi, mitigasi bencana, pemulihan pascabencana, tata ruang, pertanahan, trantibumlinmas, kerukunan, budaya, dan pencegahan konflik.	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
					• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
					• Program Pengelolaan Persampahan;
					• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					• Program Penanggulangan Bencana;
					• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran;
					• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Isu Strategis yang Dijawab	Arah Kebijakan Tahun 2027	Program Prioritas
					• Program Pernataagunaan Tanah; • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; • Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; • Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, Rancangan Awal RKP Tahun 2027, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa satu prioritas pembangunan dapat menjawab lebih dari satu isu strategis. Sebaliknya, satu isu strategis dapat didukung oleh lebih dari satu prioritas pembangunan. Karena itu, proses pengendalian RKPD Tahun 2027 perlu menggunakan pendekatan penandaan isu, prioritas, program, lokasi, kelompok sasaran, indikator, dan sumber pendanaan agar keterhubungan antarbagian dokumen tetap terjaga sampai tahap pelaksanaan dan evaluasi.

4.2.7 Penajaman Program Prioritas Berdasarkan Kewenangan, Kesiapan, dan Kemampuan Fiskal

Program prioritas RKPD Tahun 2027 perlu ditajamkan agar tidak menjadi kompilasi seluruh program perangkat daerah. Penajaman dilakukan untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan sebagai prioritas benar-benar memiliki kontribusi terhadap sasaran RPJMD, menjawab isu strategis, mendukung Prioritas Nasional, 9 Program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi, serta dapat dilaksanakan sesuai kewenangan daerah, kesiapan perangkat daerah, dan kemampuan fiskal.

Penajaman program prioritas dilakukan melalui kriteria seleksi yang bersifat teknokratis. Kriteria tersebut digunakan untuk membedakan program yang menjadi prioritas inti, program pendukung, program yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi, dan program yang perlu dipersiapkan lebih lanjut karena belum memiliki kesiapan data, lokus, dokumen teknis, atau pendanaan.

Tabel 4.9

Kriteria Penajaman Program Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027

No.	Kriteria Penajaman	Penjelasan	Implikasi terhadap Program Prioritas
1	Kesesuaian dengan RPJMD dan target tahun 2027	Program harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap tujuan, sasaran, indikator, target, misi, dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi.	Program yang tidak memiliki kontribusi langsung/pendukung terhadap sasaran RPJMD tidak ditempatkan sebagai prioritas utama.
2	Kontribusi terhadap RKP 2027, 9 BERANI, dan 10 Program Unggulan	Program memiliki dukungan terhadap Prioritas Nasional, Fokus Pembangunan Nasional, agenda provinsi, dan mandat unggulan daerah.	Diberikan tagging PN-FP-BERANI-PUG agar kontribusi lintas level dapat ditelusuri.
3	Urgensi permasalahan dan hasil evaluasi	Program menjawab deviasi capaian, masalah layanan dasar, kesenjangan wilayah, bencana, kemiskinan, produktivitas, tata kelola, dan isu lingkungan.	Program yang menjawab masalah mendesak dan berdampak luas diprioritaskan.
4	Daya ungkit terhadap sasaran pembangunan	Program memiliki efek pengganda terhadap layanan dasar, produktivitas, konektivitas, pengurangan	Program dengan daya ungkit tinggi lebih diutamakan dibanding kegiatan yang sangat terfragmentasi.

No.	Kriteria Penajaman	Penjelasan	Implikasi terhadap Program Prioritas
		kemiskinan, investasi, dan ketahanan wilayah.	
5	Kewenangan daerah	Program berada dalam kewenangan kabupaten atau merupakan bentuk dukungan koordinatif yang jelas terhadap agenda pusat/provinsi.	Agenda di luar kewenangan kabupaten ditempatkan sebagai fasilitasi, koordinasi, penyediaan data, atau usulan dukungan.
6	Kesiapan implementasi	Memiliki kesiapan lokasi, data sasaran, dokumen teknis, kelembagaan, penerima manfaat, dan perangkat daerah pengampu.	Program yang belum siap dokumen/lokus ditempatkan sebagai persiapan atau dirancang bertahap.
7	Dukungan terhadap SPM dan layanan dasar	Program mendukung pemenuhan SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, trantibumlinmas, kebakaran, dan kebencanaan.	Program SPM dan layanan dasar menjadi prioritas belanja wajib sesuai kemampuan fiskal.
8	Dampak terhadap kelompok miskin/rentan dan GEDSI	Program memiliki penerima manfaat yang jelas, data terpilah, serta memperhatikan perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat, pekerja rentan, dan wilayah terpencil.	Program diarahkan lebih tepat sasaran dan tidak hanya berbasis keluaran fisik.
9	Kemampuan fiskal dan efisiensi belanja	Program realistis terhadap kapasitas pendanaan, mengurangi fragmentasi belanja, dan dapat dipadukan dengan sumber non-APBD.	Belanja diprioritaskan pada intervensi inti, multi-manfaat, dan dapat dikonsolidasikan.
10	Peluang pembiayaan kolaboratif	Program memungkinkan dukungan pusat, provinsi, desa, CSR, hibah, perguruan tinggi, dunia usaha, ecological funding, atau skema kolaboratif lain.	Program dengan kesiapan kolaborasi diperkuat melalui pemilahan kewenangan dan skema pendanaan.

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, Rancangan Awal RKP Tahun 2027, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.

Berdasarkan kriteria tersebut, program prioritas Tahun 2027 perlu diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk dukungan. Pertama, dukungan langsung, yaitu

program yang menjadi kewenangan kabupaten dan dapat dilaksanakan melalui APBD Kabupaten. Kedua, dukungan koordinatif, yaitu agenda yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, provinsi, desa, atau mitra non-pemerintah. Ketiga, dukungan persiapan, yaitu program yang belum sepenuhnya siap dilaksanakan tetapi perlu disiapkan melalui pemutakhiran data, studi teknis, dokumen perencanaan, penyiapan lokasi, atau penguatan kelembagaan.

Penajaman ini juga menjadi dasar untuk mengendalikan fragmentasi belanja. Program yang berskala kecil dan tersebar perlu dikonsolidasikan agar memberikan dampak lebih besar terhadap sasaran prioritas. Sementara itu, program yang terkait layanan dasar, SPM, pemulihan pascabencana, kelompok rentan, dan peningkatan produktivitas masyarakat perlu diberi perhatian lebih kuat karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

4.2.8 Program Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027

Program prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 merupakan instrumen operasional untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas pada Bab IV disajikan pada tingkat program strategis untuk menunjukkan kontribusi terhadap prioritas pembangunan, sasaran RPJMD, Prioritas Nasional, 9 Program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi. Rincian kegiatan, subkegiatan, indikator keluaran, target, lokasi, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan sumber pendanaan disajikan lebih lanjut pada Bab V.

Daftar program prioritas berikut disajikan sebagai kerangka awal penajaman. Nomenklatur program, perangkat daerah pengampu, indikator, target, pagu, dan lokus pelaksanaan tetap perlu disesuaikan dengan Renja Perangkat Daerah, SIPD, hasil desk perangkat daerah, serta kemampuan pendanaan Tahun 2027.

Tabel 4.10

Program Prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Kelompok Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Utama	*Tagging* Dukungan PN/BERANI/PUG
1	Penguatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial yang inklusif	Pengelolaan pendidikan; pendidik dan tenaga kependidikan; pemenuhan upaya kesehatan; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; perlindungan dan jaminan sosial; pemberdayaan sosial; pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; perlindungan perempuan; pemenuhan hak anak; perlindungan khusus anak; pengendalian penduduk; pembinaan KB; administrasi kependudukan; perpustakaan; kepemudaan dan olahraga; ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat dan desa; pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; DP3A; Dinas Dukcapil; Dinas Perpustakaan; Dispora; DKPP; DPMD; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	PN 4, PN 6; Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera; PUG 3, PUG 6, PUG 7.
2	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data, digital, dan inovasi	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; koordinasi dan sinkronisasi perencanaan; aplikasi informatika; informasi dan komunikasi publik; statistik sektoral; persandian; kearsipan; kepegawaian; pengembangan SDM aparatur; pengawasan internal; pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan barang milik daerah; penelitian	Bapperida; Diskominfo; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; BKPSDMD; Inspektorat; BKAD; Bapenda; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Kesbangpol.	PN 1, PN 7; Berani Berintegritas; PUG 9, PUG 10.

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Kelompok Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Utama	*Tagging* Dukungan PN/BERANI/PUG
		dan pengembangan daerah; dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.		
3	Peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar	Penyelenggaraan jalan; pengelolaan sumber daya air; pengembangan SPAM; pengembangan sistem air limbah; pengembangan permukiman; kawasan permukiman; perumahan dan kawasan kumuh; peningkatan PSU; penataan bangunan gedung; penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dukungan akses digital pelayanan publik.	Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; Diskominfo; perangkat daerah teknis terkait lokasi layanan dasar.	PN 2, PN 3, PN 6, PN 8; Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Sejahtera; PUG 1, PUG 2, PUG 5.
4	Penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, koperasi, dan investasi	Sarana pertanian; prasarana pertanian; penyuluhan pertanian; kesehatan hewan; perikanan budidaya; pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; pemberdayaan UMKM; pemberdayaan dan perlindungan koperasi; pengembangan UMKM; perdagangan; stabilisasi harga; penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; perencanaan dan pengembangan industri; pelayanan penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pengelolaan pendapatan daerah.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; DKPP; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; DPMPTSP; Bapenda; perangkat daerah teknis terkait.	PN 2, PN 3, PN 5, PN 6; Berani Makmur, Berani Sejahtera, Berani Berkah; PUG 4, PUG 7, PUG 9.

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Kelompok Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Utama	*Tagging* Dukungan PN/BERANI/PUG
5	Pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, ruang terbuka hijau, dan identitas budaya lokal	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata; pengembangan ekonomi kreatif; pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; pengembangan kebudayaan; pengembangan kesenian tradisional; pelestarian dan pengelolaan cagar budaya; dukungan lingkungan hidup dan RTH pada destinasi prioritas.	Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; DLH; DPMD; Dinas Koperasi dan UMKM; perangkat kecamatan/desa sesuai lokus destinasi.	PN 3, PN 5, PN 8; Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni; PUG 8, PUG 10, PUG 4.
6	Penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, tata ruang, dan harmoni sosial	Perencanaan lingkungan hidup; pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; pengelolaan keanekaragaman hayati; pengelolaan persampahan; penanggulangan bencana; pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non-kebakaran; penyelenggaraan penataan ruang; penatagunaan tanah; peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum; penguatan ideologi Pancasila; kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; kebudayaan.	DLH; BPBD; Satpol PP dan Damkar; Dinas PUPR/Tata Ruang; Bagian Pemerintahan/Pertanahan; Kesbangpol; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Sosial; perangkat kecamatan/desa.	PN 1, PN 2, PN 8; Berani Harmoni, Berani Sejahtera, Berani Berkah; PUG 5, PUG 8, PUG 10.

Sumber: Hasil analisis Bapperida Kabupaten Sigi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.

Berdasarkan tabel tersebut, program prioritas RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 dikelompokkan menurut enam prioritas pembangunan daerah. Setiap kelompok program perlu diturunkan dalam Bab V ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang memiliki indikator keluaran, target, lokasi, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan sumber pendanaan. Melalui pemetaan ini, dukungan terhadap 8 Prioritas Nasional, 9 Program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah, dan 10 Program Unggulan Kabupaten Sigi tidak berhenti pada level narasi, tetapi tercermin dalam rencana kerja dan pendanaan yang dapat dikendalikan.

Untuk menjaga konsistensi dokumen, setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 memiliki keterkaitan dengan prioritas RKPD, sasaran RPJMD, isu strategis daerah, indikator kinerja, lokasi prioritas, serta kemampuan fiskal. Program yang belum memiliki kesiapan implementasi perlu diarahkan sebagai kegiatan persiapan, pemutakhiran data, penguatan dokumen teknis, atau koordinasi lintas sumber pendanaan. Dengan demikian, Bab IV menjadi simpul penghubung antara kerangka sasaran dan prioritas pembangunan dengan Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan serta Bab VI Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD Tahun 2027. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Penentuan program dan kegiatan daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sigi pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2027 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sigi.

5.1. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2027 di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui http://sipd.kemendagri.go.id

Adapun pagu pendanaan RKPD 2027 diberikan kepada perangkat daerah dalam rangka mendukung skala prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	346.385.641.245
2	Dinas Kesehatan	118.817.593.114
3	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	87.842.358.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	29.328.130.026
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.759.281.999
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.365.115.753
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.015.683.795
8	Dinas Sosial	3.374.189.214
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.737.846.955
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.369.324.514
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4.757.997.863
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.316.699.675
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.944.784.807
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.309.125.013
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.084.932.027
16	Dinas Perhubungan	4.744.887.685
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.382.545.787
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.368.403.708
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.860.872.373
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	3.115.610.983
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.465.572.802
22	Dinas Pariwisata	5.423.204.571
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.829.553.991
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	8.446.571.776
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.103.631.319
26	Sekretariat Daerah Kab.Sigi	34.723.479.376
27	Sekretariat DPRD Kab.Sigi	23.300.536.229
28	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	3.555.625.895
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	359.111.352.755
30	Badan Pendapatan Daerah	12.040.913.241
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	4.659.390.250
32	Inspektorat Kab.Sigi	8.550.550.720

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
33	Kecamatan Dolo	1.901.661.089
34	Kecamatan Dolo Barat	1.857.156.510
35	Kecamatan Dolo Selatan	1.412.016.271
36	Kecamatan Kulawi Selatan	1.195.738.113
37	Kecamatan Kulawi	1.425.429.252
38	Kecamatan Lindu	928.145.252
39	Kecamatan Marawola	1.992.882.575
40	Kecamatan Marawola Barat	1.706.015.128
41	Kecamatan Kinovaro	1.747.937.439
42	Kecamatan Palolo	1.766.067.772
43	Kecamatan Nokilalaki	1.307.548.639
44	Kecamatan Tanambulava	1.567.068.290
45	Kecamatan Gumbasa	1.226.214.610
46	Kecamatan Pipikoro	1.526.941.729
47	Kecamatan Sigi Biromaru	1.684.647.354
48	Kecamatan Sigi Kota	1.367.225.688
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.384.772.537
JUMLAH		**1.140.088.875.709**

Sumber: (http://sipd.kemendagri.go.id)

Dari hasil rumusan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam tabel 5.1 selanjutnya secara konsisten dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang secara rinci tertuang dalam tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang termuat dalam lampiran Buku II RKPD 2027.

5.2. Target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Sigi, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten Sigi yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan sebagai urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 Kabupaten Sigi berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial adapun target capaian disajikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sigi Tahun 2027

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2027
Urusan Pendidikan			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	100%
		Rata rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2027
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		Rata rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD)	100%
Urusan Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2027
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus), Yang Bersifat Peningkatan/Promotif Dan Pencegahan/ Preventif	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
Urusan Pekerjaan Umum			
I	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**		
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2027
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	100%
Urusan Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat			
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2027
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
Urusan Sosial			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten /kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk mewujudkan pencapaian target-target prioritas pembangunan Kabupaten Sigi, telah dirumuskan program prioritas pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta target pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Daerah (IKD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas 4 (empat) aspek yakni: (1) aspek geografi dan aspek demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek daya saing daerah, dan (4) aspek pelayanan umum.

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Hal ini berdasarkan pada aspek dan fokus pada bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sigi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2027, maka ditetapkan target pada Indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah Kabupaten Sigi tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)
Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2027

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2027
1	*2*	*3*	*4*
I	**Peningkatan Pendapatan Perkapita**		
1	PDRB Perkapita (ADHB)	Rp. Juta	61,03-61,53
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEB)	Angka	18,15
3	Indeks Ekonomi Hijau (IEH)	Angka	75,01
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	2,03
II	**Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang**		
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,94-10,44
2	Rasio Gini	Angka	0,233-0,228
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	4,58
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,18-5,23
5	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	62,42
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,35
7	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	0,67
III	**Kepemimpinan dan Pengaruh di provinsi Meningkat**		
1	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	44,15
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,69
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	64,00
4	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	75,92
IV	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,80-74,30
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	75,75
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	81,00
V	**Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission**		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	82,75
2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	152,14

6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi tahun 2027. Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci

(IKK) terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)/ Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2027

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2027
I.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,09
2	Rasio Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)	**%**	105,32
3	Kepadatan Penduduk	Orang/km	53,58
4	Rasio ketaatan terhadap RTRW	Angka	0,08
5	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase	50,70
6	Angka Ketergantungan	**%**	51,04
7	Rasio Konektivitas	Angka	56,24
8	Indeks Desa	Persentase	18
9	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persentase	80,58
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,51
11	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	64,00
II.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
A	**Kesejahteraan Kesehatan**		
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,23
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,41
3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	97
4	Prevalensi Stunting	%	24,00
5	Cakupan penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	%	59,00
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)	%	65,00
7	Prevalensi Schistosomiasis	%	≤ 0,40
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Angka	98,80
9	Kabupaten Sehat (KS)	Predikat	Swasti Saba Padapa 51-60
10	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	84,36
11	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	34,07-40,19

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2027
12	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Orang per 1000 Penduduk	5,4 : 1000
13	Persentase Posyandu Aktif	%	85
14	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	Persentase	69,80
15	Presentase tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	Persentase	86,00
16	Persentase Desa ODF (Stop BABS)	Persentase	84,00
17	Prevalensi Schistomiasis	Persentase	≤ 0,40
18	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	9,00
19	Persentase Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15-19 Tahun	Persentase	37,76
B	**Kesejahteraan Pendidikan**		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,07
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37
3	Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Angka	98,56
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS):		
	- SD	Angka	99,13
	- SMP	Angka	93,42
5	Angka Literasi/Numerasi:		
	- Skor Kemampuan Literasi	Skor	70,00
	- Skor Kemampuan Numerasi	Skor	60,50
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	63,50
7	Angka Partisipasi Sekolah (7-18) kesetaraan (PAUD, SD, SMP)	Angka	48,16
8	Proporsi jumlah satuan PAUD Terakreditasi minimal B	Angka	67,64
9	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi s1/D4	Angka	36,53
10	Iklim inklusivitas	Angka	64,66
11	Iklim keamanan	Angka	72,50
12	Iklim kebinekaan	Angka	73,40
C	**Kesejahteraan Sosial**		
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,43
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,34
3	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Nindya
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,50-63,60
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	85,50
6	- Nilai Kesetaraan	Angka	70,50
7	- Nilai Toleransi	Angka	71,00
8	- Nilai Kerjasama	Angka	70,60
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	50,70

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2027
10	Indeks Partisipasi Olahraga	Angka	0,51
11	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	72,43
12	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	21,00
13	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,43
D	**Kesejahteraan Lingkungan dan Ekonomi**		
1	Kategori Penghargaan ADIPURA	Predikat/ Nilai	Setifikat 71
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	43,40
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	14,03
4	Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	%	31,00
5	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun (Ton CO2 eq)	Ton CO2 Eq	709.986,93
6	Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan	%	33,29
7	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,49
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,80
9	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	33,20
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	72,54
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,42
12	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	2,90
III.	**ASPEK DAYA SAING**		
A	**Ekonomi Makro**		
1	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp Juta	30,64
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	60
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,80
4	Tingkat Inflasi	%	4,80
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	7,53
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	250-300
7	Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	665
8	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	31000,00
B	**Ketenagakerjaan dan Produktivitas**		
1	Rasio Penduduk Bekerja	Angka	0,75
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	84,54
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5,83
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	95,00

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2027
5	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal, diusulkan untuk menggunakan proksi:	%	0,70
6	a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	5
7	b) Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Angka	N/A
8	Proporsi Penciptaan Lapangan kerja Formal	Angka	3,92
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	Angka	0,028
10	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persentase	72,00
11	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	24,00
12	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	21,37
13	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	56,92
14	Jumlah Koperasi Aktif	Angka	150
15	Jumlah UMKM Yang Memiliki NIB	Angka	7093
16	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Angka	Rp.5.916.722
C	**Inovasi dan Sektor Unggulan**		
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	0,28
2	Indeks Kemantapan Jalan	Angka	0,39
3	Indeks Kemantapan Irigasi	Angka	0,69
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	5,42
5	Indeks Akses Air Minum	Angka	0,76
6	Indeks Akses Sanitasi	Angka	0,83
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	6,96
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,67
9	PDRB Sektor Unggulan	%	72,21
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,43
11	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	%	4,50
12	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	%	0,50
13	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Milyar Rp)	Angka	39,50
14	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	39,95
15	1. NTP Pertanian	Angka	109,22
16	2. NTN Perikanan Tangkap	Angka	105,21

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2027
17	3. NTN Perikanan Budidaya	Angka	104,21
18	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	87,50
19	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	949,19
20	Angka Konsumsi Ikan	Ton	70,89
21	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	0,57
22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,33
23	Return on Asset (ROA) BLUD/BUMD	%	2,00
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
A	**Pelayanan Publik dan Elektronisasi**		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,65
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,73-3,79
3	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	65
4	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD*	Angka	96,91
5	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	Sangat Baik
6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	82,42
7	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	Angka	2,42
8	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP
9	Rasio PAD (Bapenda)	Persentase	7,53
10	Persentase Kepemilikan NPWP	Persentase	100,00
B	**Demokrasi, Hukum dan HAM**		
1	Persentase Penegakan Perda	%	66,15
2	Indeks Demokrasi Indonesia	%	84,00
3	Indeks Reformasi Hukum	Angka	89,59
4	Indeks Penyelengaraan Trantibumlinmas	Angka	85,39
5	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat	3,20 Baik
C	**Reformasi Birokrasi & Pengawasan**		
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,39
2	Persentase MCP KPK	%	66,32
3	Kapabilitas APIP	Level	3,33
4	Nilai Sakip	Predikat/ Angka	BB
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Daerah	Predikat	B
6	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	74,86
7	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	24,58
8	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	3
9	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Persentase	100

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2027
10	Persentase Rapat-Rapat yang Difasilitasi Tepat Waktu, Tepat Tindak Lanjut, dan Tepat Sasaran	Persentase	100
11	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Angka	3,43
12	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	85

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
I	**Pendidikan**		
1	Literasi Membaca	Angka	70
2	Numerasi	Angka	60,5
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	13,37
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	9,07
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	Angka	79,19
6	Angka Partisipasi Sekolah (7-15) (SD-SMP)	Angka	96,27
7	Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 tahun (Angka)	Angka	98,56
8	Persentase guru memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional	Persentase	68
II	**Kesehatan**		
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,41
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	97,00
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persentase	24,00
4	Insidensi TB	Per 100.000 Penduduk	231,00
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	98,80
6	Persentase Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	Persentase	65,00
7	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persentase	7,00
8	Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar	Persentase	82,20
9	Kabupaten Sehat (KS)	Angka	51-60
III	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	27,21
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	71,37
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase	77,09

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
	terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Angka	84,49
5	Rasio ketaatan terhadap RTRW	Angka	0,08
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Persentase	23,71
7	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	Persentase	155,58
8	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	71,77
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	6,96
10	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	100
11	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	100
12	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	100
13	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	100
14	Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang	Persentase	0,16
IV	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase	72,54
2	Persentase Pembangunan Baru dan atau Rehabilitasi serta Relokasi Program Pemerintah untuk Rumah Layak Huni Kabupaten Sigi	Persentase	10,75
3	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	22,76
V	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		
1	Indeks Penyelengaraan Trantibumlinmas	Angka	85,39
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	100,00
VI	**Sosial**		
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Angka	72,43
2	Persentase keluarga miskin yang meningkat ekonominya secara mandiri	Persentase	100

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
3	Persentase keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
4	Persentase Layanan Sosial bagi PPKS	Persentase	100
5	Persentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS	Persentase	100
VII	**Tenaga Kerja**		
1	Rasio penduduk bekerja	Rasio	0,75
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	Angka	66,47
3	Persentase Pekerja Informal	Persentase	78,32
4	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persentase	2,17
5	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	609
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	Persentase	0,74
VIII	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,43
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,34
3	Persentase keluarga yang memahami dan mendukung kesetaraan gender	Persentase	0,006
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	Persentase	0,0005
IX	**Pangan**		
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	82,49
2	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	Persentase	100,00
X	**Pertanahan**		
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	50,70
2	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase	24,54
XI	**Lingkungan Hidup**		
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Angka	0,42
2	Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	Persentase	31,00
3	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun (Ton CO2 eq)	Ton CO2 Eq	709.986,93
4	Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan	Persentase	33,29
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	43,40
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	14,03
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	45

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
8	Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi (km2)	Angka	0
9	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Angka	1
10	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	8300,00
11	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persentase	25,00
12	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	43,00
XII	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	85,50
2	Persentase anak berusia 0- 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	97,00
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta	Persentase	100,00
	perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase	72,00
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100,00
6	Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase	85,50
XIII	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
1	Indeks Desa	Persentase	18
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	57
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	75
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	60
5	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	60
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	75
7	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	75
XIV	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,50-63,60
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	64,00
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Persentase	2,28

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Angka	40,60
5	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/ Cara KB Modern	Persentase	81,60
6	Indeks Lansia Berdaya	Angka	63,90
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Angka	87,40
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	13,30
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	6,90
10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	63,68
XV	**Perhubungan**		
1	Rasio Konektivitas	Rasio	56,24
2	Konektivitas Darat	Persentase	56
3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	35
4	Konektivitas Sungai/Danau	Persentase	75
5	Jumlah retribusi sektor penyeberangan danau	Rupiah	100.000.000
XVI	**Komunikasi dan Informatika**		
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Angka	0,28
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,65
3	Persentase aplikasi umum SPBE digunakan Pemda	Persentase	65
4	Persentase Layanan Publik online dan terintegrasi	Persentase	65
XVII	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**		
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persentase	21,37
2	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persentase	2,84
3	Persentase Volume Usaha Koperasi (%)	Persentase	10,86
4	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha (%)	Persentase	23,72
XVIII	**Penanaman Modal**		
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persentase	60
2	Jumlah Investor Penanaman Modal Berskala Nasional (PMDM/PMA)	Angka	62
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	686.127.000.000
XIX	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	65
2	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Angka	0,51

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	20
4	Tingkat Pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	20
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase	4
6	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat(Nasional/Internasional)	Persentase	70
7	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	4
XX	**Statistik**		
1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	3
2	Persentase OPD menggunakan data statistik untuk perencanaan pembangunan	Persentase	65
3	Persentase OPD menggunakan data statistik untuk evaluasi pembangunan	Persentase	65
4	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persentase	35
XXI	**Persandian**		
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Tingkat keamanan informasi pemerintah (%))	Angka	1,50
2	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	1
XXII	**Kebudayaan**		
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	50,7
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	85
3	Persentase Kebudayaan Lokal yang dikembangkan	Persentase	85
4	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	Persentase	90
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan(%)	Persentase	100
XXIII	**Perpustakaan**		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	63,50
2	Persentase perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (NSP)	Persentase	27,50
XXIV	**Kearsipan**		
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Daerah	Predikat	B
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal	Persentase	62,00

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
	40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
XXV	**Kelautan dan Perikanan**		
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,21
2	Nilai Tukar Pembudidayaan Perikanan (NTPi)	Angka	104,21
XXVI	**Pariwisata**		
1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	Persentase	0,50
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persentase	0,67
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	250-300
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	20
XXVII	**Pertanian,Peternakan, dan Perkebunan**		
1	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Peternakan, perkebunan, perikanan	Persentase	39,95
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	102,8
3	a. NTP Tanaman Pangan	Angka	102,58
4	b. NTP Tanaman Hortikultura	Angka	99,61
5	c. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	Angka	102,43
6	d. NTP Peternakan	Angka	106,60
7	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Angka	37.256
8	Jumlah Populasi Ternak Kambing	Angka	22.626
9	Jumlah Populasi Ternak Babi	Angka	20.821
10	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Angka	3.505.934
11	Jumlah Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	52,81
12	Jumlah Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	43,45
13	Jumlah ProduktivitasBawang Merah (Ku/Ha)	Ku/Ha	42,65
14	Jumlah Produktivitas Cabai (Ku/Ha)	Ku/Ha	63,21
15	Jumlah Produktivitas Durian (Kg/Pohon)	Kg/Pohon	123,61
16	Jumlah Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	Kg/ha	968,76
17	Jumlah Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	Kg/ha	717,06
18	Jumlah Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	Kg/ha	445,7
XXVIII	**Perdagangan**		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	14,33
2	Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah	Persentase	100
3	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi (Unit)	Angka	3
XXIX	**Perindustrian**		
1	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase	4,50
2	Persentase Produk IKM yang Tersertifikasi	Persentase	18,00

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
3	Jumlah Produk Industri Pengolahan yang dipromosikan	Angka	119
XXX	**Transmigrasi**		
1	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Angka	Rp 5.916.722
2	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	20
3	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembangan	Persentase	20
4	Persentase Transmigran yang Dibina dan diberdayakan	Persentase	20
XXXI	**Perencanaan Pembangunan**		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	Sangat Baik
2	Persentase Keselarasan RPJPD dengan RPJMD	Persentase	100
XXXII	**Keuangan**		
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Persentase	2,42
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	82,42
3	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka	2,42
4	Penetapan APBD Tepat Waktu	Persentase	100
5	Persentase Dokumen dan Laporan penatausahaan administrasi keuangan daerah sesuai standar regulasi	Persentase	100
6	Persentase dokumen laporan dan pertanggungjawaban APBD tepat waktu sesuai regulasi	Persentase	100
7	Persentase Kepemilikan NPWP	Persentase	100
8	Persentase BMD yang termanfaatkan sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	Persentase	100
XXXIII	**Kepegawaian dan Diklat**		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	74,86
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	24,58
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Angka	74,86
4	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Angka	4,99
5	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Angka	24,23
XXXIV	**Riset dan Inovasi Daerah**		
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	85
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan Implementasi Pembangunan	Persentase	85
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang	Persentase	85

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
	Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
4	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	85
5	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	85
6	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	85
7	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	85
XXXV	**Pengawasan**		
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi
2	Persentase pengawasan secara berkala	Persentase	100,00
3	Penanganan Aduan Masyarakat	Persentase	100,00
4	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)
5	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP	Angka	66,32
XXXVI	**Kesekretariatan Daerah**		
1	Nilai SAKIP	Predikat	BB
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,73-3,79
3	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Angka	89,59
4	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Angka	Baik
5	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Angka	3,43
6	Persentase peningkatan tata kelola di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase	100
7	Persentase peningkatan tata kelola di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	Persentase	100
XXXVII	**Sekretariat DPRD**		
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	96,91
2	Persentase Penetapan PERDA	Persentase	90
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	Persentase	100
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD terhadap Eksekutif	Persentase	80
XXXVIII	**Penanggulangan Bencana**		
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,51

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2027
2	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase	100,00
XXXIX	**Kesatuan Bangsa Politik**		
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	84,00
2	Persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Persentase	76,00
XL	**Perizinan**		
1	Survey Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Perizinan	Persentase	94,00
2	Jumlah Penerbitan NIB	Angka	4336
XLI	**Pendapatan Daerah**		
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,53
2	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persentase	100,00
3	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persentase	100,00
4	Persentase Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Persentase	85,00
5	Persentase Realisasi Penerimaan PAD Lain-lain yang Sah	Persentase	100,00

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 menjadi acuan dan pedoman bagi OPD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
3. Pada akhir tahun anggaran 2027 setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaanya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2027 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sigi Tahun 2027.

BUPATI SIGI

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

